

Wacana Rekonsiliasi 1997 - 1999

KOMPAS - Selasa, 28 Oct 1997 Halaman: 14 Penulis: ASA Ukuran: 2288

MEGAWATI TAK PIKIRKAN REKONSILIASI

Solo, Kompas Megawati Soekarnoputri menyatakan pihaknya tak terlalu memikirkan kemungkinan melakukan rekonsiliasi dengan pihak Soerjadi. Ia justru mempertanyakan, apa yang sebenarnya di balik rekonsiliasi, maupun ide rekonsiliasi tersebut. Mega menyampaikan itu kepada wartawan di kantor DPC PDI Kodya Surakarta, Senin (27/10). "Secara internal sebenarnya tidak ada masalah. Seperti Anda tahu sendiri secara jelas aspirasi warga PDI," kata Mega seraya menyebut tiga faktor yang berada di luar PDI tapi berkaitan dengan PDI. Yaitu proses hukum (legal action), rekomendasi Komnas HAM, serta Tragedi 27 Juli, yang seluruhnya tak bisa diabaikan. Menanggapi sejumlah persidangan gugatan PDI pro-Mega terhadap PDI pro-Soerjadi di berbagai daerah, Megawati menyatakan, pihaknya tetap optimis. Ia mengatakan, pihaknya berusaha menjaga agar PDI yang dipimpinnya selalu berada di jalur konstitusional. "Kita sebenarnya merasa teramat prihatin karena PDI telah diobrak-abrik sedemikian rupa. Tapi warga yang kritis tetap bersemangat dan berdedikasi tinggi," ujarnya. Sementara itu Sekjen DPP PDI versi Munas Alex Litaay kepada wartawan menegaskan, pihaknya tetap berencana akan menyelenggarakan Kongres PDI pada Desember 1998. Lokasi yang sempat diusulkan di Solo, Semarang atau Purwokerto. Dan tentang perizinan yang akan diberikan pihak penguasa, Alex berharap tidak akan muncul masalah. Ia mempertanyakan, kalau Soerjadi dkk akan diberi izin untuk berkongres, "Apakah itu merupakan cara terbaik untuk membangun demokrasi. Dan apakah dengan itu akan menyelesaikan persoalan?" Alex Litaay menegaskan, bila pemerintah memang punya goodwill untuk menjaga PDI tetap eksis karena ia merupakan aset nasional, solusinya cukup mudah yakni pemerintah mengajak PDI untuk berbicara. "Bukankah ironis di mata internasional, bila di sebuah negara demokrasi namun partai demokrasinya justru hancur," ujarnya. Menjawab pertanyaan, Alex menandakan bahwa usaha untuk mengusir Megawati dari PDI semata-mata bertolak dari fitnah, dan tak ada alasan sama sekali. Alex menambahkan, PDI di masa depan akan tetap mempertahankan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. (asa)

KOMPAS - Selasa, 11 Aug 1998 Halaman: 11 Penulis: OKI Ukuran: 1432

PEMBEBASAN TAPOL/NAPOL SYARAT REKONSILIASI

Jakarta, Kompas Rekonsiliasi nasional, yang dibutuhkan untuk membangun kembali segenap aspek kehidupan bangsa, memerlukan adanya pembebasan seluruh tapol/napol (tahanan politik/narapidana politik) tanpa syarat. Berkaitan dengan itu, ABRI hendaknya berperan dalam kelompok kerja pemerintah, hak sipil maupun politik para tapol/napol dikembalikan, serta dilakukan rehabilitasi dan pemberian ganti rugi pada tapol/napol yang bersangkutan. Demikian pendapat para bekas tapol/napol dan keluarga tapol/napol, dalam pertemuan Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAPT) dengan Fraksi ABRI DPR, di Jakarta, Senin (10/8). Keluarga korban dan bekas korban tapol/napol bersama "Tanpa adanya pembebasan tapol/napol tanpa syarat itu, upaya rekonsiliasi nasional akan sulit dicapai. Padahal, rekonsiliasi nasional merupakan hal yang sangat penting untuk bisa membangun kembali negara kita yang besar ini," ungkap Gustaf Dupe, koordinator KAPT. Dalam kesempatan itu, beberapa bekas tapol/napol yang hadir seperti Rachmat Buchori Nasution, Wilson, Ken Budha, dan Abdul Kadir Al Habsyi mengungkapkan penderitaan mereka di tahanan. Di samping itu mereka juga menceritakan tentang kondisi tapol/napol lain yang sudah berusia lanjut, sakit-sakitan, tuna netra, bahkan ada yang sudah tidak bisa apa-apa lagi sehingga untuk makan pun harus disuapi. (oki)ÿ

Kliping ELSAM

KOMPAS - Sabtu, 01 Aug 1998 Halaman: 16 Penulis: SEP Ukuran: 3447

**REKONSILIASI NASIONAL MODEL KORSEL
Seoul, Jumat Pada masa krisis negaranya, Presiden**

Korea Selatan Kim Dae-jung tampaknya ingin memperkuat rujuk nasional sekaligus mencari dukungan untuk kebijakan reformasinya. Langkah yang ia tempuh, hari Jumat (31/7) menjamu empat presiden pendahulunya. Di antaranya, mantan presiden yang menjatuhkan hukuman mati atasnya dan menjerumuskannya ke dalam krisis terburuk sejak Perang Korea 1950-1953. Orang hanya akan membayangkan apa yang menjadi topik pembicaraan ketika Presiden Kim duduk bersama Kim Young-sam, Jenderal (Purn) Chun Doo-hwan, Jenderal (Purn) Roh Tae-woo dan Choi Kyu-hah serta para istri. Choi Kyu-hah, yang menjadi pejabat presiden setelah diktator Park Chung-hee terbunuh bulan Oktober 1979 dan berkuasanya Chun Mei 1980. Jamuan itu tertutup bagi pers. Juru bicara kepresidenan Istana Biru (Blue House) mengungkapkan, pada jamuan itu, Presiden Kim mengusahakan dukungan untuk kebijakan reformasinya dan mendorong reformasi nasional. Langkah Kim itu dinilai sebagai rekonsiliasi nasional di negeri yang terpecah antara kawasan Cholla di barat daya di mana Kim berasal dan kawasan Kyongsang di bagian tenggara di mana tiga pendahulunya berasal. Dengan suara 40 persen yang diperolehnya, Kim perlu mengontak dan memberikan jaminan kepada kalangan konservatif bahwa ia takkan menjalankan kebijakan radikal dan balas dendam. Kim kini menjalin hubungan dengan mantan musuh politiknya untuk memberikan kesan persahabatan. "Presiden Kim menjelaskan tujuan reformasi pemerintah baru dan mengungkapkan dirinya akan menangani krisis nasional," demikian pernyataan kantor kepresidenan. "Presiden Kim juga akan menekankan perlunya memfokuskan kekuatan nasional melalui harmoni nasional dan meminta kerja sama para mantan presiden untuk mencapai hal itu." Diajukan ke pengadilan Kim Young-sam jarang sekali tampil di luar rumahnya sejak meninggalkan kantor kepresidenan Februari lalu. Ia dinilai menyebabkan noda karena menyebabkan ambruknya kekuatan ekonomi ke-11 dunia tahun lalu. Menteri Keuangan dan penasihat ekonominya kini dihadapkan ke pengadilan karena pelanggaran dalam menangani krisis. Kim Young-sam sendiri mungkin tidak terjerat pengadilan. Namun Majelis Nasional mungkin mengadakan dengar pendapat untuk membahas sebab-sebab krisis ekonomi di mana ia harus hadir. Ketika duduk sebagai presiden berulang kali ia menyampaikan permintaan maaf karena gagal menangani ekonomi dan perilaku tak pantas putranya, Hyun-chul yang akhirnya dipenjara karena korupsi. Mantan Presiden Chun dan Roh tidak beruntung ketika meninggalkan jabatannya. Bulan Agustus 1996 keduanya didakwa berkhianat, membangkang dan korupsi berkaitan dengan kudeta 1979 yang menempatkan Chun di tampuk kekuasaan. Mereka juga dituduh terlibat pembunuhan aktivis pro-demokrasi tahun berikutnya di Kwangju. Kim Dae-jung dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan menyebabkan kerusuhan di Kwangju. Namun Chun akhirnya mengizinkan dia mengasingkan diri di AS. (Rtr/AFP/sep) Foto: Reuters JAMUAN REKONSILIASI - Sembari menjamu makan malam, Presiden Kim Dae-jung (kiri) bertatap muka dengan empat mantan presiden di Istana Biru, Seoul, Jumat (31/7), untuk menciptakan rekonsiliasi di Korea Selatan. Dari kiri, Kim, Chun Doo-hwan, Kim Young-sam, Choi Kyu-hah, dan Roh Tae-woo.

KOMPAS - Jumat, 14 Aug 1998 Halaman: 15 Penulis: BDM/TRA Ukuran: 4806

Jakarta, Kompas Presiden BJ Habibie harus segera mengambil sikap untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum juga terselesaikan. Pemerintah disarankan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional yang punya tugas untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara dan sosiolog Kastorius Sinaga yang dihubungi Kompas secara terpisah, di Jakarta, Kamis (13/8).

Sinaga mendukung seruan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar pemerintah menuntaskan beragam pelanggaran HAM yang terjadi di waktu lalu. Penuntasan pelanggaran HAM itu harus dalam kerangka rekonsiliasi nasional dan bukan untuk politik balas dendam. Walaupun begitu, pelaku pelanggaran HAM yang cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan, tetap harus disidangkan.

Abdul Hakim mengatakan, sejauh ini tidak jelas apa yang akan dilakukan Presiden BJ Habibie sehubungan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM. "Kasus 27 Juli mau diapakan, kasus Aceh mau diapakan, kasus Priok mau diapakan. Itu semua belum jelas," ujar Abdul Hakim. Abdul Hakim menyarankan agar Pemerintahan Habibie membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional yang terdiri dari Komisi Kebenaran, Komisi Amnesti, dan Komisi Reparasi. Komisi itulah yang ditugasi untuk mengetahui duduk persoalan dari semua kasus pelanggaran HAM, mencari pihak yang bertanggung jawab, dan kemudian memberikan kompensasi kepada korban. "Itu pernah terjadi di Afrika

Selatan saat Presiden Nelson Mandela berkuasa dan membentuk Komisi untuk menyelidiki kejahatan rezim Apartheid. Upaya itu ternyata berhasil memperkuat institusi demokrasi di negara itu," ujar Abdul Hakim. Di Indonesia, tercatat kasus Tanjungpriok, kasus Lampung, kasus Aceh, kasus Timtim, kasus Irja, kasus kerusuhan 27 Juli, kerusuhan 13-15 Mei, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, tewasnya Marsinah, serta tewasnya wartawan Bernas Fuad M Syafruddin alias Udin. Masyarakat terus menuntut agar kasus-kasus itu segera dituntaskan.

Pelajaran

Dengan dibuka dan dituntaskannya pelanggaran HAM di masa lalu, lanjut Sinaga, akan membuka modus pelanggaran HAM di masa lalu. Ini bisa menjadi pelajaran bagi penyelenggara negara supaya pelanggaran HAM seperti di masa lalu tidak dilakukan lagi. "Tetapi kalau memang ada bukti pelanggaran HAM itu dan dapat diadili, pelaku harus tetap disidangkan," ucap staf pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia itu.

Sinaga mengatakan, berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air selama ini acapkali menjadi isu politik. Kenyataan ini bisa menambah potensi disintegrasi masyarakat dan tak produktif (counter productive). "Kita memang tidak boleh melupakan sejarah. Tetapi dari sejarah masa lalu itu kita seharusnya belajar agar ke depan lebih baik lagi. Jangan justru berpikir ke belakang dan menjadikan pengalaman sejarah di masa lalu sebagai alat politik untuk menekan orang lain. Sejarah jangan sampai mematikan masa depan," tandasnya lagi. Dikatakan Sinaga, pengungkapan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu harus menjadi bahan rekonsiliasi dari berbagai potensi bangsa. "Berbagai pelanggaran HAM itu 'kan berlangsung dalam konteks sistem tersendiri. Walaupun harus diungkapkan dan dituntaskan, jangan hasil penuntasan itu menjadi politik balas dendam terhadap kelompok lain," paparnya. Menyinggung kemungkinan pemerintah memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM di masa lalu, menurut Sinaga, itu bisa saja dilakukan. Namun yang lebih penting adalah membuat sebuah gerakan solidaritas kemanusiaan terhadap korban itu, yang menjauhkan Bangsa Indonesia dari rasa emosional kelompok. "Bangsa ini harus menjauhkan diri dari rasa emosional kelompok. Jangan berkembang pemikiran, dengan membongkar kasus pelanggaran HAM di masa lalu untuk menumbuhkan solidaritas in-group serta menyamakan tokoh dalam pelanggaran HAM itu dengan kelompoknya. Artinya, menilai kelompok dari pelaku pelanggaran HAM itu pun pelanggar HAM dan harus dimusuhi," paparnya. Sinaga mengakui, saat ini berkembang pemikiran menyamakan aktor pelaku pelanggaran HAM di waktu lalu sama dengan kelompoknya. Opini ini terus dikembangkan untuk semakin menyudutkan kelompok lain dalam masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Padahal mestinya yang ditekankan, adalah adanya pelanggaran dan penghormatan HAM, serta bukan mengedepankan kepentingan politik kelompok. (bdm/tra)

KOMPAS - Senin, 24 Aug 1998 Halaman: 6 Penulis: KOR Ukuran: 3119

MENDESAK, REKONSILIASI MASYARAKAT TIMTIM

Jakarta, Kompas Rekonsiliasi nasional merupakan langkah mutlak yang harus tercapai dalam tahap perkembangan bangsa saat ini. Setiap pribadi warga harus mulai memiliki tekad, niat, dan semangat tegas untuk menghapuskan total segala bentuk dendam. Penciptaan kesadaran untuk menghapus dendam bisa dibentuk melalui wacana publik atau diformat melalui sebuah lembaga dengan kekuatan kekuasaan. Satu hal yang pasti, rekonsiliasi tidak berarti menghapus pelaksanaan proses hukum terhadap mereka yang bersalah.

Demikian pokok-pokok pikiran dari Rektor Universitas ParamadinaMulya Prof Dr Nurcholish Madjid, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Baharuddin Lopa, Menteri Kehakiman Muladi, dan mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI (Purn) Rudini.

Mereka dihubungi Kompas secara terpisah akhir pekan lalu untuk menanggapi penting tidaknya upaya yang mengarah kepada rekonsiliasi seluruh warga bangsa. Pertanyaan diajukan karena banyak persoalan, seperti menebarnya politik balas dendam dan menguatnya tuntutan penerapan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang semuanya berpotensi mengancam integrasi bangsa.

Hilangkan dendam

Usai berbicara pada acara peluncuran buku Bangsa Saya yang Menyebalkan: Catatan tentang Kekuasaan yang Pongah karya Eep Saefulloh Fatah, Sabtu (29/8), Nucholish menyatakan, dalam keadaan apa pun, politik balas dendam tidak boleh terjadi.

"Nabi Muhammad saja, kepada musuh paling berbahaya sekalipun, tidak memiliki rasa dendam. Jadi, langkah ini harus dimulai dengan penciptaan rekonsiliasi nasional sebagai sebuah wacana umum melalui pers, sehingga terbentuk publik opini," kata Cak Nur.

Menurut dia, yang tak kalah pentingnya adalah langkah sadar rekonsiliasi dan anti-dendam ini harus dimulai dari diri pribadi setiap warga bangsa, dengan tekad dan niat yang kuat. "Memang sulit sekali melihat konteks dan skala yang begitu besar. Tapi tidak ada jalan lain. Masak kita mau terus menerus dendam," katanya.

Dalam kaitan rekonsiliasi nasional ini, katanya, pengungkapan berbagai pelanggaran HAM selama ini harus terus dilakukan. "Itu bagian dari pengawasan sosial dan bagian dari usaha agar kita tidak sampai mulai menganggap lagi bahwa pelanggaran adalah hal yang biasa-biasa saja. Pemikiran ini berbahaya. Karena itu, harus diungkapkan terus. Bahkan sebetulnya tidak hanya yang besar-besar, yang kecil pun harus diungkap," demikian Cak Nur.

ABRI mendukung

Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menjawab pers di Halim Perdanakusuma Jakarta setibanya dari Pekanbaru hari Sabtu (29/8), mengutarakan, ABRI mendukung upaya dan langkah-langkah ke arah rekonsiliasi nasional.

Namun, katanya, dukungan ABRI ini sebatas jika rekonsiliasi itu bertujuan membangun kembali satu visi dan semangat untuk menyelesaikan bersama masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

"Jika rekonsiliasi itu dalam artian pemahaman bersama bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah masalah bangsa, dan yang bisa menyelesaikannya adalah juga seluruh bangsa, saya pikir itu positif dan baik-baik saja," tuturnya.

Dengan begitu, menurut Wiranto, "Kita akan saling mengerti dan memahami bahwa reformasi ini kita maknai sebagai peringatan bahwa kita pernah melakukan suatu hal yang tidak betul. Mari kita betulkan dan sempurnakan. Jika begitu 'kan baik."

"ABRI justru mengajak seluruh bangsa memahami rekonsiliasi itu. Tidak ada gunanya kita saling menyalahkan, saling curiga, saling hujat. Padahal kita membutuhkan kebersamaan, pengertian untuk menyelesaikan masalah kita. Ini agar masyarakat tenang dan membantu menciptakan rasa aman yang dibutuhkan masyarakat untuk segera keluar dari krisis ini," katanya.

Proses hukum

Menurut Hakim dan Lopa, sebuah komisi rekonsiliasi memang perlu dibentuk pemerintah guna menyelesaikan berbagai kasus kekerasan politik selama pemerintahan Orde Baru. Pembentukan ini penting sebagai landasan kuat bagi terjaminnya persatuan dan kesatuan, sekaligus memulihkan kredibilitas pemerintah pasca Orba.

Hakim mengingatkan, bangsa ini memang harus berorientasi ke depan, tapi itu tidak berarti mengabaikan peristiwa lalu. "Peristiwa masa lalu harus diselesaikan secara hukum. Kalau tidak, jangan salahkan masyarakat jika terus menuntut penyelesaian," katanya. Hal yang sama ditegaskan Lopa. Menurut dia, meskipun perlu diusahakan pemeliharaan persatuan dan kesatuan, itu tidak berarti menghapuskan tuntutan hukum bagi yang melakukan tindakan pidana. Tanpa penyelesaian hukum, katanya, landasan persatuan dan kesatuan bangsa akan rapuh dan sikap balas dendam terus tersimpan. "Bagaimana anaknya yang diperkosa, dibunuh, tapi pelaku tidak dihukum. Orang akan mengatakan negara apa ini," kata Lopa. Demikian juga halnya yang dikemukakan Rudini. Dikatakan, masih ada kesempatan bagi Presiden Habibie untuk berinisiatif menyelenggarakan rekonsiliasi nasional sebagai upaya menghilangkan sentimen, membina kerukunan dan saling menghargai. Kecurigaan di kalangan tokoh politik maupun antarkelompok etnis dan keagamaan tidak boleh menghalangi upaya rekonsiliasi, yang justru diperlukan untuk menghilangkan kecurigaan itu. Rudini sepakat, rekonsiliasi tidak boleh mengenyampingkan tindakan-tindakan hukum. Mereka yang diduga korupsi dan menyeleweng harus diusut tuntas. Bila bukti cukup, bawa mereka ke pengadilan. Pemerintah, menurut Menkeh Muladi, memang sampai saat ini belum mengambil sikap atas tuntutan agar kasus pelanggaran HAM di masa lalu diungkap kembali. Untuk mengatasinya, katanya, memang perlu dirumuskan prinsip rekonsiliasi nasional. Dengan demikian, berbagai kasus pelanggaran HAM itu tak menjadi komoditas politik dan bangsa Indonesia bisa membuka lembaran baru menyambut masa depan yang lebih baik. (gg/bb/tra/ama/wis)ŷ

KOMPAS - Senin, 31 Aug 1998 Halaman: 1 Penulis: IAS Ukuran: 6216
MEMAAFKAN ADALAH SYARAT DASAR

ADA semacam kesadaran, sejarah setiap bangsa itu dibangun oleh berbagai konflik dan rekonsiliasi. Melalui konflik, mereka disadarkan bahwa setiap perbedaan pada akhirnya memiliki kekuatannya masing-masing. Di sisi lain, melalui rekonsiliasi, sebuah bangsa diyakinkan bahwa kepentingan umum pada akhirnya merupakan acuan utama untuk membangun kehidupan bersama. Rumania, Afrika Selatan (Afsel), dan Korea Selatan (Korsel), merupakan contoh paling jelas dari kesadaran mengenai corak sejarah macam itu. Kediktatoran lembaga kepresidenan, politik apartheid (pembedaan warna kulit), serta represi terhadap oposisi telah menciptakan berbagai konflik berkepanjangan, kekacauan dan krisis mendalam. Namun, di tengah konflik-konflik tersebut, lahirlah tokoh dan kelompok masyarakat yang terasah hati nuraninya. Melalui tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat itulah, ketiga negara tadi mampu melakukan rekonsiliasi dan bangkit kembali menjadi sebuah bangsa 'baru'. Bagi sejarah Rumania, Afsel, dan Korsel, rekonsiliasi menjadi momen yang tak terelakkan dari hari esok. Mereka juga sampai pada kesadaran bahwa rekonsiliasi nasional bukan hanya retorik. *** BAGAIMANA membangun rekonsiliasi? Dari pengalaman Rumania, Afsel, dan Korsel, terungkap bahwa rekonsiliasi nasional sangat berkait langsung dengan kualitas sebuah bangsa: pendendam atau pengampun, penuntut balas atau pemaaf. Rekonsiliasi nasional sulit lahir dari sebuah bangsa pendendam. Syarat dasar terciptanya sebuah rekonsiliasi nasional adalah semangat untuk memaafkan. Siapa yang berhak memaafkan? Mereka yang telah menjadi korban! Penalaran semacam inilah yang membuat ajakan rekonsiliasi nasional dari Presiden Afsel Nelson Mandela segera bergaung ke segenap penjuru negara. Mandela adalah salah seorang korban dari kesalahan manajemen politik, korban dari politik apartheid yang berkiphrah di negara itu selama berpuluh-puluh tahun. Berdasarkan Konstitusi Sementara 1993, Mandela memerintahkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The Truth and Reconciliation Commission/TRC) yang diperkuat dengan Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No 34/1995 (UU No 34 Tahun 1995 tentang Penggalakan Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional) yang disahkan parlemen. Mandela juga mencabut UU Pertanahan (1913, 1936), UU Pemisahan Wilayah (1950), serta UU Pendaftaran Penduduk (1950). Tiga UU itu bagian dari sistem rasialis. Pemilu multipartai dan multirasial pada 27 April 1994, lalu menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah "Afrika Selatan yang Baru". TRC dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan memberikan "gambaran selengkap dan senatural mungkin, sebab-sebab dan tingkat pelanggaran HAM". Komisi juga menyatakan, amnesti mungkin diberikan "kepada orang-orang yang mengungkap secara lengkap fakta yang relevan berkait dengan kekejaman politik di masa lalu (1 Maret 1960 - 10 Mei 1994)." Dari catatan yang ada (The Economist, 28/9/96 dan BBC Online Network, 31/7/1998), hampir 21.000 orang telah memberikan bukti-bukti pelanggaran HAM (korban membeberkan perlakuan tak manusiawi aparat dan aparat mengakui telah melakukan hal itu serta memberikan alasan-alasannya). Komisi juga menerima permohonan amnesti dari 7.000 orang, tetapi lebih dari 4.500 pemohon ditolak. Pembentukan komisi yang dipimpin Uskup Agung Desmond Tutu itu bukannya tanpa rintangan. Orang-orang hitam yang menjadi korban, ada yang menganggap bahwa pemerintah tidak fair karena mengampuni para pelaku kejahatan terhadap harkat kemanusiaan. Orang-orang kulit putih pun khawatir bahwa mereka kalau mengaku akan dieksekusi seperti penjahat perang Nazi. Tetapi, mereka mendapat jaminan tidak akan diperlakukan seperti penjahat perang. Dasar pijakan Mandela membentuk TRC adalah terminologi agama, pengampunan dan penyelamatan. "Jika tidak ada amnesti, tidak ada Presiden Nelson Mandela," kata Deputy Ketua TRC Alex Boraine. *** KEPUTUSAN Presiden Korsel Kim Dae-jung memberikan pengampunan kepada dua mantan presiden yang semula dijatuhi hukuman mati dan hukuman 22 tahun penjara -Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo- adalah bentuk lain dari upaya mengupayakan rekonsiliasi nasional. Amnesti diberikan untuk menyatukan segala kekuatan guna mengatasi krisis. Langkah Kim Dae-jung tak berhenti di situ. Ia memperkuat rujukan nasional sekaligus mencari dukungan bagi kebijakan reformasinya dengan mengadakan jamuan makan dengan para mantan presiden yang di antaranya pernah berusaha menghabisinya: Kim Young-sam, Jenderal (Purn) Chun Doo-hwan, Jenderal (Purn) Roh Tae-woo, dan Choi Kyu-hah serta para istri. Ketika itu, Kim Dae-jung, -seperti diberitakan Reuters dan AFP-, menjamin tak menjalankan kebijakan radikal dan balas dendam. Menurut Kim Dae-jung, memfokuskan kekuatan nasional melalui harmoni nasional dan meminta kerja sama semua pihak lebih penting daripada menegakkan balas dendam dan caci-maki terhadap rezim pendahulunya. Yang terjadi di Korsel memang beda dengan Afsel, meskipun memiliki semangat sama: semangat pengampunan dengan tetap menaati aturan main (hukum tetap ditegakkan dan pranata-pranata kehidupan demokrasi seperti transparansi tetap menjadi landasan kebijakannya). *** JALAN yang ditempuh Korsel dan Afsel memang terasa lebih pas dengan budaya Timur, ketimbang jalan yang ditapaki

Rumania dengan menyingkirkan para aktor pencipta penderitaan rakyat. Zaman baru Rumania dimulai dengan penembakan mati terhadap Presiden Nicolae Ceausescu dan istrinya (25 Desember 1989) setelah diadili secara kilat di pengadilan militer. Hilangnya Ceausescu dengan seluruh kaki-tangannya disusul lahirnya bangsa Rumania Baru yang ditandai dengan tampilnya Ion Iliescu dari Front Penyelamatan Nasional sebagai pemimpin baru. Jalan mana yang harus ditempuh untuk menciptakan Rekonsiliasi Nasional kita? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab. (ias)ŷ

Kliping ELSAM

KOMPAS - Selasa, 01 Sep 1998 Halaman: 1 Penulis: BW/TRA/BDM Ukuran: 6056

PERLU DIBENTUK, KOMITE REKONSILIASI NASIONAL

Jakarta, Kompas Pemerintahan BJ Habibie disarankan segera membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional (KRN) untuk merespons berbagai tuntutan masyarakat yang menuntut keadilan atas praktek kekerasan politik Orde Baru yang telah banyak memakan korban. Prinsip rekonsiliasi didasarkan pada asas saling memaafkan, keterbukaan semua pihak yang terlibat tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban hukum. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Kompas dari Adnan Buyung Nasution, sosiolog Kastorius Sinaga, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Satjipto Rahardjo di Jakarta dan Semarang, Senin (31/8). Ketiganya dihubungi berkaitan dengan maraknya tuntutan masyarakat agar pemerintahan Habibie menuntaskan kekerasan politik. Kekerasan politik itu tersebar dari Aceh hingga Irian Jaya, dari Tanjungpriok hingga Santa Cruz (Timtim), dari kerusuhan 27 Juli hingga kasus Lampung. Nasution, yang belum lama ini bertemu dengan Uskup Agung Afrika Selatan Desmond Tutu, menilai, rekonsiliasi adalah satu-satunya jalan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk melaju ke masa depan tanpa diganggu masa lalu. Pendapat Nasution didukung Kastorius Sinaga dan Satjipto Rahardjo. Tersebar Sinaga mengatakan, kekerasan politik Orde Baru telah hampir tersebar di Indonesia. Kelompok masyarakat pun begitu gencar menuntut keadilan atas kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM. "Tuntutan masyarakat ini harus direspons secara benar oleh penguasa. Mau ditangani bagaimana mereka ini?" ujar Sinaga. Pemerintah harus menghargai inisiatif masyarakat untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Temuan itu jangan dilihat sebagai sebuah isu politik, tetapi harus dilihat sebagai indikasi adanya ketidakberesan pada masa lalu. "Jangan dianggap usaha LSM itu sebagai upaya mau memojokkan satu kelompok," katanya. Sinaga menambahkan, "Rekonsiliasi merupakan investasi politik ke depan, jadi bukan hanya sekadar mendamaikan kelompok yang bertentangan, tetapi mampu mendefinisikan kembali kelompok-kelompok yang berkontribusi melakukan kekerasan. Bagaimana peran ABRI, bagaimana peran DPR, peran masyarakat semuanya perlu didefinisikan." Mundur Mengenai persyaratan pokok ke arah rekonsiliasi, Nasution melihat satu jalan yang harus dilakukan adalah menyelesaikan proses transisi. "Contohnya adalah rezim Apartheid Afzel dirontokkan dulu dengan mengadili semua pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi seperti pembunuhan dan penculikan. Atau secara sukarela mengundurkan diri dari semua jabatan politis dan birokratis. Ini harus dicontoh," katanya. Nasution melihat Indonesia saat ini masih belum bersih dari rezim lama era Soeharto. Ini berakibat pada tidak relanya semua orang yang tertindas melihat sisa orang yang rezim lama masih berkuasa sehingga tingkat kepercayaan pada pemerintah tetap rendah. "Persoalan ini jangan diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Habibie," tegas Nasution. Menurut Nasution, kunci persoalan adalah saling memaafkan tetapi tidak berarti melupakan pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. "Langkah pertama adalah para pihak yang bertanggung jawab dengan kejadian di masa lalu mengakui perbuatannya secara ksatria dan jiwa besar, serta mengundurkan diri lalu diganti dengan orang-orang yang sama sekali baru," paparnya. Setelah itu, lanjut Nasution, Komite Rekonsiliasi Nasional mulai bekerja dengan mengundang pihak korban atau ahli warisnya untuk dimintai keterangan sejelas-jelasnya dan seterbuka mungkin. "Komite juga mengundang para pihak yang melakukan kesalahan itu untuk melakukan dialog dengan pihak korban. Tetapi bukan lagi untuk memaki dan membuka luka lama. Saling menjelaskan permasalahannya kenapa sampai terjadi peristiwa itu. Terpenting adalah proses itu terjadi. Jika dialog terjadi diharapkan ada proses pemaafan," paparnya. Duri dalam daging Satjipto Rahardjo mengungkapkan, apabila berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tidak dituntaskan akan terus menjadi "duri dalam daging". Sewaktu-waktu bisa muncul kembali serta mengganggu proses perjalanan pembangunan bangsa ini. "Itu sudah hukum sosial, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Karena pelanggaran HAM atau tindak kekerasan itu tercatat dalam hati nurani dan sejarah masyarakat. Harus ada upaya berdamai dengan kasus itu, sehingga luka hati masyarakat itu sedikit terobati. Caranya, ya dengan rekonsiliasi kebenaran. Ini sebagai jalan tengah," ungkapnya. Satjipto mengakui, sulit bagi hukum ikut menyelesaikan beragam pelanggaran HAM atau aksi kekerasan di masa lalu itu. Selain karena kasusnya terjadi cukup lama sehingga barang bukti, saksi dan tempat kejadiannya sudah berubah, prosedur penanganan perkara sesuai hukum pun membutuhkan waktu yang lama. Padahal, saat ini bangsa Indonesia sedang berburu dengan waktu untuk membangun kembali, dan masyarakat juga membutuhkan kepastian penanganan kasus-kasus tersebut. Penyelesaian dengan rekonsiliasi kebenaran, papar Satjipto, tak akan memuaskan semua pihak. "Tapi yang penting, semua pihak bersedia jujur dan berdamai dengan sejarah masa lalu. Lebih baik, kalau pemerintah atau pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap berbagai aksi kekerasan di masa lalu itu

memberikan ganti rugi. Ini barangkali dapat menjadi semacam obat meringankan luka keluarga korban pelanggaran HAM maupun tindak kekerasan di masa lalu tersebut," katanya lagi. Nasution, Sinaga, dan Satjipto menuturkan, rekonsiliasi kebenaran itu harus dilakukan sebuah institusi yang dipercaya masyarakat. Pemerintah tak perlu membuat tim rekonsiliasi tersendiri, serta tinggal mengukuhkan hasil kerja institusi mandiri tersebut. Komite inilah yang akan merekomendasikan kepada pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah. (bw/tra/bdm)

Kliping ELSAM

**KOMPAS - Jumat, 04 Sep 1998 Halaman: 1 Penulis: MYR/AMA/ELY/BB Ukuran: 3083
HABIBIE HARUS PRAKARSAI REKONSILIASI NASIONAL**

Jakarta, Kompas Pimpinan nasional, yaitu Presiden BJ Habibie, harus menjadi pelopor dalam memprakarsai terwujudnya rekonsiliasi nasional untuk memutus berkembangnya politik balas dendam di antara warga Indonesia. Kalau tidak, Indonesia terancam perang saudara yang akan menghancurkan. Pimpinan nasional berkepentingan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, khususnya pada saat sedang dilanda krisis di berbagai bidang. Hal itu dikemukakan Ketua Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI) Jenderal TNI (Purn) Rudini kepada Kompas, Kamis (3/9), di Jakarta. Ia diminta tanggapan tentang desakan untuk membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional dalam rangka merespons meningkatnya tuntutan masyarakat atas praktek kekerasan politik Orde Baru (Orba). Prinsip rekonsiliasi yang dituntut, didasarkan pada asas saling memaafkan, keterbukaan semua pihak yang terlibat, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban hukum. Hal senada dikemukakan secara terpisah oleh Ketua MPR/DPR Harmoko awal pekan ini. Menurut dia, rekonsiliasi nasional sebaiknya berlangsung sebelum Sidang Istimewa (SI) MPR, 10 November 1998. "Sehingga sebelum pelaksanaan SI telah ada satu tekad atau semangat mengukuhkan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan nasional. Tidak ada lagi dendam," ujarnya. Rudini mengatakan, proses rekonsiliasi memang membutuhkan klarifikasi dari semua pihak secara proporsional. Sebagai contoh, ia menunjukkan, dalam operasi penumpasan gerombolan pengacau keamanan, masyarakat yang menjadi korban, bukan saja oleh pihak ABRI, tapi juga oleh pihak gerombolan. "Saya tidak menolak tuduhan bahwa dalam operasinya, ada oknum ABRI yang melakukan tindakan melanggar HAM, namun pengungkapannya harus proporsional dan obyektif," jelasnya. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, proses rekonsiliasi dapat diwujudkan lewat pendekatan politik maupun hukum. "Pertama, pendekatan politik. Misalnya tentang kejadian di masa lalu yang dilakukan ABRI. ABRI 'kan waktu itu disuruh menumpas gerombolan. Ini 'kan secara politik benar, wong yang mengeluarkan perintah adalah pemerintah yang sah. ABRI di sini hanya melaksanakan tugas profesionalnya," kata Rudini. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan hukum. Tidak dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas, ada oknum-oknum yang menyimpang dari aturan permainan. "Mereka ini bisa dikenakan proses hukum. Tapi jika ada korban, korban itu perlu diteliti dulu secara teliti dan pasti, siapa yang melakukannya. ABRI atau gerombolan," kata Rudini. Jadi, menurut Rudini, gagasan rekonsiliasi itu dimaksudkan agar terjadi kesamaan pendapat dan pemahaman bahwa proses itu terjadi demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekonsiliasi itu juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perang saudara. Mereka yang dilibatkan dalam proses rekonsiliasi, menurut dia, adalah kelompok yang merasa bertanggung jawab atas suatu kejadian dan mereka yang dirugikan. (myr/ama/ely/bb)y

KOMPAS - Sabtu, 05 Sep 1998 Halaman: 1 Penulis: RIE/OSD/LAM Ukuran: 5619

Pemerintah-Komnas HAM Sepakat BENTUK TIM INFORMAL REKONSILIASI NASIONAL

Jakarta, Kompas Pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional. Diharapkan, tim itu bisa mendorong proses rekonsiliasi untuk mencapai kebersamaan baru dalam memajukan bangsa ke arah yang bersama-sama diinginkan. Diharapkan juga mampu menjadi ajang untuk melupakan dendam di masa lalu, tanpa harus mengabaikan masalah penegakan hukum. Hal itu penting, mengingat adanya ancaman separatisme dan disintegrasi di dalam masyarakat. Penegasan itu disampaikan secara terpisah kepada wartawan oleh Menkeh Muladi yang mewakili pemerintah dan dari Komnas HAM yang diwakili Marzuki Darusman, didampingi Bambang W Soeharto, Koesparmono Irsan, BN Marbun, Prof Ch Himawan, dan Samsudin, usai menghadiri silaturahmi antara Presiden BJ Habibie dengan Komnas HAM di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (4/9) sore. Silaturahmi yang berlangsung tertutup, selama sekitar tiga jam itu diawali dengan membahas berbagai masalah yang berkembang hingga tanya jawab. Selain enam nama di atas, dari Komnas HAM yang dipimpin Miriam Budiardjo, juga hadir Soegiri, Saafroedin Bahar, Sri Soemantri, Djoko Soegianto, Satjipto Rahardjo, Albert Hasibuan, AA Baramuli, Clementino dos Reis Amaral, Saparinah Sadli, dan Mohammad Salim. Selain Presiden, pihak pemerintah juga dihadiri keempat Menko, Mendagri, Menkeh, Menpen, Menhankam/Pangab, Mennaker, dan Menperta, serta empat kepala staf. Menurut Muladi, berbagai kejadian dan perkembangan di masyarakat sekarang ini, melahirkan penekanan dari Presiden tentang pentingnya dialog. Untuk itu, baik pemerintah maupun Komnas HAM sepakat membentuk Tim Rekonsiliasi Nasional. "Itu yang terjadi. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah itu (Aceh - Red), tetapi juga masalah-masalah nasional lain, dalam rangka menghadapi 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda dan sebagainya. Dan supaya kita berpikir, tanpa melupakan masa lalu, tetapi tetap menekankan masalah integrasi nasional. Menghilangkan rasa dendam dan sebagainya itu dipikirkan," ujar Muladi. Lupakan dendam "Terbentuknya Tim Rekonsiliasi Nasional itu menjadi sangat penting. Artinya kita berusaha melupakan dendam-dendam masa lalu, tanpa mengurangi kemungkinan law enforcement. Dan, itu menjadi sangat penting, untuk menciptakan integrasi nasional, karena masyarakat sekarang ini sedang terancam separatisme dan disintegrasi," tegas Muladi. Penjelasan itu diperkuat Marzuki Darusman. Menurut Marzuki, setelah mengamati perkembangan umum dan kehidupan politik di masyarakat, pemerintah sangat menekankan pentingnya proses rekonsiliasi nasional. Karena itu, disepakati tim tersebut bersifat informal. Namun, bentuk, teknis, mekanisme, atau hal lain dari tim atau bentuk lengkap tim tersebut baru akan diumumkan secara lengkap pada waktunya nanti. Baik Marzuki maupun Muladi mengatakan, tim tersebut melibatkan pemerintah yang menunjuk Menkeh sebagai penghubung, bersama Menko Polkam, Mendagri, dan Menhankam/Pangab. Sedang dari Komnas HAM, Marzuki mengatakan masih akan dibicarakan kemudian. Muladi menambahkan, anggota tim itu bersifat sementara, karena tidak tertutup kemungkinan melibatkan pula tokoh LSM. Bahkan ada pula kemungkinan melibatkan Amien Rais dan tokoh lain. Samsudin dari Komnas HAM mempertegas masalah itu dengan mengatakan, akan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang terpendang. Muladi menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi nasional, karena menurut dia, sekarang ini dalam kondisi cukup memprihatinkan. Upaya pemerintah untuk mempercepat UU Otonomi Daerah Tingkat II, kata Muladi, justru merupakan upaya meredam gerakan separatisme. Terutama, karena Pemda Tk II akan diberi otonomi luas, termasuk dalam pertimbangan pendapatan pusat dan daerah, kecuali untuk masalah luar negeri, moneter, dan hankam. Sementara Komnas HAM berpendapat, keadaan Indonesia sekarang ini belum berada dalam fase disintegrasi, meski banyak masyarakat daerah yang ingin menjau kembali hubungannya dengan pusat. Tentang kemungkinan upaya rekonsiliasi sampai kepada perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto, Menkeh Muladi mengatakan, "nggak sampai ke situ. Itu nanti harus dirumuskan kembali, yang namanya performance indicator. Justru dibentuk tim ini untuk menyusun indikatornya apa, dan bagaimana cara penyelesaiannya." Memang perlu Mensesneg Akbar Tandjung, Jumat, di Palu, memandang perlu dilakukan rekonsiliasi nasional untuk memasuki suatu tahapan baru bangsa Indonesia. Seluruh potensi bangsa diharapkan dapat bersatu padu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang pernah terjadi pada masa lalu. "Dengan rekonsiliasi nasional kita dapat menghadapi tugas baru bangsa kita ke depan. Memang kita mengakui, pada masa lalu kita banyak melakukan kekeliruan atau kesalahan. Nah, dengan rekonsiliasi nasional kita semua secara bersama-sama membuka jalan membangun suatu visi baru ke depan," kata Tandjung menjawab Kompas. Dalam kaitan itu, kata Tandjung, kita patut melakukan suatu evaluasi, atau suatu renungan ulang terhadap hal-hal yang

telah terjadi di masa lalu, "di mana kita telah turut serta dalam berbagai peristiwa pada masa itu." Namun demikian Tanjung menyerukan agar masyarakat jangan hanya bisa menyalahkan masa lalu, tetapi juga ikut serta berupaya memperbaikinya untuk masa yang akan datang. (rie/osd/lam)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 07 Sep 1998 Halaman: 1 Penulis: WIS/GUN/GG/UU/BB/PIN Ukuran: 5173

REKONSILIASI HARUS LIBATKAN FIGUR MENGAKAR

Jakarta, Kompas Rekonsiliasi Nasional harus melibatkan figur-figur di luar struktur yang memiliki akar di bawah (grass root) dan mempunyai pengaruh besar di tengah rakyat. Dalam pelaksanaannya, rekonsiliasi harus didasarkan pada pertanggungjawaban secara hukum atas praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama era pemerintahan Soeharto. Sehubungan itu, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Antara lain, rekonsiliasi nasional harus melibatkan semua pihak yang ikut melakukan kesalahan dalam Orde Baru. Kemudian, pemerintah harus secara terbuka mengungkapkan seluruh bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam era tersebut, dan terus mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM yang dipersoalkan masyarakat. Demikian antara lain benang merah pemikiran Mar'ie Muhammad, Dr Mudji Sutrisno SJ, A Dahlan Ranuwihardjo, Franz Magnis Suseno, Dr Affan Gafar, yang dihubungi secara terpisah, Sabtu (5/9) dan Minggu (6/9), menanggapi kesepakatan pemerintah dan Komnas HAM untuk membentuk Tim Informal Komite Rekonsiliasi Nasional. Mar'ie Muhammad menegaskan, sampai saat ini sangat dirasakan banyak kekuatan riil yang berada di luar struktur dan tidak dilembagakan tetapi memiliki pengaruh pada masyarakat. Sehubungan itu, upaya rekonsiliasi jangan dibatasi dengan melibatkan Komnas HAM saja. Mereka yang berada di luar struktur, yang kurang memperoleh perhatian atau agak disepelekan, justru lebih penting. Ia menyebut nama Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Hamengku Buwono X. "Ini penting, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang mengakar dan tujuan kita adalah membangun masyarakat madani yang egaliter," kata Mar'ie. Tokoh-tokoh yang duduk dalam tim rekonsiliasi nasional, kata Mar'ie, harus berdasarkan prinsip kesetaraan. Mereka harus berbicara secara langsung dengan Presiden Habibie, dan terbuka bagi publik. Dalam tim inilah dilakukan dialog berbagai persoalan nasional, seperti aspirasi daerah yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Akibat politik Orba Dalam diskusi yang diselenggarakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia di Bandung, Sabtu, Mudji mengatakan, Indonesia memang butuh rekonsiliasi nasional untuk mencari suatu perekat nasional baru, karena selama ini satu komponen bangsa dengan yang lain itu saling mencurigai, saling tidak percaya, dan terpecah-pecah. "Ini akibat politik KKN Orde Baru," katanya. Dengan demikian, masing-masing komponen kemajemukan itu harus mampu mengolah trauma sejarah masing-masing. "Lalu dari situ harus ada saling memaafkan dan mengampuni. Artinya, kita harus mengaku salah kalau kita masing-masing juga pernah berbuat salah. Misalnya dulu yang mayoritas menindas minoritas, atau tentara menculik atas nama kepentingan sendiri. Permintaan maaf secara moral dikehendaki oleh setiap agama," kata Mudji. Selanjutnya, rekonsiliasi harus memakai hukum pertanggungjawaban, sehingga tidak bisa cuma meminta maaf secara retorika. Harus ada pertanggungjawaban di depan hukum mengenai pelaksanaan bangsa selama 32 tahun ini, termasuk sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dipersoalkan masyarakat. Hanya dengan pertanggungjawaban semacam itulah kredibilitas pemerintah dapat dipulihkan. Senada dengan Mudji, Franz Magnis dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Sarjana dan Cendekiawan Katolik Indonesia, di Bandung, Minggu, mengajukan tiga syarat dalam mengupayakan rekonsiliasi. Pertama, semua yang ikut terlibat melakukan kesalahan dalam Orde Baru harus mengakui kesalahannya serta keterlibatan dalam penyelewengan selama masa pemerintahan tersebut. Kedua, pemerintah harus secara terbuka mengungkapkan seluruh bentuk penindasan dan ketidakadilan akibat zaman tersebut. Ketiga, segala tindak penindasan harus diakhiri, termasuk penahanan baik kepada semua tahanan, tahanan politik serta narapidana politik harus dibebaskan. Magnis menilai positif akan gagasan melakukan rekonsiliasi, sehingga tanpa rasa dendam mau bersama-sama membangun demokrasi Indonesia. "Setelah semua syarat dipenuhi, barulah rekonsiliasi dimungkinkan untuk dilaksanakan. Kalau tidak, semua masalah tak akan tuntas, sehingga cita-cita itu tak pernah terjadi," paparnya. Pakar hukum A Dahlan Ranuwihardjo juga sepakat bahwa pemerintahan BJ Habibie perlu memperbaiki kebijakan-kebijakan yang salah dalam pemerintahan Orba untuk melakukan rekonsiliasi nasional. "Tunjukkan dulu itikad memperbaiki kekeliruan dari rezim Soeharto. Kalau ada niat dan tekad baik, baru kumpulkan para tokoh untuk membicarakan rekonsiliasi nasional," katanya di Jakarta, Sabtu. Sementara itu, pakar politik Affan Gafar justru mempertanyakan tujuan diadakannya rekonsiliasi nasional. "Rekonsiliasi nasional untuk apa, agendanya apa, mekanismenya bagaimana. Kalau tiga pertanyaan itu tidak dapat dijelaskan, semua persoalan akan mentah," tuturnya. Ditegaskan, rekonsiliasi bukan sekadar kumpul-kumpul dan membicarakan rekonsiliasi. (wis/gun/gg/uu/bb/pin)j

KOMPAS - Senin, 07 Sep 1998 Halaman: 4 Penulis: - Ukuran: 7876

Tajuk: Niat Rekonsiliasi Nasional Harus Kenegarawanan Jangan Perpolitikan

KITA berpendapat, pendekatan rekonsiliasi nasional merupakan jalan tepat lagi bijak. Agar tercapai tujuannya, jalan itu harus ditempuh dengan sikap, motivasi dan pendekatan kenegarawanan, bukan perpolitikan. Tujuan dan pertimbangannya bukan menguntungkan figur ini atau itu, kelompok ini atau kelompok itu, melainkan kepentingan bersama, seluruh rakyat, bangsa dan negara. Mengapa pendekatan rekonsiliasi nasional kita perlukan? Pertimbangan yang paling jauh adalah ancaman disintegrasi nasional. Ini persoalan historis, yakni persoalan menemukan keseimbangan dan format yang akseptabel, fisibel dan sejahtera antara pusat dan daerah, memberikan format desentralisasi dan otonomi dalam struktur negara kesatuan sampai kepada kemungkinan pemikiran bentuk negara federal. Persoalan itu kini menjadi manifest, terbuka dan aktual, ketika gerakan reformasi membangkitkan dan melakukan gugatan terhadap segala sesuatu yang kemarin. Mula-mula hanya ekses-eksesnya, kemudian juga apa yang menyebabkan ekses-ekses itu muncul, sekadar orang, kepemimpinan ataukah struktur dan sistemnya. Potensi disintegrasi yang terkuak dan aktual bukan karena warisan daerah-daerah periferi seperti Timor Timur dan Irian Jaya. Potensi disintegrasi bangkit lagi lebih luas mengingatkan pengalaman dan pergulatan kita menjelang tahun enam puluhan. Salah satu pemicunya adalah ketika gerakan reformasi menggugat dan minta pertanggungjawaban tindakan-tindakan yang melanggar martabat dan hak-hak asasi manusia di masa lalu, termasuk yang merupakan ekses atau kebijakan operasi-operasi militer. Sampai-sampai gugatan itu akan ditarik mundur sampai ke tahun 1965/66, kudeta G 30 S/PKI dan Surat Perintah 11 Maret. Mulailah orang terkesima, akan sejauh manakah gugatan-gugatan itu dan apa jadinya jika segala sesuatu itu disertai bangkitnya lagi emosi, sentimen-sentimen serta rasa perasaan balas dendam. SEKARANG mulai ramai dibicarakan persiapan Sidang Istimewa MPR. Persiapan yang semakin dekat waktunya, mengundang agenda dan format yang berbeda. Perbedaan itu semakin beragam. Pada mulanya, perbedaan terletak pada pendapat yang menginginkan Sidang Istimewa beragenda tunggal. Yakni memutuskan ketetapan (termasuk mencabut ketetapan) yang bertalian dengan pemilihan umum. Karena itu termasuk juga menetapkan Undang-Undang Keparitaan dan Pemilihan Umum. Pendapat lain berpandangan, dalam Sidang Istimewa itu agar juga ada agenda minta pertanggungjawaban mantan Presiden Soeharto. Rencana agenda itu, mau tidak mau akan mengundang perdebatan, bagaimana dengan pertanggungjawaban atau proses suksesi, sehingga posisi Presiden Habibie pun bisa dipermasalahkan! Bahkan muncul lagi pendapat, MPR yang kemarin memilih dan mengangkat Presiden Soeharto, seberapa jauh mempunyai legitimasi moral politik untuk mempersoalkan segala sesuatu yang bertalian dengan buah pilihan dan penetapannya sendiri, dengan perbedaan bahwa kini segala sesuatu berlangsung dalam semangat dan suasana reformasi? Muncullah pemikiran yang dianalogikan dengan perubahan tahun 1965/66, ketika MPR lama digantikan dengan MPR baru yang diberi kualifikasi S, Sementara, karena tidak merupakan hasil pemilihan umum. Logika pendapat itu kuat dan jelas. Pelaksanaannya tidak mudah, apalagi jika diingat, betapa kita berkejaran dengan akumulasi permasalahan yang desak-mendesak. KITA ibaratnya baru saja mulai memasuki fase baru, yakni fase penyidikan, pengusutan dan penindakan terhadap KKN, Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Prioritas pertama terhadap bank-bank yang telah secara tidak benar menggunakan kucuran bantuan kredit dari pemerintah bertrilyun-trilyun jumlahnya. Demi keadilan sekaligus demi keharusan memelihara dan menumbuhkan perbankan yang sehat, penyidikan, pengusutan dan penindakan itu harus dilakukan. Tentu saja segala sesuatu menurut asas hukum dan proses hukum. Kecuali itulah mandat reformasi, yakni menegakkan asas hukum dan due process of law, juga karena akan semakin semrawut dan tidak menjamin kepastian, jika main hantam kromo. Dilakukan juga langkah memotong segala relasi bisnis, khususnya antara swasta dengan instansi pemerintah atau perusahaan milik negara yang merugikan negara dan secara tidak adil menguntungkan pihak swasta. Swasta dalam hubungan KKN, adalah swasta yang bertalian dengan keluarga pejabat/penguasa. Pada tingkat pertama, pemotongan dan penindakan KKN dimulai dengan keluarga Cendana. Segera muncul urutan pemikiran, asosiasi dan langkah tindakan, apakah hanya akan terbatas pada keluarga Cendana? Bagaimana dengan keluarga-keluarga pejabat-pejabat lain. Bahkan tentang KKN pada pejabat-pejabat lain, termasuk atau terutama yang sekarang justru masih menjabat dalam pemerintahan, sempat beredar bukan saja daftar dan isu dari mulut ke mulut, tetapi juga daftar tertulis. Kebenaran isu dan daftar itu harus kita sikapi dengan prinsip praduga tidak bersalah. Sementara itu, anggapan umum dan nalar sehat berpendapat, masuk akal bahkan cukup ada indikator-indikator bahwa bisnis dan praktek KKN tidak terbatas hanya pada keluarga Cendana. Sesungguhnya keadaan itulah yang ikut menyebabkan, mengapa pemerintahan sekarang ini menunjukkan atau memberikan kesan gamang,

kesan enggan, kesan ewuh pekewuh dalam banyak hal, kecuali dalam langkah-langkah seperti membebaskan tapol, mengusut penculikan, kebebasan pers, pendirian partai-partai. Kondisi bahwa "kita juga tidak bebas dari KKN" itulah membuat pemerintahan ini gamang dan sedikit banyak menghambat efektivitas pemerintahan dan rehabilitasi ekonomi. TELEVISI melaporkan, seorang ibu dari Jasinga, Bogor, buru-buru pergi ke pasar Palmerah, Jakarta, setelah tahu, di sana ada pembagian beras. Itulah lambang sekaligus realitas yang masih tetap kita hadapi dan mendesak. Terpuruknya ekonomi menimpa langsung rakyat banyak, dalam kebutuhannya yang paling pokok, yakni makanan. Belum lagi pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Kesulitan ekonomi itu mendesak dan bisa menjadi pemicu kegelisahan dan konflik sosial yang lebih keras dan berkepanjangan. Pemerintahan negara-negara industri yang tergabung dalam G-7, secara kolektif, secara bilateral dan multilateral, memobilisir dana bantuan dan pinjaman 14 milyar dollar AS untuk mengatasi kebutuhan pokok, padat karya, pendidikan, kesehatan. Jika mereka saja sibuk, mana mungkin kita mau tetap mengambil sikap business as usual, sekadar saling menyalahkan dan mencari kambing hitam, asyik melakukan perpolitikan untuk sekadar lagi-lagi membangun kekuasaan dan saling melepaskan emosi vendetta. Pertimbangan-pertimbangan di atas, menyebabkan kita menunjang visi, kebijakan dan langkah pendekatan rekonsiliasi nasional. Agar mencapai tujuan dan membangkitkan semangat rekonsiliasi itu dalam prosesnya, motivasinya haruslah kenegarawanan yang inklusif, bukan sekadar perpolitikan. Kita tanggalkan sebagai wujud sumbangan untuk reformasi, bahwa yang kita kejar bukanlah kekuasaan dan kedudukan pribadi atau kelompok, tetapi kerelaan dan ketulusan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Agar tidak sekadar terus kisruh, saling menyalahkan, saling membongkar apalagi membongkar sendi-sendi eksistensi kita bersama, pendekatan rekonsiliasi nasional harus kita tempuh. Tentu saja, asas hukum dan proses hukum tetap ditegakkan karena memang diperlukan pertanggungjawaban dan tegaknya rasa keadilan. Tegaknya hukum tidak berlawanan dengan pendekatan rekonsiliasi nasional.

Kliping ELSA

KOMPAS - Senin, 07 Sep 1998 Halaman: 15 Penulis: SINAGA, KASTORIUS Ukuran: 4539

Rekonsiliasi sebagai Investasi Penegakan HAM *Catatan Hukum Kastorius Sinaga

Catatan Hukum Kastorius Sinaga REKONSILIASI SEBAGAI INVESTASI

HARI Jumat (4/9), upaya ke arah rekonsiliasi nasional makin mendapat bentuk yang jelas yaitu berupa kesepakatan untuk membentuk Tim Rekonsiliasi Nasional. Meski kesepakatan itu masih bersifat informal karena dicapai hanya lewat pertemuan silaturahmi antara Komnas HAM dan Presiden BJ Habibie, namun langkah itu mengindikasikan niat dan keseriusan kita untuk menciptakan iklim yang lebih sejuk ke depan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah menyangkut beberapa hal. Pertama, cakupan dan format rekonsiliasi perlu dirumuskan sehingga ia mampu menampung persoalan krusial yang selama ini terasa mengganjal gerak roda kehidupan politik nasional. Kedua, kedudukan dan susunan tim rekonsiliasi yang berfungsi sebagai fasilitator. Hal ini mengacu pada kapasitas dan akseptasi keberadaan tim tersebut. Terakhir menyangkut arah dan target rekonsiliasi yang perlu dirumuskan sehingga hasil maupun kesepakatan yang nantinya digariskan tidak malah memperuncing keadaan ataupun mengundang debat baru yang kontraproduktif di masyarakat. Ketiga pokok soal ini kiranya perlu dibahas terutama untuk menempatkan rekonsiliasi bukan sekadar "manuver" politik sekelompok tetapi lebih merupakan investasi di bidang politik yang nantinya untuk pengembangan kepercayaan nasional (national confidence building measures). Rasanya kita semua sepakat, selama 32 tahun pemerintahan Soeharto telah terjadi sederetan represi yang sistematis terhadap hak politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Saat itu koridor kekuasaan berikut lembaga demokrasi nyaris tertutup dan tak memadai untuk memberi respons positif dan adil atas korban dan kerugian moral dan materiil yang diderita rakyat. Kasus Aceh, Lampung, Tanjungpriok, Timor Timur, Irian Jaya, Peristiwa 27 Juli di Jakarta, adalah beberapa kasus menonjol di mana mesin kekuasaan yang sarat dengan kekerasan menindas hak yang paling asasi dari masyarakat. Di samping itu, sederetan peristiwa konflik horisontal di lingkaran elite yang kemudian merembes ke bawah dan memicu konflik antara kelompok di masyarakat juga tak terbilang frekuensi maupun korbannya. Seluruh peserta tersebut hanya dapat terekam di memori dendam dan kekecewaan masyarakat. Karenanya, format dan cakupan rekonsiliasi seharusnya mengarah pada dua level yang berbeda. Pertama, rekonsiliasi antara penguasa dan rakyat yang menjadi korban kekerasan struktural di masa lalu, dan kedua, rekonsiliasi antara elite dengan pihak oposisi yang eksis di masyarakat. Mekanisme rekonsiliasi dari dua level ini tentunya berbeda dan masih perlu dirumuskan lewat serangkaian dialog yang bersifat nasional dan lokal. Sehubungan dengan cakupan rekonsiliasi di atas, Tim Rekonsiliasi Nasional harus dapat menempatkan diri sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjadi mediator ataupun advokator langkah yuridis yang perlu ditempuh. Oleh karenanya, tim itu harus independen, memiliki legalitas, integritas serta obyektif dalam pengertian anggotanya tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung atas kasus yang diagendakan di dalam rekonsiliasi. Seperti yang dilakukan Korea Selatan, untuk menjamin efektivitas kerjanya, tim tersebut dapat dilembagakan ke dalam bentuk Dewan Rekonsiliasi Nasional, yang kedudukan dan fungsinya mendapat pengesahan dahulu dari DPR. Seperti halnya di negara lain, kebutuhan rekonsiliasi, khususnya dirasakan ketika kepercayaan politik masyarakat makin keropos, sementara penyusunan platform politik ke depan mendapat hambatan berarti akibatnya meruaknya tuntutan untuk pertanggung-jawaban terhadap represi struktural di masa lalu. Maka, arah rekonsiliasi harus dapat mengembangkan kesadaran di masyarakat bahwa kebrutalan politik di masa lalu adalah akibat dari tidak adanya supremasi hukum dan rendahnya kontrol masyarakat. Kasus yang diagendakan dalam rekonsiliasi, karenanya, harus mampu dibedah secara yuridis dengan mengutamakan derajat pelanggaran HAM yang terjadi di dalamnya. Dari itu semua, rekonsiliasi akan bermakna sebagai langkah awal untuk mengurangi beban politik yang diwariskan rezim masa lalu serta sekaligus menjadi sebuah modal politik yang akan memperkuat tekad kita untuk menghargai hukum dan nilai HAM ke depan. (Kastorius Sinaga, Dosen Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia)

KOMPAS - Selasa, 08 Sep 1998 Halaman: 6 Penulis: AMA/TRA Ukuran: 2865

Agum Gumelar: Lebih Tepat Rembuk Nasional

Jakarta, Kompas Ide rekonsiliasi nasional itu positif yang perlu ditunjang seluruh komponen bangsa. Namun penggunaan istilah rekonsiliasi perlu dikaji karena dapat mengandung arti bahwa dalam masyarakat Indonesia telah muncul kubu-kubu yang bertikai sedemikian rupa sehingga telah terjadi disintegrasi nasional. Karena itu, lebih tepat dikatakan rembuk nasional. Demikian pendapat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Agum Gumelar dalam percakapannya dengan Kompas, di Jakarta, Senin (7/9), di Jakarta. "Saya lebih setuju jika kita mengadakan rembuk nasional. Saya merasa penggunaan rekonsiliasi belum tepat untuk situasi bangsa kita saat ini," katanya. Menurut Agum, penggunaan istilah "rekonsiliasi nasional" dapat mengakibatkan munculnya penafsiran lain di dunia internasional. Seolah-olah saat ini Indonesia mengalami disintegrasi. "Rekonsiliasi nasional itu, kalau ada dua kubu atau lebih yang bertikai sehingga perlu didamaikan," katanya. Diharapkannya agar rembuk nasional ini dapat dilaksanakan secepatnya dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang sekarang ini masih sangat nyata perbedaan persepsi dan visinya guna membawa bangsa menghadapi hari esok lebih baik. Sementara itu, dalam percakapan Kompas secara terpisah dengan Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Abu Hasan Sazili dan praktisi hukum Dr Adnan Buyung Nasution kemarin, disebutkan bahwa rekonsiliasi nasional tidak bisa hanya digantungkan kepada tim informal yang dibentuk pemerintah bersama Komnas HAM. Terbentuknya tim itu harus tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri. Komnas bisa memfasilitasi dengan mengumpulkan tokoh-tokoh yang dipercaya dan diterima rakyat. Sementara negara sekadar mengukuhkan pembentukan tim rekonsiliasi tersebut. Tim rekonsiliasi yang dibentuk rakyat pasti akan lebih dipercaya. Keduanya sepakat, dalam rekonsiliasi nasional seharusnya setiap pihak bisa memaafkan, walaupun tidak bisa melupakan peristiwa yang telah menimpa diri maupun keluarganya. Karena kalau semua orang tidak bisa saling memaafkan, seluruh peristiwa pelanggaran HAM serta kekerasan yang terjadi di negeri ini pasti akan diminta dibuka lagi. "Orang-orang yang berjiwa besar, seperti Roeslan Abdulgani, Frans Seda, Romo Mangun dan Gus Dur berkumpul, membahas problema bangsa ini. Mereka ini 'kan orang-orang yang bisa diterima berbagai kalangan dan bijaksana," tutur Nasution. Abu Hasan menyarankan, tim dibagi lagi ke dalam beberapa subtim yang akan menangani berbagai persoalan yang selama ini diadakan oleh masyarakat untuk diungkap. Dengan adanya subtim itu, pemantauan dan penanganan kasus-kasus yang dituntut masyarakat untuk diungkap kembali akan lebih intens dan tuntas. (ama/tra)j

KOMPAS - Kamis, 10 Sep 1998 Halaman: 6 Penulis: SIR Ukuran: 454
SARI BERITA SOSIAL-POLITIK REKONSILIASI MAKIN MENDESAK - Ketua Partai
Kebangkitan

Bangsa Matori Abdul Djalil di Jember Rabu (9/9) menyatakan suatu pemerintahan rekonsiliasi dalam jangka pendek ini sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah, sebab bila keadaan seperti ini dibiarkan terus-menerus maka bangsa akan menjadi makin terpuruk. Hal itu dikatakan Matori usai menyaksikan deklarasi pembentukan DPC PKB Jember. (sir)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Jumat, 11 Sep 1998 Halaman: 15 Penulis: TRA/BDM Ukuran: 24

Rekonsiliasi Nasional Jangan Jadi Proyek Pengampunan

REKONSILIASI NASIONAL JANGAN JADI PROYEK PENGAMPUNAN

Jakarta, Kompas Rekonsiliasi nasional jangan menjadi sarana untuk membenarkan pemberian impunity (pembebasan/pengampunan dari proses hukum) terhadap mereka yang jelas-jelas bersalah melakukan kekerasan politik dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Memberikan pembebasan tanpa proses hukum kepada pelaku pelanggaran HAM sama saja dengan mengingkari hak-hak korban. Demikian pernyataan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi kepada pers di Jakarta, Kamis (10/9). Hendardi melihat seruan rekonsiliasi nasional yang datang dari para tokoh politik - bukan dari rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM - lebih berbobot politis ketimbang merupakan suatu manifestasi dari pengakuan dan penghormatan HAM. Hendardi melihat proyek rekonsiliasi nasional ini sebenarnya belum memiliki dasar keperluan yang jelas. "Apa yang kita lihat sekarang sebenarnya usaha pencarian keadilan yang dilakukan rakyat, khusus para korban semasa pemerintahan Soeharto," katanya. Ia melihat, pada kenyataannya pemerintah bertindak lamban dan bahkan enggan mengusut dan mengambil tindakan hukum atas kasus pelanggaran HAM. Kemudian, pemerintah menyebut upaya korban mencari keadilan sebagai "balas dendam politik" adalah penyesatan politik. Mundur Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedy Panjaitan mengemukakan, sebelum Komisi Rekonsiliasi terbentuk dan bekerja, pihak-pihak yang menyadari terlibat dalam praktek kekerasan politik pada masa Orde Baru, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. "Itu akan memudahkan pelaksanaan rekonsiliasi nasional," ujar Panjaitan. Ia menambahkan, masyarakat dari berbagai spektrum politik dan dikenal punya integritas hendaknya bisa masuk dalam Komisi Rekonsiliasi. Sedang pejabat yang pada masa Orde Baru diketahui sebagai operator kekerasan politik, hendaknya tidak menjadi anggota komisi. "Sebaiknya mereka mundur dulu dari jabatannya dan melakukan introspeksi diri," ujarnya. Sementara Menkeh Muladi mengatakan, wujud dan bentuk Komisi Rekonsiliasi masih dipikirkan dan dikaji. Pengkajian mendalam diperlukan mengingat masalah yang dihadapi bangsa begitu banyak. Dalam komisi itu akan ada pejabat pemerintah yang menjadi anggota, namun mereka tidak akan menjadi pimpinan komisi. (tra/bdm) y

KOMPAS - Rabu, 16 Sep 1998 Halaman: 4 Penulis: SEDA, FRANS Ukuran: 15200

TIM REKONSILIASI NASIONAL

Oleh Frans Seda

SEHARI sesudah dicetuskan persetujuan antara Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dengan Pemerintah, untuk membentuk suatu Tim Rekonsiliasi Nasional dengan berbagai variasi dalam motivasi seperti yang dikemukakan para pencetus ide terkait, Ketua Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Letjen TNI Agum Gumelar datang dengan gagasan "Rembukan Nasional". Jauh sebelumnya, sudah ada pula gagasan mengenai Dialog Nasional, Kerukunan Nasional, Konsensus Nasional, dan sebagainya. Berbagai nama yang dipergunakan, namun semuanya menunjukkan adanya suatu kebutuhan nasional yang mendasar dan mendesak akan suatu komunikasi secara jujur, terbuka, dan terpercaya. Yaitu, antara semua anak negeri yang masih berkemauan baik dan mencintai Ibu Pertiwi yang sedang lara ini, untuk keluar dari krisis kepercayaan pada satu sama lain krisis kepercayaan pada Pemerintah dan kemampuannya, krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga perwakilan dan kedaulatan rakyat, dan krisis kepercayaan pada kesatuan, persatuan, serta hari depan bangsa. Sebab krisis-krisis yang ada di permukaan, seperti krisis ekonomi, politik, dan sosial, karena kompleksitasnya atau karena keberlarutan dalam penanganan dan penyelesaiannya. Secara pelan dan pasti, segalanya itu telah menggerogoti dari dalam lantai, fundamen, dinding-dinding, tiang-tiang sokoguru dan atap, serta dari pondok indah tempat kita hidup bersama, yang namanya Republik Indonesia ini. Belum pernah dalam sejarah 53 tahun Kemerdekaan kita ini, kita mengalami kegoncangan-kegoncangan yang demikian fundamental, seperti yang kita alami dewasa ini dengan penuh ketidakpastian yang fundamental pula. Dalam kehidupan kita berbangsa, kita berhadapan dengan pertanyaan tentang inti dari kita sebagai bangsa, dan pertanyaan akan arah ke mana bangsa ini mau dibawa. Masalah nasib serta tujuan hakiki dari bangsa ini. Dalam kehidupan kita bernegara, dipersoalkan kembali hal yang sudah menjadi darah dan daging dari Negara ini, ialah Negara Kesatuan dan Persatuan. Dan tak heran bahwa persoalan ini akan menjurus kepada permasalahan dasar negara yakni Pancasila. Dengan demikian terjadilah peluang untuk desintegrasi bangsa, negara dan masyarakat bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengalami putus tali temali jaringan-jaringan vital dalam tenunan sosial bangsa, yang mengakibatkan kita saling mencurigai, bahkan sampai-sampai kita saling melecehkan dan saling menjerah. Terhadap tantangan-tantangan fundamental tadi, tak ada satu golongan pun secara sendiri-sendiri dapat mengatasinya. Proses penggerogotan terhadap fundamen-fundamen hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ini, harus kita hadapi secara bersama. Kita koreksi bersama-sama dan kita kembalikan kepada jalur yang benar dan asli, seperti yang dikehendaki para Pendiri Republik ini. Karena itu, keprihatinan mendasar dan mendesak akan nasib fundamental dari bangsa, negara, dan masyarakat, yang sekarang ini sedang mengalami krisis, serta kesadaran akan kebersamaan dan akan suatu upaya secara bersama-sama itulah yang harus mendasari dan menjiwai setiap usaha bersama, apakah itu namanya Rekonsiliasi, Rembukan, Dialog, Kerukunan, atau Konsensus Nasional. Persamaan persepsi Setelah mengadakan clearance mengenai sikap dan motivasi yang diperlukan dan materi/agenda yang akan diperbincangkan, maka ada beberapa masalah yang memerlukan kebersamaan dalam persepsi. Diawali dengan secara kritis mengadakan koreksi-koreksi, agar upaya Rekonsiliasi dan sejenisnya itu sejalan dengan upaya Reformasi. Sebab, Reformasi tanpa koreksi ataupun koreksi setengah-setengah, akan kembali terjerumus dalam pengulangan dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, seperti yang telah dilakukan Presiden Soeharto dalam memimpin Orba (Orde Baru) selama ini. Dalam pengembangan hidup berbangsa selama ini, kita beranjak pada prinsip uniformisme. Pendek kata uniform, sama dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, melanggar prinsip yang paling mendasar dari kebangsaan kita, ialah pluralisme. Di samping uniformisme, kita mengadakan diskriminasi antara mayoritas dan minoritas berdasarkan agama, golongan, etnis/keturunan, berdasarkan status, dan keberhasilan ekonomi. Semangat kebangsaan yang dikembangkan adalah semangat membanggakan keberhasilan seorang Pemimpin Nasional, dan bukan semangat Kerakyatan yang oleh Bung Hatta dinamakan sebagai roh dan otak dari Kebangsaan, terjalin erat dengan Kerakyatan yang masyarakat rakyatnya sangat pluralis itu adalah hak rakyat/daerah atas Otonomi. Dengan kerdilnya pengembangan kerakyatan/demokrasi dan pengembangan dari otonomi sebagai hak rakyat/daerah, maka kerdil pulalah pengembangan hidup kebangsaan kita, yang lalu terperosok ke dalam praktek-praktek diskriminatif dan kultus individu, seperti telah diuraikan tadi. Dalam hidup bernegara, kita telah mengembangkan suatu Negara Kekuasaan dengan segala atributnya seperti yang di"nubuat"kan oleh Bung Hatta pada waktu meletakkan dasar-dasar dari UUD 1945. Apa itu atribut utama dari Negara Kekuasaan. Memperkosakan hak individu, kebebasan-kebebasan rakyat dan

masyarakat, seperti yang dicanangkan dalam pasal-pasal dalam UUD '45. Dan sudah memperkosa lalu membenarkannya lagi dengan alasan sesuai budaya bangsa dan kepentingan nasional. Kelanjutan dari praktek Negara Kekuasaan adalah main kuasa dalam hal keadilan. Baik keadilan dalam kehidupan politik, keadilan dalam kehidupan ekonomi, maupun keadilan dalam hidup kemasyarakatan. Yang adil dan benar adalah yang dihendaki oleh yang berkuasa. Sikap mana, menjurus kepada arogansi kekuasaan (yang masih saja dimiliki oleh sementara pejabat). Seperti dalam hal pemeriksaan. Aparat yang bersangkutan tidak ketemu bukti dus pemeriksaan itu dinilai tidak benar dan tidak ada. Arogansi jabatan. Lupa bahwa aparatlah yang paling tidak dipercayai dan paling dicurigai rakyat. Sejauh mungkin tidak berhubungan dengan aparat! Ini adalah akibat dari dan reaksi masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara Kekuasaan plus arogansi. Negara Kekuasaan tidak segan mengadakan intervensi dalam hidup orang, seseorang dan masyarakat, dan tidak segan pula merekayasa kebenaran. Semua cita-cita perjuangan dan idealisme bangsa, dan institusi-institusi serta instansi negara, dijadikan alat untuk menunjang dan melanggengkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu dipusatkan pada dan diborong oleh satu orang. Salah satu ungkapan dari Negara Kekuasaan dan arogansi kekuasaan adalah tidak dipedulikannya sama sekali masalah accountability/pertanggungjawaban publik. Memang mantan Presiden Soeharto harus mempertanggungjawabkan, mengapa dia berhenti setelah baru 70 hari dipilih, dan mengapa bangsa dan negara ini ditinggalkan dalam suatu krisis yang makin mendalam. Bung Karno saja, yang sedari awal tidak setuju dengan Orba, ketika diminta pertanggungjawabannya oleh MPRS, memberikan pertanggungjawaban itu dalam pidato beliau, Nawaksara yang terkenal itu. Beliau walaupun tidak setuju, mengikuti sesuai tata krama konstitusi. Dan beliau hanya berkuasa mutlak selama lima sampai enam tahun saja. Pak Harto untuk selama 30 tahun lebih. Bahwa ada elite dan golongan politik yang menganggap (mantan) Presiden Soeharto tidak terikat pada kewajiban dari accountability, menunjukkan betapa rezim Soeharto telah mendeformasikan hati nurani politik bangsa ini. Dalam hidup bermasyarakat, maka eksek dari uniformisme, diskriminasi, intervensi kekuasaan politik, dan arogansi kekuasaan, sama-sama telah kita rasakan, yang telah membenarkan kekuasaan sebagai modus operandi dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan, yang telah mengakibatkan rasa takut, rasa tidak aman, saling curiga, saling melecehkan, dan menjarah. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil itu telah mempertajam kesenjangan sosial, dan tidak mengarah pada upaya memberdayakan masyarakat secara politik, ekonomi, maupun secara sosial. Masyarakat justru dijadikan penganut, pembeo, dan pendukung yang setia dari Penguasa, melalui berbagai indoktrinasi, tekanan, dan rekayasa politik. Pertumbuhan ekonomi yang sukses itu malahan mendorong gaya hidup masyarakat menjadi masyarakat konsumerisme yang hedonistis, dan dengan demikian menggerogoti akhlak dan moral masyarakat. Dua masalah Demikian beberapa pemikiran mengenai apa yang menjadi bahan perbincangan kita bersama dalam mengadakan koreksi-koreksi, demi kelanjutan dan kelanggengan kita hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan dimana bangsa, negara, dan masyarakat, sedang mengalami krisis ini. Ada dua masalah yang perlu juga mendapat perhatian, yaitu masalah ABRI sebagai institusi nasional dan keinginan untuk mengubah UUD 1945. Segala kekeliruan dan kesalahan, malahan kekejaman, yang telah dilakukan oknum ABRI, baik dalam kegiatan-kegiatan operasi sesuai tugas pokoknya sebagai alat keamanan dan pertahanan negara, maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial politik sebagai pelaksanaan dari dwifungsi, perlu diusut, dikoreksi, dan ditindak. Terlebih yang menyangkut HAM dan keadilan. Namun keberadaan dan wibawa ABRI harus tetap dipertahankan dan dibebaskan dari segala keragu-raguan. Untuk ini diperlukan tindakan tegas dari Pimpinan ABRI ke dalam, yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan restraint/menahan diri, dari masyarakat dalam mengadakan penilaian maupun tuntutan-tuntutan. Peran strategis ABRI dalam liku-liku sejarah perjuangan, sejarah politik, ekonomi dan sosial, dan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, jangan karena kesalahan yang telah dibuat, lalu boleh disepelkan apalagi dipermainkan. Masalah lain adalah keinginan untuk mengubah UUD 1945. Adalah kesepakatan fundamental Nasional bahwa Mukadimah UUD '45 tidak dapat diubah. Mengenai batang tubuhnya, kami kira tidak ada keberatan. Apalagi UUD '45 sangat minim namun padat dan disusun untuk mengamankan Proklamasi Kemerdekaan. Sementara bangsa, negara, dan masyarakat, sudah berkembang dan menuntut penyesuaian-penyesuaian pada paradigma-paradigma dan nilai-nilai perjuangan, serta lingkungan hidup politik, ekonomi, dan sosial, yang di tingkat nasional maupun global sudah sangat berubah. Ditambah lagi, dengan pengalaman-pengalaman yang sempat kita peroleh dalam perjalanan pelaksanaan UUD '45, baik yang positif maupun yang dirasakan masih kurang/masih memerlukan penegasan-penegasan. Setuju diadakan perubahan-perubahan/perbaikan-perbaikan dalam batang tubuh UUD '45. Namun harus diingat bahwa UUD '45 bukan saja suatu hukum dasar yang mendasari semua hukum dan undang-undang, melainkan merupakan pula suatu dokumen nasional yang di dalamnya tercantum secara padat cita-cita, dan

hati nurani politik, ekonomi, dan sosial bangsa ini, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia merupakan pula dokumen nasional pemersatu bangsa, hasil dari suatu perjuangan dan konsensus fundamental nasional. Bahwa negara kita bersama ini tidak merupakan Negara Agama, melainkan suatu Negara Kebangsaan. Bahwa bentuknya Reput-blik yang berkedaulatan rakyat, bukan suatu monarki, dan kepalanya adalah Presiden dan bukan Raja. Bahwa Negara ini adalah Negara Kesatuan dalam susunan ketatanegaraannya, namun Negara Persatuan dalam jiwa dan semangatnya. Di dalamnya terungkap cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diuraikan dalam pasal-pasal mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganegara. Di dalamnya diungkapkan hak otonomi sebagai hak asasi masyarakat daerah, dan sebagai mekanisme fundamental untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam masyarakat bangsa yang pluralis ini. Jangan dikesampingkan Jadi, janganlah dalam semangat mengatasi masalah hukum, maka cita-cita, visi, wawasan, cetak biru, dan Konsensus Nasional yang mendasar mengenai bangsa, negara, dan masyarakat, seperti yang tersurat dan tersirat dalam UUD '45 itu, menjadi dikesampingkan. Sesudah mencapai kemerdekaan dan kedaulatan RI, kita mengalami tiga kali peralihan besar dalam penanganan dari hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pertama kali dengan terjadinya peralihan dari Sistem Demokrasi Liberal ke Sistem Demokrasi Terpimpin, tanpa ada suksesi pimpinan negara. Dengan kewibawaan dan kepemimpinan Presiden Soekarno, maka Sistem Demokrasi Terpimpin diterima oleh rakyat banyak (acceptability walaupun ada yang tidak setuju). Yang kedua, dari Sistem Demokrasi Terpimpin beralih ke Sistem Orba dengan suksesi pimpinan Negara dari Bung Karno ke Pak Harto. Pak Harto dengan bantuan ABRI, para mahasiswa dan Parpol (partai politik) dalam Front Pancasila, mengintrodusir Sistem ORBA yang dalam waktu 100 hari lebih sedikit, sesudah Pak Harto mendapat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), sistem Orba itu dilegalisir dan ditetapkan dalam Sidang Umum Luar Biasa MPRS di bulan Juni 1966. Dengan demikian terdapat acceptability rakyat dan masyarakat, terhadap kepemimpinan Pak Harto dan Sistem Orba. Yang ketiga kali di bulan Mei 1998 ini, terjadi peralihan pimpinan negara dari Soeharto ke Habibie, dalam kegoncangan Sistem, kondisi dan situasi politik, ekonomi, dan sosial. Presiden Habibie telah berusaha untuk mengubah sistem Orba rezim Soeharto dengan tindakan-tindakan konkret dalam hal demokratisasi, kebebasan pers, proses perubahan-perubahan perundang-undangan politik, penyelesaian masalah-masalah HAM. Beliau pun, baik dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus lalu dan dalam keterangan-keterangan akhir-akhir ini, mengumandangkan visi mengenai suatu sistem yang tidak tergantung dan didasarkan pada perorangan. Namun visi tersebut masih memerlukan acceptability dari rakyat dan masyarakat, dan masih memerlukan suatu proses. Oleh sebab itu, maka semuanya dewasa ini dirasakan seperti masih dalam transisi dan belum ada kemantapan politik, sebab belum ada kepastian sistem. Semuanya sepertinya masih bersifat ad hoc. Rekonsiliasi Nasional atau sejenisnya, seperti yang diusulkan itu, dapat memperbincangkannya. Kalau semua yang diuraikan di sini sebagai prasyarat, sikap, dan penentuan materi bagi Rekonsiliasi Nasional atau prakarsa sejenis masih terlalu berat dan memerlukan proses dan persiapan-persiapan, maka yang dapat pula dilakukan dalam waktu singkat adalah bersama-sama menyusun SWOT - Strength/Weakness/Opportunity dan Threat - Kekuatan/Kelemahan/Peluang dan Ancaman-Ancaman/Tantangan-Tantangan, bukan sekadar dari 100 harinya Pemerintahan Habibie, tetapi SWOT dan perkembangannya dari Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia selama setahun krisis ini, agar sekurang-kurangnya kita memiliki persepsi bersama, dalam hal apa dan ke mana arah penyelesaian permasalahan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat ini. *(Frans Seda, pengamat ekonomi dan politik.

KOMPAS - Sabtu, 19 Sep 1998 Halaman: 4 Penulis: MAGNIS-SUSENO, FRANZ Ukuran: 8445

REKONSILIASI

Oleh Franz Magnis-Suseno

SALAH satu hipotek moral yang sejak semula membebani Orde Baru adalah ketidakmampuannya untuk mengadakan rekonsiliasi. Misalnya, bahwa pada permulaan Orde Baru Masyumi tidak direhabilitasikan kemudian meracuni komunikasi nasional secara mendalam. Tentu yang paling mengerikan adalah seluruh kompleks "G30S/PKI". Bukan larangan terhadap PKI dan terhadap penyebaran Marxisme-Leninisme. Ada alasan-alasan baik untuk tetap mempertahankan dua-duanya. Bukan juga bahwa mereka yang nyata-nyata terlibat dalam penculikan, penyiksaan dan pembunuhan pada tanggal 1 Oktober 1965 dan sesudahnya, diperkarakan dan dijatuhi hukuman. Melainkan ada -dengan tidak bicara tentang mereka yang terbunuh-jutaan orang yang ditahan, lebih dari 100.000 dari mereka sampai lebih dari 10 tahun, meskipun tidak melakukan tindakan kriminal apa pun, semata-mata karena tercatat sebagai anggota organisasi-organisasi yang tanggal 12 Maret 1966 dilarang atau bahkan hanya sebagai "simpatisan". Sekaligus mereka dibunuh secara politis dan sosial, dengan stigmatisasi sebagai "eks G30S/PKI" sampai ke anak dan cucu. Ribuan lagi yang -ada yang sampai hari ini- belum berani pulang dari luar negeri. Sampai saat terakhir para penguasa Orde Baru tidak mampu mengatasi kekerdilan hati mereka untuk dengan tegas mengakhiri bab gelap dalam sejarah bangsa ini. Rekonsiliasi mencakup semua Kalau kita sekarang mau berekonsiliasi, ketidakbenaran lama itu harus dibenahi dulu. Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita mau bertahan dalam pandangan Allah kalau dendam yang lebih dari 30 tahun lalu tidak berani kita akhiri. Sebuah rekonsiliasi parsial, misalnya antara yang memperjuangkan reformasi dan mereka yang "terlibat" dalam Orde Baru, akan tidak lebih dari kongkalikong untuk mendirikan sistem KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang berikutan. Rekonsiliasi adalah sesuatu yang etis yang menyangkut manusia, bukan ideologi atau pendapat politik (maka rekonsiliasi tidak mengimplikasikan keharusan untuk memulihkan sebuah ideologi). Dalam kaitan itu, manusia maupun etika tidak dapat dibagi. Rekonsiliasi aktual Tetapi apakah rekonsiliasi berarti bahwa dalam membangun Indonesia demokratis mereka yang terlibat dalam Orde Baru harus boleh ikut serta juga? Tentu setiap rekonsiliasi ada batasnya. Pelanggaran hak-hak asasi manusia secara jelas dan berat, tindak korupsi besar yang tak diragukan, serta perbuatan kriminal lainnya, tetap harus diusut. Tetapi apakah segala korupsi-korupsian, segala oportunitisme, juga segenap kekerasan berlebihan dalam operasi ABRI perlu diusut tanpa ampun? Soalnya, siapa yang lalu sama sekali bersih bajunya? Penulis ini misalnya, apakah ia tidak juga menyesuaikan diri, tidak juga mendapat untung dari sistem yang sekarang kita kutuk? Apakah tidak lebih tepat mengandaikan bahwa setiap warga negara dan anggota kelas menengah ke atas, di atas umur 40 yang tidak termasuk "oposisi" sungguh-sungguh (dan mereka dibuat membayar mahal), tidak mungkin tidak "terlibat"? Dan karena itu dilibatkan dalam rekonsiliasi? Yang menjadi masalah paling kontroversial adalah apakah orang-orang kunci di masa Orde Baru, yang barangkali sudah berkali-kali duduk dalam kabinet, yang jelas ikut melaksanakan kalau bukan merancang beberapa dari kebijakan kunci Orde Baru, masih dapat diizinkan menduduki tempat-tempat eksekutif dalam pemerintahan reformasi? Kiranya jelas: Siapa yang secara pribadi bertanggung jawab atas keputusan atau kebijakan politik atau ekonomi yang sangat tidak adil, tidak etis, terang-terangan koruptif, barangkali kriminal, tentu seharusnya langsung berhenti. Tetapi bagaimana yang lain-lain, mereka yang dengan menjalankan tugas sesuai dengan "semangat Orde Baru" kiranya juga ikut menyumbang pada situasi korup, penindasan dan nepotistik maupun pada kehancuran ekonomis bangsa? Kalau rakyat diharapkan menerima bahwa orang-orang kunci Orde Baru tetap masih juga dalam kedudukan kepemimpinan, kiranya pemenuhan syarat-syarat berikut tidak dapat ditawar-tawar: Syarat-syarat rekonsiliasi Pertama, mereka harus secepatnya mendukung reformasi, dan itu berarti demokratisasi. Tanpa pamrih. Kedua, secara terbuka dan umum mereka harus menyatakan penyesalan mereka atas peran mereka sendiri dalam praktek-praktek Orde Baru. Pengakuan bahwa mereka ikut bertanggungjawab atas situasi katastrofik bangsa Indonesia sekarang, merupakan syarat agar "pertaubatan" mereka dan dukungan terhadap reformasi dapat meyakinkan. Ketiga, pembebasan tuntas semua tahanan korban penindasan politik Orde Baru tidak boleh ditunda-tunda lagi. Artinya, semua yang tidak dihukum atau ditahan karena terlibat langsung dalam sebuah tindak kekerasan. Adalah sebuah skandal pemerintah pasca Soeharto bahwa orang-orang yang melakukan penculikan dan penyiksaan berjalan bebas terhormat, tetapi misalnya mahasiswa seperti anak-anak PRD (Partai Rakyat Demokratik) tetap tidak bebas. Padahal dosa satu-satunya mereka adalah berbicara dan membuat tulisan yang keras-keras, kebanyakan tentang hal-hal yang sekarang kita katakan semua tanpa risiko. Selama para tahanan politik Orde Baru tidak bebas semua, rekonsiliasi tidak

mungkin. Keempat. Belum pernah ABRI kita mengalami delegitimasi sedemikian dalam pandangan masyarakat. Padahal tidak seluruh ABRI terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kita memerlukan ABRI yang tetap dipercayai oleh rakyat. Akan tetapi kepercayaan itu hanya dapat tumbuh kembali apabila ABRI berani membuat terang apa yang masih gelap. Keterbukaan, meskipun barangkali terasa menyakitkan, justru tidak akan dijawab oleh hujatan, melainkan oleh kebesaran hati masyarakat. Sekurang-kurangnya pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dijawab dengan jujur" Apa yang terjadi dengan 14 aktivis yang tercatat hilang? Susah sekali kami dapat percaya bahwa pimpinan ABRI sama sekali tidak tahu sesuatu apa pun tentang segenap mereka itu. Kalau mereka telah terbunuh, katakanlah! Siapa yang membunuh empat mahasiswa Trisakti dan dengan tujuan apa? Siapa atau apa yang berada di belakang kerusuhan 13-15 Mei lalu? Itu penting demi harga diri masyarakat. Sinyalemen-sinyalemen masyarakat bahwa banyak penjarahan terjadi secara spontan kok sampai sekarang dikesampingkan saja? Kenyataan bahwa ABRI pada tanggal 14 Mei di sebagian besar Jabotabek tidak nampak belum dijelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan cita-cita ABRI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab menjadi hancur. Pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh perlu dibuka dalam dimensinya yang sebenarnya, dan tidak boleh ditutup-tutupi agar masyarakat Aceh (dan di seluruh Indonesia) percaya pada permohonan maaf ABRI dan bersedia untuk memberikan maaf. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Tanjungpriok? Menurut pemerintah 18 orang mati, kalangan lokal di Tanjungpriok bicara tentang jumlah korban yang mati sekitar 200-an. Diskrepansi sedemikian besar harus dijernihkan. Adalah hak para korban, demi keutuhan harga diri agar kekorbanan mereka tidak diremehkan. Kalau diharapkan agar masa lampau tidak diutik-utik lagi, kebenaran tentang apa yang dulu terjadi harus dibuka. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Lampung? Pemerintah waktu itu bicara tentang gerakan radikal Islam, tetapi ada suara-suara lain mengatakan latar belakang peristiwa itu adalah sengketa tanah. Katanya kekejaman penumpasan di luar propinsi dengan ada wanita dan anak-anak ikut dibunuh. Dalam peristiwa ini pun kebenaran harus dibuka. Pembunuhan di Dili Nopember 1991, sama halnya. Panglima ABRI waktu itu bicara tentang 19 orang mati, Pak Harto kemudian mengizinkan 50 orang yang mati, tetapi LSM (lembaga swadaya masyarakat) lokal dan internasional bicara tentang angka di atas 200 orang yang mati. Rekonsiliasi nasional kalau berhasil akan menjadi modal amat penting dalam bersama-sama membangun demokrasi Indonesia. Akan tetapi, rekonsiliasi sejati tidak dapat diperoleh secara murahan, melainkan hanya atas dasar kebenaran, kejujuran dan keadilan. * Prof Dr Franz Magnis-Suse-no SJ, rohaniwan, guru besar filsafat sosial pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta.

KOMPAS - Sabtu, 17 Oct 1998 Halaman: 11 Penulis: OSD/DIS/OKI Ukuran: 3474

Pemerintah dan Komnas HAM Masih Beda Pendapat

PEMERINTAH DAN KOMNAS HAM MASIH BEDA PENDAPAT Jakarta, Kompas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pemerintah sepakat untuk membentuk tim kecil yang akan membicarakan lebih lanjut usaha mencapai rekonsiliasi nasional. Perbedaan yang masih ada antara Komnas HAM dengan pemerintah adalah jawaban atas pertanyaan, mengapa rekonsiliasi nasional diadakan serta ke mana arahnya. Juga masih terjadi perbedaan pendapat mengenai istilah. Perbedaan istilah itu antara lain terlihat dari pendapat Presiden BJ Habibie yang menginginkan agar digunakan istilah forum konsolidasi nasional. Usai pertemuan antara Komnas HAM dan Pemerintah di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (16/10), Menkeh Muladi menjelaskan kepada para wartawan, perbedaan pendapat itu tidak bersifat hakiki hanya menyangkut penekanannya. Ia mengatakan pula, pembicaraan soal rekonsiliasi antara pemerintah dan Komnas HAM ini akan diselesaikan dalam waktu satu setengah bulan ini. Untuk itu disepakati pembentukan tim kecil. Sedangkan Wakil Ketua II Komnas HAM Marzuki Darusman dalam penjelasannya mengenai mengapa rekonsiliasi nasional ini diadakan mengatakan, pihaknya mengharapkan masalah-masalah masa lalu yang masih menggajal harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memasuki era baru. "Tapi sekarang ini berbagai persoalan HAM dari masa lalu belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh," ujarnya. Ia menegaskan, dengan penyelesaian masalah masa lalu akan muncul semangat baru yang meninggalkan praktek-praktek dari sistem politik lama. "Ini momentum rekonsiliasi dan sekaligus menjawab ke mana arahnya," katanya. Walau didesak wartawan untuk menunjukkan contoh konkret tentang masalah-masalah HAM dari masa lalu yang masih menggajal itu, Marzuki Darusman tidak mau menyebutkannya. "Tidak perlu saya sebutkan secara konkret, tetapi itu akan tampak di dalam proses rekonsiliasi," ujarnya yang disambut tawa oleh Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa. Menurut Muladi, perbedaan lain yang masih ada menyangkut soal makar. "Pak Lopa mempunyai pendapat yang berbeda," ujar Muladi. Sedangkan Lopa seusai jumpa pers tidak mau memberi penjelasan mengenai hal ini. Rileks sajalah Menjawab soal makar ini, Marzuki Darusman mengatakan, Komnas HAM berpendapat, bila ada pihak yang mengatakan ingin memisahkan diri tapi tidak dilakukan dengan tindak kekerasan serta tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka itu tidak bisa pihak tersebut melakukan makar. Namun, katanya, pemerintah berpendirian berdasarkan undang-undang yang berlaku, yakni kalau sudah ada semangat dan kesepakatan, maka itu merupakan permulaan dari makar. Misalnya yang terjadi di Irian Jaya ada orang mengibarkan bendera Papua Merdeka. "Itu dilakukan karena tidak ada alat lain untuk melakukan protes. Padahal itu 'kan seperti mengerek bendera kelab sepak bola. Tapi pemerintah ini selalu sering terlalu serius...rileks sajalah," kata Marzuki. Muladi menjelaskan, pemerintah berpendapat, rekonsiliasi ini adalah usaha untuk mendamaikan, mempertemukan kembali pendapat-pendapat yang berbeda. Ia juga mengatakan, pemerintah melihat masalah HAM itu dari semua aspek kehidupan nasional, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankam, dan seterusnya. "Masalah HAM itu bukan hanya soal politik, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya dan hak untuk membangun," katanya. (osd/dis/oki)j

KOMPAS - Kamis, 22 Oct 1998 Halaman: 6 Penulis: WIS/SSD Ukuran: 1843

MAHASISWA TUNTUT DIBENTUK BADAN REKONSILIASI Jakarta, Kompas Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Islam Indonesia (Formasi Indonesia), Rabu (21/10), menggelar aksi unjuk rasa di badan jalan tol setelah mereka dihalang-halangi aparat keamanan mendekati Gedung MPR/DPR Senayan. Mereka menuntut MPR merekomendasikan pembentukan Badan Rekonsiliasi Nasional untuk menyelesaikan kemelut bangsa. Iring-iringan mahasiswa dengan ikat kepala "Reformasi Indonesia" itu berdatangan menjelang tengah hari dengan berjalan kaki dari perempatan Semanggi. Mereka menolak memberikan jalan kepada pengemudi kendaraan, termasuk sepeda motor. Pasukan sepeda motor Unit Gerak Cepat dari Polda Metro Jaya juga diminta untuk tidak mendekati massa mahasiswa. Ratusan aparat Brimob yang diperlengkapi helm, perisai, dan tongkat membuat barikade di bawah Jembatan Layang Balai Sidang mencegah mahasiswa mendekati Gedung DPR. Setelah tertahan beberapa lama sekonyong-konyong rombongan mahasiswa itu meloncat pagar pembatas jalan tol. Sembari mengacung-acungkan tongkat, sejumlah aparat Brimob mengancam mahasiswa untuk tidak berjalan lebih jauh. Barikade pasukan Brimob dan Kostrad yang begitu ketat memaksa mahasiswa menggelar aksinya di badan jalan tol. Sembari duduk-duduk, mereka bernyanyi, meneriakkan yel-yel, dan menggelar orasi. Secara bergelombang ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lain datang bergabung. Aksi pendudukan jalan tol selama kurang lebih dua jam itu menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Gatot Subroto menuju Grogol. Mahasiswa secara berkelompok membubarkan diri mulai pukul 14.15 WIB. Mereka menaiki kendaraan umum yang disewa, sebagian di antaranya memilih duduk di atas atap. (wis/ssd)

Kliping ELSA

KOMPAS - Jumat, 20 Nov 1998 Halaman: 4 Penulis: Ukuran: 4945

Tajuk: Isyarat Menuju Rekonsiliasi Nasional Mulai Muncul di Kamboja

Tajuk Rencana ISYARAT MENUJU REKONSILIASI NASIONAL MULAI MUNCUL DI KAMBOJA PROSES menuju rekonsiliasi nasional kembali muncul di Kamboja. Pangeran Norodom Ranaridh hari Rabu (18/11) lalu mulai melakukan pembicaraan serius soal rincian rencana pembentukan pemerintahan koalisi dengan lawan politiknya, Hun Sen. Perkembangan baru itu melegakan karena praktis tiga bulan terakhir proses rekonsiliasi nasional mengalami kemandekan dan kebuntuan. Kebuntuan itu berawal dari hasil pemilu bulan Juli lalu, yang tidak memberi kemenangan mutlak kepada partai mana pun. Partai Rakyat Kamboja (PRK) pimpinan Hun Sen memang meraih suara terbanyak, tetapi gagal memperoleh suara mayoritas. Kenyataan ini membuat PRK harus membentuk koalisi. Akan tetapi kegagalan politik kembali terjadi, karena upaya PRK membentuk pemerintahan koalisi menghadapi hambatan. Partai FUNCINPEC pimpinan Pangeran Ranaridh, yang menduduki urutan kedua dalam perolehan suara, menyatakan menolak. PRK juga tidak bisa mengajak partai-partai gurem karena perolehan kursi mereka sangat terbatas, yang secara akumulatif pun tidak memenuhi ketentuan bagi pembentukan sebuah pemerintahan koalisi. KEKALUTAN politik, termasuk kegagalan membentuk pemerintahan koalisi selama tiga bulan terakhir, merupakan dampak dari persaingan politik yang tidak sehat di antara dua kekuatan sosial politik terbesar di negara itu: FUNCINPEC pimpinan Ranaridh dan PRK pimpinan Hun Sen. Persaingan memuncak pada pemilu Juli lalu. Melalui pemilu itu, Ranaridh dan partainya ingin kembali lagi ke tengah panggung politik setelah didepak oleh Hun Sen dalam sebuah kudeta yang menyakitkan Juli tahun lalu. Penggulingan Ranaridh justru dilakukan pada saat PM Pertama Kamboja itu sedang berada di luar negeri. Hun Sen sebagai PM Kedua mengambilalih seluruh kekuasaan atas alasan Ranaridh dan partainya sedang menghimpun kekuatan bersenjata untuk menggulingkan Hun Sen. Kiranya menarik, jika kini Ranaridh dan Hun Sen tidak ingin mempertahankan pertikaian yang cenderung berlarut-larut. Sikap mempertahankan perseteruan rupanya sudah melelahkan kedua kubu, dan semakin terlihat membawa dampak negatif terhadap bangsa Kamboja secara keseluruhan. SEJAK Hun Sen menggulingkan Ranaridh Juli 1997, kehidupan sosial politik di Kamboja memang cenderung tidak menentu. Sikap saling curiga muncul kembali. Proses rekonsiliasi nasional menjadi terhambat. Akan tetapi, arus balik mulai terjadi pekan lalu ketika Ranaridh dan Hun Sen akhirnya sepakat merundingkan pembentukan pemerintahan koalisi. Dengan demikian, perseteruan tidak kembali menjadi runyam di Kamboja. Perkembangan yang berlangsung satu pekan terakhir ini sekaligus mengakhiri situasi buntu yang sudah berlangsung tiga bulan. Setelah pemilu Juli lalu, kaum elite politik Kamboja memang gagal membentuk pemerintahan baru yang bersifat koalisi. Berbagai pihak mengharapkan, basis pemerintahan koalisi mendatang kiranya lebih solid dibandingkan pemerintahan koalisi terdahulu, yang bubar sejak Hun Sen melakukan kudeta Juli 1997. Dengan belajar pada pengalaman pahit masa lalu, Ranaridh dan Hun Sen diharapkan mampu melakukan kerja sama yang lebih baik. SIKAP saling menyalahkan dan mempertahankan pendirian masing-masing, terbukti tidak kondusif dalam membangun semangat kerja sama antara kubu FUNCINPEC dan PRK. Sudah saatnya Ranaridh dan Hun Sen mengembangkan kompromi menuju posisi win-win. Kegagalan Ranaridh dan Hun Sen menggalang kerja sama selama ini, lebih-lebih satu tahun terakhir, telah membawa kerugian terhadap bangsa Kamboja secara keseluruhan. Paket bantuan luar negeri bagi pembangunan kembali Kamboja terpaksa dihentikan karena situasi yang tidak stabil. Kiranya Ranaridh dan Hun Sen segera meninggalkan perpolitikan yang bersifat perkubuan. Dalam sejarah Kamboja, perpolitikan yang hanya mementingkan kelompok dan golongan terbukti hanya menimbulkan petaka bagi bangsa Kamboja. Pola politik Khmer Merah misalnya, yang hanya membela kepentingan kaum komunis, telah menciptakan ladang pembantian bagi kelompok antikomunis di negara itu. DENGAN belajar pada kesalahan masa lalu, kaum elite dan bangsa Khmer kiranya mengembangkan nasionalisme baru yang mengedepankan kepentingan bersama. Sikap curiga di kalangan elite dan permusuhan di kalangan masyarakat sudah saatnya dihentikan guna memberi tempat yang seluas-luasnya pada sikap saling percaya. Solidaritas, kerja sama, saling percaya dan semangat pengorbanan akan sulit terbentuk, jika pola perpolitikan masih berbasis pada kepentingan kelompok dan golongan. Tantangan bagi politisi negara itu ialah bagaimana mengembangkan perpolitikan yang bisa menjamin kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kamboja yang berciri pluralistik.

KOMPAS - Selasa, 01 Dec 1998 Halaman: 10 Penulis: PIN Ukuran: 1847

Perlu, Rekonsiliasi ABRI-Rakyat

Bandung, Kompas Usulan agar diadakan rekonsiliasi nasional sebenarnya harus diawali dengan rekonsiliasi antara ABRI dengan rakyat. Sebab, saat ini justru hal itu yang sangat diperlukan. Menurut praktisi hukum Dindin S Maolani, hal itu jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal antara ABRI dan rakyat. "Ini yang harus diluruskan terlebih dulu," tegasnya, Senin (30/11) di Bandung. Menjadi pembicara dalam diskusi "Jaminan Rancangan Undang-Undang Politik terhadap Hak Demokrasi" bersama pakar hukum Universitas Padjadjaran, Rusadi Kantaprawira, Dindin mengatakan, rekonsiliasi antara komponen bangsa yang lain dapat dilakukan setelah rekonsiliasi utama ini dilakukan. "Sangat jelas terlihat antara ABRI dan rakyat (mahasiswa) ada hal-hal yang mengganjal. Misalnya dari sikap rakyat yang lebih kontra terhadap aparat keamanan," ungkap Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Bandung ini. Menurut Dindin, wibawa aparat keamanan sedikitnya telah tercoreng dengan terjadinya beberapa insiden, seperti penganiayaan terhadap petugas dan hujatan terhadap keberadaan ABRI. "Melihat kenyataan seperti itu, jadi omong kosong kalau kita mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi antara ABRI dengan rakyat," tegas Dindin. Satu hal yang pasti, kata Dindin, aksi moral mahasiswa harus terus dilanjutkan. "Saya melihat sendiri, jika tidak ada tekanan dari mahasiswa maka hasil SI MPR yang lalu tidak akan seperti sekarang. Hasil rumusan Badan Pekerja saja yang akan ditelurkan menjadi ketetapan majelis," tegasnya. Sementara itu Rusadi Kantaprawira mengatakan, terobosan awal mengubah wajah wakil-wakil rakyat agar sesuai semangat reformasi adalah melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tahun 1999 dan sistem distrik tahun 2004. (pin)j

Kliping ELSA

KOMPAS - Selasa, 08 Dec 1998 Halaman: 4 Penulis: MAGNIS-SUSENO, FRANZ Ukuran: 8187
Rekonsiliasi di Timor Timur

Dua puluh tiga tahun yang lalu keterlibatan resmi Republik Indonesia dengan Timor Timur dimulai. Sebagai tanggapan atas permohonan tokoh-tokoh empat partai anti-Fretelin pada tanggal 30 November 1975, dua hari sesudah pemerintah Timor Timur waktu itu, yang di tangan Fretelin, memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur, agar Indonesia masuk ke Timor Timur, apa yang waktu itu disebut sukarelawan jadi masuk. Setengah tahun kemudian, di bulan Mei 1976, DPRD Timor Timur (yang sudah dibersihkan dari para wakil partai yang memenangkan Pemilihan Umum 1975, Fretelin) mengajukan permintaan agar Timor Timur dijadikan propinsi RI, yang kemudian dilaksanakan melalui UU No 7/1996 tanggal 17 Juli 1976. Dan mulailah suatu kisah sengsara dan permasalahan yang sampai sekarang tetap belum berakhir, dan baik bagi Timor Timur maupun Indonesia merupakan beban berat. Lama sekali posisi masing-masing pihak yang bersangkutan tidak berkembang. Pendobrakan baru terjadi dengan kesediaan berani Presiden Habibie untuk menawarkan otonomi luas kepada Timor Timur. Meskipun belum menghasilkan penyelesaian, inisiatif ini sangat memperbaiki suasana pencarian solusi terhadap sebuah masalah yang sudah begitu lama menghantui kita. Sikap beliau juga mencerminkan keterbukaan baru dalam masyarakat Indonesia untuk melihat kompleks "masalah Timor Timur" dengan lebih realistis dan positif. Dalam situasi semacam itu amat perlu diwujudkan sebuah konsensus baik dalam pelbagai kalangan pemerintah dan masyarakat Indonesia maupun dalam masyarakat Timor Timur tentang langkah-langkah mana yang perlu diselidiki demi untuk mengakhiri konflik di Timor Timur. Harkat kemanusiaan yang semakin dikonsensus adalah bahwa penyelesaian masalah Timor Timur mempunyai dimensi hakiki etis. Dari dua sudut. Yang pertama adalah kesediaan untuk mengakhiri semua praktek yang melecehi harkat kemanusiaan rakyat Timor Timur. Tidak disangkal lagi bahwa di Timor Timur telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa. Sesudah pelanggaran hak asasi manusia serupa di Aceh diketahui, ceritera-ceritera horor dari Timor Timur yang sebelumnya sering diragukan, mendapat kredibilitas semakin tinggi. Kesadaran semakin meluas bahwa cerita-cerita horor itu - di mana pun - harus berakhir. Kemerdekaan Kedua, kita semakin menyadari bahwa menghormati hasrat kemerdekaan masyarakat Timor Timur - entah merdeka dalam kesatuan dengan Indonesia, entah tidak - menyangkut harga diri kita bangsa Indonesia sendiri. Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan sebagai "hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" tentu bertekad menghormati hak itu bagi bangsa mana pun, termasuk kalau ada "konflik kepentingan" dengan kita sendiri, termasuk di Timor Timur. Bahaya disintegrasi? Salah satu kekhawatiran yang sering dikemukakan berbunyi: Kalau Timor Timur diberi kebebasan, apakah itu bukan permulaan disintegrasi Indonesia yang multikompleks? Kesimpulan ini harus ditolak dengan tegas. Dari Timor Timur tidak mungkin ditarik kesimpulan ke propinsi-propinsi lain. Apa pun kedudukan "integrasi Timor Timur", propinsi ini lain daripada yang lain. Timor Timur tidak termasuk Hindia Belanda yang batas-batasnya secara eksplisit dijadikan dasar penentuan batas negara Republik Indonesia dalam BPUPKI. Timor Timur tidak pernah diklaim oleh Indonesia. Timor Timur tak mempunyai andil apa pun dalam proklamasi kemerdekaan dan tak pernah terwakili dalam rangka pelbagai peristiwa sejarah pergerakan nasional Indonesia. Secara internasional pengintegrasian Timor Timur ke Indonesia tidak diakui. Sebaliknya, Irian Jaya dan Aceh secara internasional diakui termasuk Republik Indonesia. Maka tidak mungkin menarik kesimpulan sah apa yang terjadi dengan Timor Timur ke propinsi-propinsi lain di Indonesia. Masa depan Timor Timur Orang sering menunjuk pada deklarasi Balibo sebagai bukti legitimasi Timor Timur masuk Indonesia. Tetapi sebuah deklarasi yang dibuat oleh kurang dari 20 orang dalam situasi perang saudara dan ketakutan terhadap komunisme, rasanya jauh terlalu tipis sebagai dasar legitimatif penyerahan kedaulatan sebuah bangsa ke tangan bangsa lain. Tak mungkin nasib rakyat Timor Timur ditentukan oleh para wakil empat partai itu tadi begitu saja. Bahkan seandainya tokoh-tokoh di Balibo itu dianggap sebagai semacam pemerintah Timor Timur dalam pelarian, setiap keputusan sebuah pemerintah, apalagi kalau menyangkut nasib seluruh bangsa, selalu harus disahkan oleh rakyat. Begitu pula permintaan DPRD di bulan Mei 1976 tidak mempunyai cukup bobot karena terjadi di bawah kekuasaan militer Indonesia. Rasanya perlu disadari satu hal: Selama rakyat Timor Timur sendiri tidak diberi kesempatan untuk menyatakan kehendaknya, masalah Timor Timur tidak akan beres. Akhirnya rakyat Timor Timur sendiri yang harus bicara. Nampaknya baik Indonesia maupun saudara-saudara Timor Timur sendiri sebaiknya menerima bahwa pada akhirnya nasib Timor Timur harus ditentukan dalam sebuah referendum. Kenyataan itu sebaiknya kita lihat dengan jelas dan kita terima. Sekali lagi, juga demi harga diri kita sendiri. Otonomi Namun menyetujui

referendum tidak berarti bahwa referendum harus langsung dilakukan. Sebaliknya, ada alasan-alasan baik untuk memberikan dulu kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menjadi tenang dan pulih dari luka-luka batin 23 tahun terakhir. Andaikata referendum langsung sekarang diadakan, ada bahaya bahwa pemberian suara akan sangat emosional. Segala frustrasi, kekecewaan dan sakit hati yang sudah terakumulasi selama tahun-tahun itu lalu akan diungkapkan di dalamnya. Pertimbangan tenang atas pro dan kontra integrasi dengan Indonesia akan menjadi sangat sulit. Apalagi, luka perpecahan antara pelbagai fraksi di Timor Timur masih belum sembuh juga. Tidak mustahil bahwa antara yang pro dan anti-integrasi timbul konflik berdarah lagi, bahwa sesudah referendum akan ada ekses-ekses balas dendam. Maka ada alasan baik untuk menunda referendum rakyat Timor Timur selama 10 sampai 12 tahun. Gagasan itu bukan semacam peternalisme orang-orang luar, melainkan mempunyai dasar yang kuat. Nah, untuk mencapai ketenangan batin itu, otonomi seperti ditawarkan pemerintah kepada Timor Timur akan sangat kondusif. Dengan demikian rakyat Timor Timur akhirnya dapat mengurus diri sendiri. Agar proses itu tidak langsung gagal, kebebasan pendatang dari Indonesia untuk menetap di Timor Timur untuk sementara perlu dibatasi. ABRI dikurangi menjadi kehadiran minimal dan pasukan organik saja. Rakyat Timor Timur harus lebih dulu menjadi tuan dalam rumahnya sendiri. Kalau Pemerintah Indonesia menyetujui hal itu, saudara-saudara Timor Timur sendiri akan berhadapan dengan tugas raksasa. Bukan hanya karena mereka lalu akan betul-betul bertanggung jawab atas pembangunan wilayah mereka sendiri. Melainkan karena mereka akan harus menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi perpecahan-perpecahan di antara mereka serta kepahitan-kepahitan karena konflik-konflik di masa lampau. Mereka harus mampu melaksanakan sebuah rekonsiliasi antarsemua pihak Timor Timur sendiri. Dalam rekonsiliasi itu sudah jelas tokoh-tokoh seperti Uskup Carlos Filippe Ximenes Belo dan Xanana Gusmao harus memainkan peranan penting. Kalau pemerintah kita betul-betul menjamin otonomi besar Timor Timur selama 10 atau 12 tahun, dapat diharapkan bahwa rakyat Timor Timur akan menjalankan referendum secara tenang, terpikir, dengan juga mempertimbangkan segala keuntungan sebuah persatuan dengan Indonesia dan kerugian keterpisahan. Apa pun hasil referendum itu - yang tentu akan dihormati oleh Indonesia - akan terjamin bahwa hubungan dengan Indonesia akan baik, bahkan saling menguntungkan. * Prof Dr Franz Magnis-Suseno SJ, rohaniwan, guru besar pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta. y

KOMPAS - Kamis, 10 Dec 1998 Halaman: 4 Penulis: NUSANTARA, ABDUL HAKIM GARUDA
Ukuran: 6787

Rekonsiliasi dalam Perspektif HAM

Oleh Abdul Hakim G Nusantara

GAGASAN tentang perlunya dilakukan rekonsiliasi nasional telah dikemukakan oleh banyak pihak, antara lain Komnas HAM, dan para pemuka masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan krisis politik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, gagasan tersebut telah pula mengundang reaksi pro dan kontra, bahkan pesimisme serta kekhawatiran. Mereka yang mendukung gagasan ini melihat rekonsiliasi nasional sebagai cara terbaik untuk melahirkan semangat dan komitmen baru di kalangan pemimpin bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Pihak yang kontra umumnya kalangan pejabat pemerintah, walaupun merasakan pentingnya dilakukan dialog untuk mencari pemecahan terhadap krisis yang dihadapi bangsa Indonesia, namun mereka menolak digunakannya istilah rekonsiliasi nasional, karena istilah itu mengesankan seolah-olah telah terjadi perpecahan nasional. Lalu sebagai alternatifnya ditawarkan gagasan rembuk nasional. Mereka yang khawatir dan pesimis melihat kemungkinan gagasan rekonsiliasi nasional dijadikan sekadar alasan untuk memberikan pengampunan atau dimanfaatkan para pejabat Orde Baru yang telah menyalahgunakan kekuasaan sewaktu mereka berkuasa.

*** APA yang dimaksudkan dengan rekonsiliasi nasional? Mengapa perlu rekonsiliasi nasional? Siapa saja berhak ikut dalam perundingan rekonsiliasi nasional? Di mana forum rekonsiliasi nasional itu hendak diselenggarakan? Lalu bagaimana menentukan agendanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak pernah dijelaskan oleh para penggagas rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi menurut Webster's New Collegiate Dictionary adalah memulihkan persahabatan atau harmoni (to restore friendship or harmony). Dari pengertian ini jelas yang hendak dicapai oleh suatu usaha rekonsiliasi adalah terwujudnya suasana bersahabat, damai, dan saling mempercayai dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) berarti kehidupan berbangsa yang menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Ada beberapa alasan mengapa rekonsiliasi dengan tujuan seperti itu perlu dilakukan. Pertama, tak dapat disangkal pelanggaran hak-hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori berat, seperti penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan massal, penculikan atau penghilangan secara paksa, pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat militer rezim otoriter Orde Baru seperti yang terjadi di Aceh, Irian Jaya, Lampung, Tanjungpriok, Santa Cruz-Dili, dan tempat-tempat lain di Indonesia tidak saja telah menimbulkan ribuan nyawa hilang, namun juga penderitaan yang hebat. Tetapi juga disintegrasi sosial dan ketidakpercayaan masyarakat yang sangat terhadap pemerintah dan sistem hukumnya persis karena tidak pernah ada penyelesaian yang adil atas kasus-kasus tersebut. Kedua, penindasan hak-hak politik rakyat seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berkumpul yang dilakukan oleh rezim otoriter Orde Baru tidak saja melahirkan ketidakpercayaan yang besar terhadap aparat pemerintah, tetapi juga perpecahan dalam masyarakat seperti yang dapat kita saksikan dalam kasus-kasus HKBP dan PDI. Singkatnya, represi politik Orde Baru Soeharto telah menimbulkan disintegrasi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Ketiga, diskriminasi dalam penegakan hukum seperti yang kita saksikan dalam hampir semua kasus pidana politik semakin memperjelas, bahwa hukum itu digunakan untuk melindungi kekuasaan dan pihak-pihak yang mendukungnya membuat disintegrasi sosial semakin tajam. Tiga faktor kebijakan pemerintah itulah yang menonjol yang melahirkan disharmoni sosial. *** KASUS-kasus pelanggaran HAM katagori berat tersebut di atas bukanlah sekadar eksekusi yang dilakukan oleh aparat yang bekerja di lapangan. Tetapi kasus-kasus pelanggaran HAM katagori berat tersebut jelas tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik-keamanan Orde Baru yang represif. Karena itu pertanggungjawaban atas terjadinya kasus-kasus tersebut harus dapat dibebankan kepada pejabat-pejabat rezim Orde Baru yang bertanggung jawab dalam urusan politik dan keamanan, bahkan kepada yang tertinggi yaitu mantan Presiden Soeharto. Sejauh mana pejabat-pejabat tinggi rezim Orde Baru, termasuk mantan Presiden Soeharto, terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM katagori berat. Hal ini harus diteliti oleh komisi yang tidak memihak. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pejabat rezim pemerintah lama yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM katagori berat, kita bisa membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Di Nurenberg, pengadilan yang mengadili mantan pejabat Nazi yang melanggar HAM dengan menjatuhkan hukuman mati. Di Cile, rezim pemerintahan demokrasi yang menggantikan rezim diktator Pinochet memberikan blanko kosong amnesti kepada mantan pejabat yang terlibat pelanggaran HAM. Di Afrika Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional memberikan amnesti secara selektif kepada mantan aparat rezim lama yang terlibat pelanggaran HAM. Di Indonesia bagaimana? Dan apa kaitannya dengan

rekonsiliasi nasional? Rekonsiliasi nasional dalam perspektif HAM harus merupakan upaya untuk mencari penyelesaian pelanggaran HAM kategori berat dan penghapusan kebijakan (policy) yang mempengaruhinya. Karena kasus-kasus pelanggaran HAM kategori berat dan kebijakan yang mempengaruhinya itulah yang melahirkan disintegrasi sosial. Pemerintah Habibie yang masih merupakan kelanjutan dari rezim Orde Baru pasti akan menolak untuk mendukung program rekonsiliasi nasional dengan agenda seperti itu. Masalahnya, suatu rekonsiliasi nasional yang demikian itu akan berarti meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat pemerintah Habibie. Presiden Habibie akan berkata, bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM itu sebaiknya diselesaikan melalui proses hukum, yaitu laporkan ke polisi dan seterusnya. Tetapi seperti yang telah kita saksikan setelah berkuasa enam bulan, sistem hukum di bawah pemerintahan Habibie tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM kategori berat. Untuk sementara mungkin gagasan rekonsiliasi nasional dalam perspektif HAM akan dikesampingkan. Akan tetapi jika pemilu dilaksanakan secara fair dan adil, serta mampu melahirkan rezim yang demokratis, Insya Allah rekonsiliasi nasional dalam perspektif HAM dapat dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di MPR. (* Abdul Hakim G Nusantara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).) Ÿ Gus Dur-Soeharto Bahas Dialog Nasional: Presiden Habibie Menolak

Kliping ELSAM

KOMPAS - Minggu, 20 Dec 1998 Halaman: 1 Penulis: OSD/PEP/GG/MYR Ukuran: 10080

Gus Dur-Soeharto Bahas Dialog Nasional PRESIDEN HABIBIE MENOLAK Jakarta, Kompas Presiden

BJ Habibie menyambut baik pertemuan Ketua PB NU Abdurrahman Wahid dengan mantan Presiden Soeharto guna dialog nasional. Namun Habibie hanya akan bertemu mantan Presiden Soeharto sebagai pribadi. Gus Dur mengomentari pertemuannya dengan mantan Menhankam/Pangab LB Moerdani sebagai "positif". Sementara Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman menilai pertemuan-pertemuan Gus Dur itu untuk meluluhkan kekakuan politik. Sedang Ketua DPA Ahmad Tirtosudiro menyoal perlunya mantan Presiden Soeharto dilibatkan dalam "rekonsiliasi nasional". Presiden Habibie menyambut baik pertemuan Gus Dur-Soeharto, namun Kepala Negara tidak merencanakan bertemu Soeharto dalam rangka dialog nasional seperti diusulkan Gus Dur. Bila Habibie bertemu Soeharto, maka itu berlangsung bukan dalam konteks dialog nasional, tetapi dalam rangka silaturahmi personal. Pernyataan itu disampaikan Mensesneg Akbar Tandjung usai Sholat Tarawih di kediaman Presiden Habibie di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/12) malam. Menurut Tandjung, Presiden Habibie harus melaksanakan lebih dahulu amanat MPR guna melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang diduga terlibat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), termasuk mantan Presiden Soeharto. "Bahwa pada sewaktu-waktu Pak Habibie bertemu Pak Harto bisa saja, mungkin waktu Lebaran mendatang, karena Pak Harto adalah orang tua dan Pak Habibie lebih muda. Tetapi pertemuan itu sebagai silaturahmi," katanya. Soeharto-Gus Dur Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid-biasa dipanggil Gus Dur-usai bertemu Soeharto selama satu jam di Jl Cendana, Jakarta, Sabtu pagi, mengatakan, mantan Presiden Soeharto setuju, bangsa Indonesia harus menyatukan langkah berupa dialog nasional yang melibatkan sejumlah tokoh, untuk mendapatkan hasil pembangunan yang memadai. Gus Dur tiba di kediaman Soeharto yang dijaga amat ketat pukul 10.45 WIB. Sebelum menuju ruang tamu, Gus Dur yang mengenakan batik warna hijau terang dan bersandal, bersama rombongan disambut Bambang Trihatmodjo (putra ketiga Soeharto), Ketua Umum Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai. Ikut bersama Gus Dur antara lain Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekjen Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) Syaifullah Yusuf, asisten pribadi Sastro, dan Kepala RS Koja Umar Wahid, adik Gus Dur. Bambang langsung mengantar Gus Dur ke ruang tamu Cendana. Di sana Soeharto sudah menanti. Soeharto yang mengenakan batik warna cokelat terang, celana warna gelap dan berkopi hitam, menyambut Gus Dur dan bersalaman erat. Soeharto tidak mengajak Gus Dur ke ruang tamu, seperti biasanya Soeharto menerima tamu, tetapi menyilakan Gus Dur memasuki ruangan khusus. Dalam ruangan itu Gus Dur menyapa Pak Harto dengan bahasa Jawa halus, yang dibalas dengan bahasa serupa. Setelah itu, Gus Dur dan Soeharto berbicara berdua di ruang khusus yang tertutup. Gus Dur menyebut pertemuannya dengan Soeharto sebagai "pertemuan pribadi", yang digunakan Gus Dur untuk melaporkan keadaan yang selama ini terjadi di luar. Gus Dur menggambarkan, selama pembicaraan berlangsung, Soeharto menyimak penuh perhatian. Gus Dur juga mengungkapkan, yang paling banyak mengambil inisiatif bicara ialah Soeharto. "Wong beliau (Soeharto) yang sepuh," katanya. Gus Dur membenarkan, yang dimaksud "menyatukan langkah" itu adanya dialog nasional untuk merembug dan membicarakan berbagai masalah bangsa yang diharapkan ada hasilnya. Menjawab pertanyaan apa ada kekhawatiran dari Pak Harto bahwa negeri ini akan terkoyak-koyak, Gus Dur mengatakan, "Itu tadi, kita harus menyatukan langkah. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil baik dalam pembangunan." Menurut Gus Dur, Soeharto setuju diadakan dialog nasional, tinggal mengatur waktunya. "Inget lho, ini persetujuannya Pak Harto, saya belum dapat persetujuannya Pak Habibie. Sementara Pak Wiranto sudah setuju sejak lama." Apakah menyatukan langkah berarti bertemu satu meja lalu berdialog? tanya pers. "Pemahaman saya begitu," jawab Gus Dur. Gus Dur melanjutkan, dialog nasional tidak perlu melibatkan banyak tokoh, tetapi menghadirkan tokoh yang dianggap mewakili masyarakat. Gus Dur menyebut nama Presiden BJ Habibie, Soeharto, Pangab Jenderal TNI Wiranto dan dirinya sendiri. "Yang empat ini 'kan Anda lihat. Pak Habibie mewakili birokrasi sipil, Pak Wiranto mewakili birokrasi militer, Pak Harto ini banyak pengikutnya, dan anggap saja saya banyak rakyatnya di NU," papar Gus Dur. Meski demikian, Gus Dur belum menyebut kapan waktu dialog nasional dilaksanakan. Tentang agendanya, "Membicarakan nasib bangsa ini." Pers bertanya, dialog nasional yang melibatkan empat tokoh itu atas inisiatif siapa? Gus Dur mengaku, "Saya yang mengusulkan. Kepada Pak Wiranto saya yang usul, pada Pak Harto saya juga yang usul. Tinggal pada Pak Habibie belum saya usulkan." Apakah keempat orang itu bisa dikatakan mewakili kelompok lain? tanya pers. "Ya ndak, kelompok lain bisa bikin dialog sendiri," kata Gus Dur yang mengaku pertemuannya dengan Soeharto sebagai inisiatif berdua karena keduanya ingin saling bertemu.

Mengenai gencarnya tuntutan masyarakat agar Soeharto dibawa ke pengadilan atas dugaan menyalahkan wewenang selama berkuasa, Gus Dur mengaku tidak menanyakan hal itu. "Saya nggak nanya soal itu pada beliau. Cuma saya mendapatkan kesan, asalkan melalui prosedur yang benar, beliau setuju," ujarnya. Usai berdialog selama satu jam, Soeharto mengantarkan Gus Dur sampai ke ambang pintu keluar ruang tamu. Bertemu LB Moerdani Pagi harinya, Gus Dur bertemu mantan Menhankam/Pangab LB Moerdani dan Harry Tjan Silalahi, di CSIS, Jakarta, sekitar 1,5 jam. Dalam pertemuan itu Gus Dur menyatakan, pihaknya memiliki rencana untuk membentuk Komisi Pencari Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang bertugas untuk meneliti berbagai kasus besar di Indonesia antara lain kasus Aceh, Lampung, Tanjungpriok, Timtim, dan Irian Jaya. Ketika dihubungi Kompas semalam, Gus Dur mengatakan, Benny Moerdani menanggapi positif hal itu. Menurut Gus Dur, rencananya Komisi itu akan terdiri dari 25 orang dan diketuai dirinya. Sebagai executive director adalah Amran Halim, yang pernah ditunjuk PBB sebagai juru penengah di Namibia dan Mongolia. Komisi ini tanggal 17 Agustus 1999 akan menyerahkan hasil temuannya. Menurut Gus Dur, hasil kerja Komisi itu akan dievaluasi para tokoh kemanusiaan internasional, antara lain Jimmy Carter, Vavlac Havel, Nelson Mandela, Lee Kuan Yeuw. "Yang ingin bertemu dengan saya itu Pak Benny, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi dia tidak mau bertemu di Ciganjur, karena khawatir banyak wartawan sehingga malah tidak bisa bicara. Jadi akhirnya kami bertemu di CSIS," katanya. Mencegah Mengenai adanya pihak-pihak yang mengatakan, Gus Dur melakukan manuver politik dengan melakukan pertemuan di atas, Gus Dur menanggapi dengan tertawa. "Lho manuver bagaimana, secara politis saya justru rugi dong," katanya. Ditegaskan, pertemuannya dengan Soeharto antara lain karena ia ingin mencegah adanya pertumpahan darah. "Pengikut Pak Harto itu masih banyak. Mereka akan bereaksi bila Soeharto terus ditekan. Saya tidak mau kejadian seperti Ketapang terulang." Dikatakan, situasi itu yang menyebabkan dia harus berbicara dengan Soeharto. "Saya mengimbau agar para pemimpin berbicara satu sama lain." Gus Dur mengingatkan, saat ini ada kalangan yang tidak puas dengan keadaan, dan juga ada kalangan yang ingin memaksakan kehendak. "Mereka itu semua harus mengatur langkah agar jangan melakukan kekerasan," ujar Gus Dur. Mengomentari pertemuan antara Gus Dur dengan mantan Presiden Soeharto dan LB Moerdani, Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman menyatakan, pertemuan itu tidak dapat dilepaskan dari rangkaian pertemuan Gus Dur sebelumnya, yaitu dengan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dan Presiden BJ Habibie secara terpisah. Ia menilai, secara umum pertemuan itu untuk meluluhkan kekakuan dalam politik, khususnya dalam hubungan yang diwarnai adanya kesangsihan dan kecurigaan antara satu pihak dengan lainnya. Apa perlunya? Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Letjen (Purn) Ahmad Tirtosudiro, di sela-sela acara bakti sosial DPA di Marunda, Cilincing, Jakarta, Sabtu (19/12), mempertanyakan perlunya melibatkan Soeharto dalam upaya rekonsiliasi nasional. "Saya tak tahu apa perlunya? Dan apakah perlu?" katanya kepada Antara. Keinginan Gus Dur menyertakan Soeharto dalam rekonsiliasi itu didasarkan anggapannya, mantan presiden itu masih punya banyak pengikut di tubuh birokrasi. "Saya kira tidak semuanya begitu," kata Ahmad Tirtosudiro yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). "Walaupun saya lama di birokrasi, tapi saya belajar dan bekerja keras, jadi saya tak merasa hutang budi padanya (Soeharto)," katanya berapi-api. Ahmad menambahkan, banyak aparat birokrasi yang bersikap seperti dirinya. "Mungkin mereka yang didorong-dorong, didudukkan pada suatu jabatan... nah mereka itu yang merasa begitu (berutang budi)," tandasnya meyakinkan. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPA bidang Polkam Letjen (Purn) Suparman Ahmad yang menyatakan tidak perlu menyertakan mantan Presiden Soeharto dalam rekonsiliasi nasional. "Toh dia sudah lengser, sudah jadi rakyat biasa," kata Suparman Ahmad. (osd/pep/gg/myr) Ÿ Foto: Kompas/pep

MENYILAKAN GUS DUR -- Mantan Presiden Soeharto menyilakan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memasuki salah satu ruangan di kediamannya, Jalan Cendana Jakarta, Sabtu (19/12), sebelum keduanya memulai pembicaraan. Gus Dur mengatakan pertemuannya dengan Soeharto merupakan inisiatif berdua karena keduanya sama-sama ingin bertemu.

KOMPAS - Sabtu, 26 Dec 1998 Halaman: 15 Penulis: OKI Ukuran: 3819

Pernyataan Akhir Tahun Elsam: Sarankan Bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pernyataan Akhir Tahun Elsam

SARANKAN BENTUK KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Jakarta, Kompas Pemerintah perlu membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, seperti kasus Tanjungpriok, Lampung, Haurkoneng, Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur. Pembentukan komisi bukan bertujuan untuk pemberian amnesti dan memberikan kekebalan kepada para pelakunya, melainkan untuk mengungkapkan kebenaran. Demikian rekomendasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) saat menyampaikan Laporan Penilaian Keadaan HAM 1998 Elsam, di Jakarta, pekan ini. Asmara Nababan, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga salah seorang pendiri Elsam, mengungkapkan, pembentukan komisi itu penting untuk mencegah pelanggaran berat HAM terulang lagi di masa datang. Melalui komisi ini akan bisa diketahui pola kesalahan pada masa lalu pada tingkat kebijakan dan pelembagaan, mengidentifikasi siapa pelakunya, dan merekomendasikan penghukuman atas pelaku tersebut untuk diputuskan pengadilan. "Tidak benar kalau pembentukan komisi ini adalah untuk melihat masa lalu sebagai pembalasan dendam. Juga anggapan bahwa ini upaya memojokkan ABRI, adalah tidak benar," tandas Nababan, Direktur Eksekutif Elsam, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, mengenai pengampunan terhadap pelaku, komisi ini bisa saja merekomendasikannya, tetapi sebelumnya harus ada pengakuan bersalah dari pelaku dan juga permintaan maaf dari yang bersangkutan. Buruk Elsam dalam paparannya yang disampaikan Ifdhal Kasim menilai, kinerja pemerintah dalam pemajuan dan penegakan HAM masih buruk, baik dalam kerangka pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun dalam kerangka pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Kondisi yang buruk dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dasar berkorelasi dengan tingkat represi negara terhadap kebebasan politik dan hak-hak sipil warga masyarakat. Sistem kekerasan Orde Baru masih bertahan meskipun Soeharto sudah lengser. Abdul Hakim menambahkan, ukuran sementara kalangan yang menyatakan bahwa kondisi HAM di Indonesia relatif lebih baik karena adanya kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai politik, serta ada pembebasan tapol (tahanan politik) kurang tepat karena hal-hal tersebut baru pada tingkatan toleransi kebijakan politik pemerintah. "Artinya belum ada suatu pelembagaan, sehingga setiap saat bisa saja kebijakan itu dicabut. Itu terbukti dari masih dipertahankannya aturan hukum represif, yang sekarang ini memang seolah-olah diabaikan. Di sisi lain selama Habibie memegang tampuk kekuasaan juga tidak terlihat tanda-tanda yang jelas mengenai bagaimana pemerintahan ini akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, misalnya soal Tanjungpriok, Lampung, Aceh, dan sebagainya," kata Abdul Hakim. Tak melindungi Dalam hak-hak sipil dan politik, tambah Ifdhal, pemerintah gagal melindungi hak paling fundamental warganya, yaitu hak atas hidup (right to life). "Saat ini nyawa orang begitu mudah diambil dan melayang tanpa ada pertanggungjawaban hukumnya. Sistem administrasi pengadilan kita tampaknya gagal melindungi hak paling fundamental tersebut. Dengan gamblang dapat kita tunjukkan pada kasus-kasus seperti Trisakti, Kerusuhan Mei, Banyuwangi, dan Semanggi," ungkapnya. Dalam penilaian Elsam, pemerintah juga gagal melindungi rakyatnya dari hak bebas dari penghilangan paksa. Sampai saat ini pemerintah tidak dapat mempertanggungjawabkan 13 aktivis politik yang masih hilang. Sementara itu, hak keluarga korban untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang menimpa keluarganya juga tidak digubris pemerintah. (oki)

KOMPAS - Jumat, 08 Jan 1999 Halaman: 9 Penulis: BB Ukuran: 3051

PEMBEBASAN TAPOL/NAPOL ARAH MENUJU REKONSILIASI Jakarta, Kompas Pembebasan

tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) merupakan langkah politik yang hakiki dari pemerintahan BJ Habibie sebagai upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Masih adanya kekhawatiran terhadap bahaya tapol/napol korban politik Orde Baru yang dilepas, menunjukkan pejabat pemerintah masih terjebak dalam proses pembodohan yang dilakukan pemerintahan Orba selama 32 tahun. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aksi Pembebasan Tapol/Napol Gustaf Dupe yang dihubungi di Jakarta, Senin (4/1). Seperti diberitakan, Menteri Kehakiman (Menkeh) Muladi dalam jumpa pers Kamis (31/12) mengemukakan, pemerintah memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada sejumlah napol dan tapol yang menjalani hukuman berkaitan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK) di Lampung, Aceh, dan Timor Timur. Pemberian itu didasarkan pada evaluasi Tim Kelompok Kerja Interdepartemental (Pokja Interdep) yang terdiri dari Departemen Kehakiman (Depkeh), Departemen Luar Negeri (Deplu), Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam), Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), dan Badan Intelijen ABRI (BIA). Dikatakan Dupe, pemerintahan BJ Habibie seharusnya membebaskan semua tapol/napol yang menjadi korban politik pemerintahan Orba, kalau pemerintahan BJ Habibie ingin melakukan reformasi dan rekonsiliasi nasional. "Ini langkah hakiki politik ke depan kalau mau rekonsiliasi. Tanpa pembebasan itu, rekonsiliasi hanya omong kosong," katanya. Ia mempertanyakan, mengapa pemerintah masih setengah hati membebaskan tapol/napol yang menjadi korban politik Orba itu, sedangkan Soeharto sebagai mantan presiden dalam masa Orba sudah turun. Ketika ditanya apakah ada kekhawatiran pemerintah terhadap bahaya tapol/napol yang dilepas, Dupe mengatakan, alasan kekhawatiran itu menunjukkan, pejabat pemerintah terjebak dalam pembodohan rezim Orba selama 32 tahun. Para pejabat pemerintah tidak mampu melihat realita perkembangan dalam era reformasi. Ditambahkannya, pemerintah sebenarnya tidak perlu mengulur-ulur waktu dalam membebaskan semua tapol/ napol, apalagi mereka yang sudah tua. Penguluran waktu itu menunjukkan pembebasan tapol/napol tidak dilaksanakan secara substansial dan pemerintah cenderung menggunakannya sebagai legitimasi yaitu, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Ia juga menyarankan, aparat militer tidak perlu ikut menentukan proses pembebasan tapol/napol dengan memberi rekomendasi yang bersifat menghambat pelepasan tapol/napol. Keterlibatan aparat militer dalam proses pembebasan tapol/napol, menurut Dupe, membuktikan pendekatan keamanan dan stabilitas yang menjadi ciri khas pemerintahan Orba masih dominan. "Kalau minta pertimbangan, pertimbangan mengenai tindakan mereka, bukan memberi rekomendasi. Ini menghambat pelepasan tapol," katanya seraya menambahkan, masalah pembebasan itu sebenarnya cukup ditangani Depkeh. (bb)

KOMPAS - Senin, 28 Jun 1999 Halaman: 31 Penulis: SHA Ukuran: 2019

Upaya Rekonsiliasi Aljazair

Algiers, Minggu Pemerintah Aljazair, hari Minggu (27/6) menyetujui sebuah draf undang-undang tentang amnesti terhadap pejuang-pejuang muslim, yang dinilai berbagai kalangan sebagai upaya pertama untuk mengakhiri kekerasan, yang melanda negeri ini selama tujuh tahun terakhir. Draft yang disebut-sebut sebagai Undang-Undang Harmoni Nasional itu akan dikirim ke parlemen untuk dilakukan voting pekan depan, setelah mendapat persetujuan formal Selasa depan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh presiden baru mereka, Abdelaziz Bouteflika. "Kabinet menyetujui rancangan undang-undang ini, dalam pertemuan mingguan hari ini," ungkap PM Ismail Hamdani, yang disiarkan secara nasional melalui radio, Minggu. Menurut siaran itu, Bouteflika mengungkapkan, bahkan sejak tahun 1992 pertikaian antara pemerintah dan kaum garis keras muslim di Aljazair telah memakan korban 100.000 jiwa. Pertikaian itu, diakui Bouteflika, sebagai akibat balas dendam setelah penguasa yang dikendalikan militer membatalkan pemilihan umum ketika kelompok garis keras Islam tengah menuju kemenangan. Akhiri gerilya Menurut politisi setempat, rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi pengampunan pada para anggota dan simpatisan gerakan Pasukan Penyelamatan Islam (AIS), yang pada awal bulan ini telah menyatakan akan menghentikan perjuangan gerilya mereka terhadap negara. Rancangan undang-undang itu juga memuat ketentuan mengenai pengurangan hukuman bagi para gerilyawan yang terlibat dalam aktivitas gerilya "ringan" seperti sabotase, penyebaran informasi atau mendukung logistik gerilya. AIS merupakan sayap politik kelompok perlawanan Front Penyelamatan Islam (FIS). Pihaknya juga menyerukan akan membantu pemerintah untuk melawan mereka yang secara radikal menentang hasil kesepakatan damai, dan mereka yang telah berketetapan menempuh jalan kekerasan dalam upaya memerangi pemerintah. (Reuters/sha)

Kliping ELSA

KOMPAS - Senin, 29 Mar 1999 Halaman: 9 Penulis: PANGARIBUAN, LUHUT MP Ukuran: 4944
Sekali Lagi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi *Catatan Hukum
Luhut MP Pangaribuan

POLEMIK atas proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung atas dugaan KKN selama kekuasaan mantan Presiden Soeharto masih berlangsung, kendati suaranya mulai sayup-sayup. Penyelidikan masih berjalan atas dua hal, yakni tentang yayasan-yayasan yang pernah dibentuk dan dipimpin Soeharto dan tentang kebijaksanaan (Keppres) tentang Mobnas. Sekalipun kasus ini sudah hampir setahun diselidiki, namun belum tampak perkembangan berarti. Proses atas kasus ini masih pada tahap mengidentifikasi apakah kedua hal di atas berdimensi kriminal atau tidak, sehingga bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau sudah berkembang dan berada pada tahap penyidikan berarti tersangkanya sudah jelas. Namun secara hukum perlu ditegaskan tersangka itu belum tentu Soeharto atau hanya Soeharto. Sayup-sayupnya proses itu hemat saya bukan karena masyarakat sudah puas tentang apa yang sudah dan sedang dilakukan Kejaksaan. Akan tetapi lebih karena perhatian telah mulai tersita pada pemilu yang akan datang. Bahkan secara eksplisit Amien Rais menyatakan, sebaiknya penyelesaian masalah pertanggungjawaban hukum Soeharto diserahkan pada pemerintahan baru yang akan datang. Masuk akal usul penundaan ini mengingat waktu dan perhatian sudah mulai banyak teralokasi untuk persiapan penyelenggaraan pemilu termasuk Kejaksaan. Sekalipun ia bukan lagi Panwaslak pemilu, akan tetapi masalah besar yang beruntun dan sifatnya segera telah muncul di hadapannya. Kebijakan pemerintah melikuidasi bank-bank belum lama ini akan diikuti suatu law enforcement terhadap pengurus dan atau pemilik bank yang dilikuidasi. Jumlahnya sangat banyak. *** DENGAN pemerintahan baru yang akan datang, selain memiliki waktu dan perhatian lebih banyak, juga bentuk penyelesaian yang dilakukan sejauh ini bisa diperbaiki. Saya melihat proses hukum semata-mata seperti yang tengah dijalankan dewasa ini tidak akan memuaskan kedua-belah pihak. Proses demikian kalau terus dijalankan tidak akan mengarahkan kita pada pencapaian kebenaran dan keadilan-meminjam istilah Gus Dur. Oleh karena itu pendekatan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan politik dalam menuntaskan kasus pertanggungjawaban hukum Soeharto. Ada beberapa catatan yang bisa diketengahkan, mengapa proses hukum semata-mata tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Pertama, siapa pun termasuk Soeharto berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan dalam hak-hak seorang tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Di antaranya ialah untuk mendapatkan penyelesaian kasusnya segera dan tuntas. Sekarang bila untuk hanya dua isu saja penyelidikannya sudah memakan waktu hampir setahun, maka keseluruhan isu yang dituduhkan pada pemerintahan yang lalu dengan Soeharto sebagai Presidennya bisa jadi akan sebuah never ending process. Kedua, dihadapkan pada persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini yang telah berkembang ke segala arah, termasuk menyentuh masalah eksistensi bangsa, kiranya waktu dan perhatian perlu lebih banyak lagi harus diberikan pada masalah yang lebih serius ini. Akan tetapi bukan berarti kita akan melupakan pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan mantan Presiden Soeharto selama pemerintahannya. Terhadap masalah yang tengah kita hadapi, kita berharap pemilu mendatang bisa menyumbangkan sesuatu, mungkin tidak seluruhnya tetapi bisa hanya sebagai awal yang baik. Pada pemerintahan yang baru itulah nantinya kita berharap penyelesaian dapat terjadi di mana secara relatif waktu dan pikiran sudah lebih banyak. Bahkan mungkin netral (bebas kepentingan). Ketiga, belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami reformasi seperti kita dewasa ini, mengandalkan proses hukum saja akan "kesempitan sepatu" sehingga jalannya akan tersendat-sendat. Oleh karena itu diperkenalkanlah apa yang disebut dengan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Komisi ini setelah diberikan status dan kewenangan hukum akan menggantikan posisi proses hukum yang konvensional. Ternyata efektif tidak saja dalam menentukan kebenaran, tetapi pada saat yang sama menghindari adanya rasa dendam (rekonsiliasi). Dulu gagasan ini sudah sempat diproses pemerintah dengan nama komisi independen. Namun kemudian dilupakan dengan penjelasan yang sangat terbatas. Akan tetapi bagaimanapun, menurut hemat saya, kalau berbicara efisiensi, efektivitas dan taat pada prinsip-prinsip suatu "proses peradilan" yang baik, fair, impersonal, impartial dan objective untuk menyelesaikan kasus ini, maka hanya bisa terjadi dengan suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Pengalaman negara-negara lain telah menunjukkan itu. (penulis adalah praktisi hukum di Jakarta).

KOMPAS - Selasa, 11 May 1999 Halaman: 19 Penulis: TRA/BW Ukuran: 11203

Debat Partai Peserta Pemilu: Penyelesaian Kekerasan Rezim Orde Baru - Jalur Peradilan atau Rekonsiliasi

PENGANTAR REDAKSI Rezim Orde Baru sarat dengan kekerasan. Akibatnya, pucuk pimpinan Orde Baru, mantan Presiden Soeharto turun takhta, rakyat pun menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru. Berbagai kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru memang harus dituntaskan agar ke depan proses perjalanan menuju Indonesia baru tidak terganggu dengan kasus-kasus kekerasan Orde Baru yang dijadikan komoditas politik. Bagaimana partai politik menanggapi masalah kekerasan itu. Pengakuan Derita Korban Harus Diakui Marzuki Darusman Ketua Partai Golkar

PENYELESAIAN kekerasan yang terjadi selama masa Orde Baru hanya mungkin terjadi, apabila ada pemerintahan yang secara politik legitimate dan sah dari segi demokrasi, sehingga mempunyai otoritas politik yang memiliki kewibawaan. Dengan demikian, penegakan ketertiban tidak hanya dijamin dengan penindakan secara fisik oleh aparat, melainkan juga didukung kesediaan masyarakat untuk menegakkan ketertiban umum secara sukarela. Tidak hanya Partai Golongan Karya, tetapi semua partai politik yang akan meraih suara terbanyak pada pemilihan umum mendatang akan menghadapi masalah menyelesaikan problem kekerasan yang terjadi pada masa lalu itu. Kekerasan retorik ini tidak bisa diselesaikan satu per satu kasus karena merupakan pengingkaran dari keadilan, dan secara fisik memang tidak mungkin. Karena begitu banyak kasus, kalau harus diselesaikan satu demi satu. Menurut saya, perlu ada formula penyelesaian yang memungkinkan diterapkan pada semua persoalan kekerasan pada masa lalu itu. Dan, harus dibedakan antara kekerasan yang terjadi karena kebijakan politik dengan kekerasan yang terjadi seperti di Kalimantan (Sambas), Maluku dan daerah lainnya. Itu berbeda. Kekerasan yang dilakukan Orde Baru adalah kekerasan historis yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Ada beberapa cara penyelesaian yang bisa dijajaki. Tetapi yang paling penting, adalah perlunya ada semacam model pengungkapan dari kekerasan masa lalu, sehingga terjadi proses pemulihan keseimbangan moral, karena semua riwayat dari berbagai kasus kekerasan itu dapat terungkap secara terbuka. Karena sebagian masyarakat umumnya merasa mengejar keadilan atas kasus kekerasan itu sampai titik akhir tidak praktis. Yang penting, penderitaan mereka akibat berbagai perilaku kekerasan di masa lalu itu diakui. Artinya, persoalan kekerasan dalam masa Orde Baru diselesaikan secara politis. Namun tidak semua tindak kekerasan itu diselesaikan secara politis. Kecuali, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sedemikian rupa khas dan mendasar pelanggarannya, harus diajukan ke pengadilan. Misalnya, telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan prajurit di Aceh. Tindakan ini 'kan di luar proporsi yang memadai untuk melawan atau menghadapi konflik dengan unsur masyarakat. Itu tidak dapat ditolelir. Tindakan itu harus diselesaikan secara hukum. Tetapi kalau ada tindakan kekerasan yang tidak dapat dielakkan, karena prajurit itu sedang menjalankan perintah, maka itu tidak bisa dihukum. Walaupun ujudnya adalah tindakan kekerasan. Ini memang memerlukan suatu konsep dasar tentang mekanisme pengungkapan kasus dalam sebuah proses politik, sehingga segera bisa dipilah-pilah mana pelanggaran HAM yang fundamental dan mana yang merupakan kekerasan yang terjadi karena situasi. Sekalipun bentuknya penyelesaian politis, namun kompensasi bagi korban kekerasan di masa lalu itu bisa dipikirkan. Bagaimana caranya kompensasi itu bisa diberikan. Tetapi yang lebih utama, adalah ada pengakuan penderitaan dan pengingkaran keadilan terhadap korban itu terjadi ganda, yakni telah terjadi pelanggaran HAM terhadap korban dan diperberat karena kasus-kasusnya tidak terungkap, serta tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah maupun masyarakat, bahwa pelanggaran HAM itu sudah terjadi. Dengan pengungkapan secara jujur dan terbuka tentang berbagai kekerasan di masa lalu, itu bisa menjadi cara penyelesaian terbaik terhadap berbagai kekerasan yang terjadi pada masa Orba. (tra) Foto ed Semua Harus Diproses Prof Dr Harun Alrasid Wakil Ketua Umum Partai UMat Islam SETIAP tindakan yang menyangkut keamanan dan ketertiban, aparat keamanan harus bertindak. Di negara hukum, setiap tindakan yang melanggar perundang-undangan juga harus diproses. Kalau tidak diproses, bagaimana dengan kewibawaan hukum dan penegakan hukum. Mengenai berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru, seperti penculikan terhadap sejumlah aktivis, memang diproses sesuai hukum dan mereka yang disangka menjadi pelakunya diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil). Tetapi penyelesaian itu tidak memuaskan. Aparat memang bisa menyatakan, persoalan itu 'kan sudah diproses. Terhadap berbagai kekerasan yang terjadi, seperti di Aceh, saya rasa mereka yang melakukan penembakan dan kekerasan itu juga harus diproses. Kalau pelaku itu menyatakan membela diri atau hanya menjalankan perintah, bukan sekarang diakui dengan tidak memproses mereka, tetapi pengadilanlah yang akan menentukannya. Tetapi yang penting, berbagai pelanggaran itu harus diproses

sesuai dengan hukum yang berlaku, dan transparan. Saya tidak ingin bicara satu per satu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu (Orde Baru-Red) maupun pada masa kini. Semua saja pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi harus diproses sesuai dengan hukum. Seperti kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM di Sambas, Kalimantan Barat. Apa pemerintah melakukan tindakan dan pemrosesan sesuai hukum. Padahal, jelas apa yang terjadi itu, seperti pembunuhan, tidak boleh dilakukan. Pemerintahan ini kurang melakukan penegakan hukum. Akibatnya, kepastian hukum tidak ada. Apa yang dilakukan masih terbatas untuk kepentingan politik. Karena itu, agak susah mengharapkan adanya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran HAM maupun kekerasan yang terjadi pada masa lalu secara terbuka, jujur, dan adil. Kalau pemerintah mau, sebenarnya dapat saja melakukan proses hukum terhadap mereka yang dianggap melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Pelakunya 'kan jelas, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Tetapi persoalannya, kemandirian peradilan itu dianggap masih belum terwujud, sehingga pemerintah selalu dimenangkan. Saya menyayangkan, hakim mengapa belum mandiri, sehingga apabila berbagai kasus pelanggaran HAM dan kekerasan di masa lalu diproses sesuai hukum, saya khawatir kembali pemerintah atau aparat yang dimenangkan. Pemerintah seperti pada masa lalu itu selalu dianggap benar, dan hakim selalu memenangkannya. Kalau mau melakukan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM dan kekerasan di masa lalu, kemandirian hakim harus betul-betul ditegakkan lebih dahulu. Jika tidak, nanti terjadi lagi the government is always right. Saya mendukung, apabila mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM dan kekerasan di masa Orde Baru, seperti rakyat Aceh, Lampung, dan Kedungombo mendapatkan rehabilitasi maupun ganti rugi. Bahkan, rehabilitasi tersebut jelas harus dilakukan. Tetapi bukan pemerintah yang harus menentukan bentuk rehabilitasi maupun ganti rugi itu, melainkan majelis hakim. Artinya, pelanggaran HAM dan kekerasan itu tetap diproses secara hukum. Ganti rugi dan rehabilitasi itu adalah hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. (tra) Foto as Kekerasan adalah Kriminal, Bukan Politis Faisol Reza Ketua Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokrat KEKERASAN memang watak dari kediktatoran. Rezim Orde Baru sarat dengan kekerasan dan ini berarti sama dengan rezim diktatorial. Pola kekerasan memang sengaja dipakai Orba untuk melanggengkan kekuasaan. Kekerasan menjadi integral dalam perpolitikan Orba. Satu-satunya jalan keluar adalah meminta pertanggungjawaban hukum dan bukan politis terhadap pejabat Orba. Pertanggungjawaban hukum di sini artinya semua pola tindak kekerasan yang pernah terjadi di masa Orba harus dilihat sebagai sebuah tindakan kriminal. Bukan diselesaikan dengan penyelesaian politis. Ini bisa jadi preseden buruk di masa depan. Karena yang terjadi memang tindak kekerasan yang nyata dilihat dan dirasakan rakyat Indonesia sendiri. Bagaimana bisa terjadi suatu bangsa menindas rakyatnya sendiri. Peradilan kriminal terhadap rezim Orba harus dapat menjadi pelajaran bagi harkat dan martabat kemanusiaan, khususnya bagi rakyat Indonesia. Kalau yang diambil adalah langkah politis, sulit. Peradilan bisa dilangsungkan di dalam negeri atau di luar negeri. Soal gagasan dibentuknya forum rekonsiliasi nasional semacam "Truth Reconciliation Council" ala Afrika Selatan, hendaknya jangan dilihat sebagai penghapusan segala macam permasalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Rekonsiliasi sah-sah saja, tetapi sekali lagi, pertanggungjawaban di depan hukum harus berjalan. Rekonsiliasi lebih bermakna penyelesaian berbagai masalah negara bukan soal tanggung jawab hukum. Rekonsiliasi itu sendiri juga seharusnya diikuti orang yang berjiwa demokratis dan seluruh komponen kekuatan konservatif demokratis. Jika jalan rekonsiliasi yang diambil tetapi di dalamnya masih ada komponen nondemokratis, akan sia-sia. Permintaan maaf tidak menyelesaikan masalah. Soal maaf adalah soal pertanggungjawaban moral kepada bangsa Indonesia. Sementara tuntutan rakyat banyak tampaknya lebih kepada mengadili penanggungjawabnya. Jika mereka, para pelaku kekerasan masih berkeras tidak mau mengakui tindakannya, harus ada penekanan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab atas semua kekerasan itu harus mengakui berbagai tindakannya. Jika masih berkeras tidak mengakui perbuatannya, ajukan saksi rakyat. Dan ini banyak. Kalau upaya ini pun masih mengalami jalan buntu maka tidak ada jalan lain ke pengadilan. Mengenai masih adanya rasa pesimis pada peradilan, PRD masih harus menaruh harapan pada peradilan. Soal mandiri atau tidak, itu soal proses saja. Kami yakin bahwa ada orang atau penegak hukum semisal hakim dan jaksa yang benar-benar mengerti dan baik. Harus ada penanaman atau ditumbuhkan rasa bahwa peradilan itu seharusnya mandiri dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peradilan itu sendiri harus sadar, tugas mereka memeriksa dan memroses semua perkara yang masuk. Ini harus dilihat sebagai tanggung jawab moral di depan rakyat. Kami percaya ada proses ke arah kebenaran dan keadilan di badan peradilan itu sendiri. Jadi kami percaya peradilan dapat dan mampu menyelesaikan proses pelanggaran dan pelaku kekerasan di masa rezim Orba dulu. (bw)

KOMPAS - Rabu, 14 Jul 1999 Halaman: 6 Penulis: ODY Ukuran: 3309

Diupayakan, Penerapan Skenario Afrika Selatan

Malang, Kompas Sebuah skenario berpikir kini tengah dicoba terapkan oleh sejumlah pihak yang berbeda latar belakang, lalu melakukan dialog dengan tujuan mencoba mendekati masalah sosial dalam negeri untuk penyelesaiannya. Kelompok-kelompok dialog itu kini sedang direkayasa dibangun di berbagai daerah dengan menggunakan metode yang pernah dipakai dan berhasil di Afrika Selatan, yang disebut Mont Fleur Scenarios Thinking Exercise, yang inti besar tujuannya adalah rekonsiliasi. Demikian dijelaskan Guru Besar (emeritus) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Soetandyo ketika memimpin pembukaan "Forum Dialog Batu", di Kotatiff Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (11/7) malam. Acara ini menghadirkan sekitar 30 ilmuwan, politisi, mahasiswa, LSM perempuan, pengusaha, rektor, tokoh etnis Tionghoa, partai politik, untuk berdiskusi, lewat prakarsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hadir di antaranya, Asmara Nababan (Komnas HAM) dan MM Billah (Kontras), Daniel T Sparringa (Fisip Unair), Pinky Saptandari dan Dina Kacasungkana (LSM Perempuan), Iwan Febriyadi (aktivis mahasiswa), Syahputra Woworuntu (pengusaha eksportir), Kresnayana Yahya (ITS, Forum Masyarakat Statistik), Anton Priyatno (Rektor Universitas Surabaya, Forum Rektor), Oei Hiem Hwie (pengecer buku), Lukas Sugeng Wiyanto (Universitas Kristen Petra), Basofi Sudirman (Partai Kebangkitan Bangsa). Soetandyo menjelaskan, Mont Fleur adalah nama tempat konferensi di luar Cape Town, Afrika Selatan, tempat di mana tiga kali lokakarya, masing-masing sepanjang tiga hari diselenggarakan. Ketika awal 1990-an, Afrika Selatan sedang tercabik-cabik oleh tuntutan pembebasan dari kungkungan rezim apartheid. Pertemuan di Afsel itu membahas masa depan Afsel lewat sebuah metodologi skenario, suatu cara memahami dan memprakirakan kenyataan masa depan. Pengalaman Mont Fleur ini, lanjut Soetandyo, yang menggugah keinginan sejumlah pihak, seperti Prof Dr Emil Salim, Dr H Dillon, dan Marzuki Darusman untuk menyelenggarakan cara kerja yang sama untuk Indonesia. Forum semacam coba dibangun di banyak tempat lain di Indonesia untuk menampung problem domestik, kata Sparringa. "Cara scenario thinking ini banyak digunakan oleh organi-sasi privat maupun publik untuk bereposisi secara strategis di tengah ketidakpastian masa depan. Berbeda dengan strategic planning yang berangkat dari the existing, cara scenario thinking ini berawal dari the future yang diimajinasikan dalam berbagai varian. Diskusi dibawa pada usaha untuk memihaki atau menolak varian itu. Gambaran masa depan Indonesia macam apa, yang dimiliki kelompok-kelompok sosial itu," kata Soetandyo. Menurut Soetandyo, yang dipentingkan adalah tercapainya saling pengertian dan saling terpahaminya posisi dan pemahaman masing-masing dalam memandang permasalahan nasional yang tengah dihadapi. Jika para peserta diskusi tidak sepakat dalam pemecahannya, setidaknya mereka sepakat mengenai masalah nasional apa yang tengah dihadapi bangsa, dan masing-masing tahu apa yang disarankan dan apa yang dikukuh sebagai pendapat oleh pihak lain," tutur Soetandyo. (ody)

KOMPAS - Jumat, 23 Jul 1999 Halaman: 1 Penulis: BSP Ukuran: 6134

Soal Aceh KOMNAS DESAK PEMERINTAH BENTUK KOMISI KEBENARAN Jakarta, Kompas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh serta mengadili siapa pun yang terbukti melanggar HAM rakyat Aceh sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) sampai saat ini. Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti rekomendasi ini, Komnas HAM akan mengambil langkah konkret yang dapat diterima mayoritas masyarakat Aceh demi masa depannya sendiri dan demi penegakan keadilan dan hukum, serta penghormatan terhadap HAM. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral saat membacakan pernyataan resmi Komnas HAM tentang Pelanggaran HAM dan Gangguan Keamanan di Daerah Istimewa Aceh, Kamis (22/7), di Jakarta. Turut mendampingi Sekjen Komnas HAM, Wakil Ketua II Komnas HAM Bambang W Soeharto, dan anggota Komnas, Samsudin. Dalam pernyataan tertulisnya itu, Komnas juga meminta pemerintah segera menarik unsur TNI yang ada di Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) dan mengedepankan Kepolisian RI. Tentang gangguan keamanan, Komnas HAM menyarankan kepada pemerintah agar membuka dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seperti yang pernah dilakukan dalam kasus DI/TII Daud Beureuh. "Dalam PPRM itu ada unsur TNI-nya, darat, laut, udara, kemudian ada unsur Polrinya. Ini memang semuanya di bawah komando Polri. Unsur TNI yang ada di PPRM itu sementara ditarik saja, katakanlah sebagai cadangan dulu, jangan tampil di lapangan. Sedangkan yang dikedepankan Polri saja," kata Samsudin. Bertanggung jawab Komnas HAM juga merekomendasikan agar pemerintah bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak yatim piatu, janda, cacat fisik dan korban-korban lainnya yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. "Pemerintah harus segera menciptakan kondisi yang kondusif dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Aceh, agar yang mengungsi dapat segera kembali ke rumahnya tanpa ada paksaan. Selama masih ada pengungsi, pemerintah harus memberikan bantuan makanan dan obat-obatan secukupnya kepada mereka, dan memberikan keleluasaan kepada LSM-LSM, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka partisipasi mereka untuk membantu pengungsi," ungkap Amaral. Mengenai Komisi Independen yang akan dibentuk, Samsudin menjelaskan, Komnas HAM berpendapat bahwa Komisi itu tidak boleh diberi batasan waktu, misalnya menyelidik pelanggaran HAM di masa orde reformasi ini saja. "Kita minta selesaikanlah pelanggaran HAM di Aceh ini baik yang sebelum reformasi maupun di masa reformasi. Untuk yang di masa reformasi ini, karena masih baru dan masih jelas orangnya, segera saja tuntutan dan bawa ke pengadilan para pelakunya. Sedangkan yang lama kami sarankan ditangani Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk mengungkap kebenarannya maka harus dibawa ke pengadilan dulu, baru kemudian dimintakan amnesti kepada presiden," paparnya. Komisi independen Amaral menambahkan, pada tanggal 3 Juni 1999 Komnas HAM telah bertemu dengan Presiden BJ Habibie, dan Komnas menyampaikan usulan agar segera dibentuk Komisi Independen untuk menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh, sejak Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer. Dalam jawaban pemerintah, dikatakan bahwa pemerintah akan membentuk satu Tim Independen untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi pada masa orde reformasi sekarang ini saja. Akan tetapi setelah beberapa minggu menunggu komisi tersebut belum juga dibentuk, sementara pelanggaran HAM semakin merajalela, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. "Apabila dalam waktu dekat ini belum juga komisi ini dibentuk, atau belum ada bukti konkret, kami akan berjalan terus. Selasa depan kita mengadakan rapat pleno, kalau dari pemerintah tidak terlihat tanda, maka kami akan melanjutkan kerja kami yang sudah kami rintis dari satu tahun lalu. Bahan yang ada akan kami umumkan secara transparan kepada masyarakat, dan yang utama kami akan meminta pengadilan dulu," tambah Bambang. Selain mengumumkan hasil temuan Komnas secara terbuka, Wakil Ketua Komnas itu menambahkan, Komnas juga akan memainkan peranan sebagai mediator, seperti yang dilakukan Komnas di Timor Timur. Komnas akan berkomunikasi dengan kelompok GAM. "Penarikan TNI dari PPRM itu bukan kemauan Komnas semata, itu kemauan masyarakat yang kami suarkan. Kalau unsur TNI ditarik kemudian Aceh menjadi lebih aman, kita akan bisa bergerak ke langkah lain yang lebih maju," ungkap Bambang. Ditembaki Sementara dari Aceh dilaporkan, Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) Peudada Kabupaten Aceh Utara, Rabu (21/7) pukul 21.15 WIB ditembaki dengan senjata pelontar granat (GLM) dari arah belakang, yang memang tidak dilindungi karung pasir, namun tidak mengenai sasarannya. Warga Peudada sangat terkejut dan ketakutan, sehingga langsung menutup pintu rumahnya, mendengar dentuman keras, disusul rentetan tembakan selama puluhan menit. Komandan Korem 011/Lila Wangsa Kolonel (Inf) Syafnil Armen melalui Kepala

Penerangan Korem (Kapenrem) Lettu Eddy Heriyanto mengatakan, serangan tidak mengenai sasaran dan tidak ada korban manusia, baik penduduk sipil maupun aparat keamanan. Eddy mengatakan, ada tiga kali dentuman keras yang diduga peluru jenis GLM. Tembakan segera dibalas aparat keamanan dengan rentetan tembakan gencar, sekaligus memburu pelakunya yang menghilang dalam kegelapan malam. Menurut Kapenrem ini, serangan terhadap Markas Koramil sudah biasa terjadi di Aceh. Sekitar 600-an pasukan Marinir TNI AL pengganti pasukan Marinir yang lama, tiba di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh dengan KRI Teluk Bone. Pasukan ini disebar ke berbagai kawasan pantai Aceh dengan tugas, menjaga keamanan pantai Aceh serta mencegah terjadinya penyelundupan senjata. Penugasan ini bukan pertama kalinya, tetapi sudah lama ada, kata Kapenrem. (y/oki)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Sabtu, 24 Jul 1999 Halaman: 1 Penulis: OKI/FER/TRA Ukuran: 5077

Mensesneg: BELUM ADA RENCANA BENTUK KOMISI KEBENARAN

Jakarta, Kompas Menkeh/Mensesneg Muladi menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum mempunyai rencana untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh sebagaimana diusulkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pemerintah berencana membentuk Komisi Independen untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai pelanggaran HAM di wilayah Aceh. Tim Independen beranggotakan 26 orang yang berasal dari berbagai kalangan dan dapat diterima oleh masyarakat Aceh. "Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang diusulkan Komnas HAM, sampai kini belum ada rencana akan dibentuk. Saya tidak mengatakan, komisi itu sulit dibentuk. Tetapi paling tidak sampai saat ini belum ada ide untuk membentuk komisi tersebut," kata Muladi. Dalam pernyataan resminya, Komnas HAM mendesak Pemerintah untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh serta mengadili siapa pun yang terbukti melanggar HAM rakyat Aceh sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer sampai saat ini. Jika usulan itu tak diperhatikan, Komnas HAM akan mengambil langkah konkret sendiri. (Kompas, 23/7) Menurut Muladi, ide pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu memang perlu dipertimbangkan. Tetapi Komnas HAM baru merupakan satu komponen dalam masyarakat yang harus didengarkan pemerintah dalam mengatasi masalah Aceh. Pemerintah perlu mendengarkan masukan dari warga masyarakat lainnya. Muladi mengungkapkan, dalam waktu dekat anggota Tim Independen akan diumumkan. Tim itu akan melakukan investigasi terhadap berbagai pelanggaran HAM di Aceh. Siapa pun yang berbuat pelanggaran HAM di Aceh akan ditindak. Adapun anggota tim itu, selain berasal dari Komnas HAM, juga dari unsur pemerintah dan masyarakat. Ambil inisiatif Sementara Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyono mengatakan, Komnas HAM harus berani berinisiatif membentuk tim independen guna menangani masalah Aceh, tanpa harus menunggu tim atau komisi yang dibentuk pemerintah. Tim atau komisi yang dibentuk pemerintah, seperti tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam kerusuhan Mei 1998 lalu, tidak dapat memenuhi asas imparialitas dalam melakukan investigasi. "Komnas HAM harus berani membentuk-apa pun namanya - tanpa harus menunggu surat keputusan dari Presiden," katanya. Kalau belajar dari TGPF dalam kerusuhan Mei 1998 lalu, tim yang dibentuk pemerintah tidak dapat memenuhi asas imparialitas. Selain itu, tim yang dibentuk pemerintah, dapat menjadi legitimasi seolah-olah ada tim dan ada hasilnya berkaitan dengan masalah Aceh. Dikatakan Hermawan, tim yang dibentuk Komnas HAM sebaiknya terdiri atas tokoh LSM, para akademisi, maupun investigator swasta. Tugas tim ialah menginvestigasi kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Aceh. Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) Zarkasih Nur mengatakan, usulan Komnas itu merupakan hal yang rasional karena menjauhkan tindakan represif. Pemerintah memang perlu membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah Aceh. Ihtwal bagaimana dialog dapat terjadi kalau pemerintah tidak mengakui kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zarkasih mengatakan, persoalannya bukan terletak pada mengakui atau tidak mengakui. "Tetapi, bagaimana menyelesaikan secara baik masalah Aceh. Biarlah wacana dialog terbuka. Kalau sudah bicara, kita baru lihat apa yang harus dilakukan," katanya. Struktur masyarakat Aceh Sementara Koordinator Kontra Murni dalam Tabligh Akbar "Peduli Aceh" di Masjid Al Munawar Jakarta Selatan mengatakan masalah Aceh bukanlah sekadar persoalan separatisme, soal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan TNI, tetapi soal masyarakat Aceh secara keseluruhan dengan masyarakat Indonesia. Secara sistematis, ritual kekerasan yang dipraktikkan militer Indonesia telah mengendurkan ikatan, struktur masyarakat, dan resistensi masyarakat Aceh terhadap banyak hal, sehingga penyelesaian Aceh juga harus mencakup bagaimana mengembalikan struktur masyarakat Aceh kembali seperti semula. Pembicara lain pada acara tersebut, Hasballah M Saad, mengungkapkan, sampai saat ini telah lebih dari 120.000 rakyat yang mengungsi dari kediaman mereka ke masjid-masjid, pesantren, dan pinggir-pinggir jalan. Hal itu dilakukan karena buat rakyat Aceh mati di tempat dimana orang lain menyaksikan adalah lebih baik, sehingga ada yang akan mengurus mayat mereka. "Banyak pengungsi telah jatuh sakit, tanpa air bersih, alas tidur yang cukup, makan seadanya," paparnya. Menurut Putra Aceh itu, rakyat Aceh merindukan tiga hal. Rakyat Aceh ingin mengaktualisasikan keislamannya sebagai landasan hidup rakyat Aceh, ingin mengaktualisasikan keindonesiaannya yang duduk sama rata dengan suku-suku bangsa lainnya, dan ingin mengaktualisasikan keacehannya sebagai salah satu suku bangsa yang punya identitasnya sendiri. (oki/fer/tra)

KOMPAS - Selasa, 21 Sep 1999 Halaman: 15 Penulis: OKI Ukuran: 2057

Rekonsiliasi Harus Didasari Kesepakatan Bersama

Jakarta, Kompas Upaya mewujudkan rekonsiliasi dan pencarian kebenaran tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tetapi harus didasari kesepakatan bersama seluruh unsur di masyarakat untuk melakukan hal itu. Oleh karena itulah, sejak sekarang seluruh unsur masyarakat Indonesia perlu mendiskusikan hal itu secara mendalam, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak akan menimbulkan banyak masalah. Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission/TRC) Afrika Selatan, Yasmin Louise Sooka, Senin (20/9), di Jakarta. Sooka menguraikan, TRC di Afsel hanyalah sebuah instrumen dari tekad masyarakat Afsel untuk berurusan dengan masalah masa lalunya, liberalisasi, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Jauh sebelum TRC dibentuk dan ketika mantan presiden Afsel Nelson Mandela masih dipenjara, banyak kelompok masyarakat di Afsel sudah membicarakan soal rekonsiliasi itu. Ketika pembicaraan mengenai rekonsiliasi itu sudah semakin memassal, Mandela kemudian mengadopsi dan melaksanakannya. "Jadi tidak benar kalau mengungkapkan kebenaran dan rekonsiliasi sangat tergantung pada adanya figur politik yang kuat, seperti Mandela dan Uskup Desmond Tutu di Afsel. Dalam soal Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia sudah harus membicarakan hal ini, dan bentuk rekonsiliasi seperti apa yang mereka inginkan," jelasnya. Menurut pakar hukum dari Afsel itu, proses liberalisasi dan proses demokrasi akan berjalan mengikuti begitu kelompok-kelompok masyarakat setuju untuk menuju kehidupan baru, dan tekad tersebut akan menumbuhkan upaya negosiasi yang dilandasi itikad baik. Menurut Sooka, hal kunci dalam mewujudkan rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran masa lalu adalah bagaimana mencari kebenaran yang sesungguhnya itu, dan bagaimana menyikapinya. Hal ini membutuhkan perubahan pola pemikiran dan sikap seluruh anggota masyarakat. (oki)

Kliping ELCC

KOMPAS - Selasa, 12 Oct 1999 Halaman: 15 Penulis: OKI Ukuran: 4697

MPR PERLU KELUARKAN TAP REKONSILIASI

Jakarta, Kompas Sidang Umum MPR perlu membahas secara mendalam mengenai berbagai persoalan masa lalu melalui mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Hal itu mendesak karena ada tuntutan di masyarakat mengenai penyelesaian soal-soal masa lalu, serta dinamika sosial baru berupa penguatan etnis dan agama. MPR diharapkan bisa mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sehingga ada ruang khusus untuk membicarakan soal-soal masa lalu itu dan mencari penyelesaiannya secara terbuka dan demokratis. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto, Sekjen Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kamala Chandrakirana, dan Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, saat bertemu dengan Fraksi Utusan Golongan MPR, Senin (11/10), di Jakarta. Secara khusus, Elsam dan Komnas Perempuan menyerahkan draf Ketetapan MPR tentang Pengusutan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia pada Masa Pemerintahan Orde Baru. Widjojanto maupun Kamala menyatakan kecewa karena Badan Pekerja MPR tidak mengedepankan soal rekonsiliasi. Padahal, dalam dua tahun terakhir ada berbagai bentuk pelanggaran berat HAM seperti kasus Kerusuhan Mei, Timtim, Aceh, Irian Jaya, yang belum bisa diatasi. Keduanya juga sependapat, rekonsiliasi seharusnya menjadi program utama yang harus dilakukan pemerintahan mendatang. Rekonsiliasi dan pencarian kebenaran atas tragedi masa lalu ini harus menjadi program yang secara konkret dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. "Ke depan soal-soal masa lalu yang tidak terselesaikan ini akan menjadi persoalan besar, yang bisa mengancam kehidupan bangsa kita. Oleh karena itu harus ada Tap MPR untuk menegaskan usaha mendorong rekonsiliasi, sehingga rekonsiliasi juga menjadi landasan bagi program-program pemerintah," ungkap Widjojanto. Kekhawatiran sebagian anggota masyarakat yang mempersepsi rekonsiliasi sebagai praktik pemberian pengampunan, menurut pimpinan YLBHI itu, perlu dibicarakan secara terbuka tetapi dan jangan sampai menjadi alasan pembenaran tidak membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akhiri "impunity" Kamala menegaskan, persoalan pelanggaran berat HAM seperti penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur, harus dilihat sebagai satu kesatuan yang berkaitan dengan kebijakan aparat pertahanan dan keamanan. Sekjen Komnas Perempuan itu menambahkan, masyarakat mengharapkan adanya Tap MPR untuk mengadakan mekanisme pencarian kebenaran atas kasus pelanggaran HAM, dan putusan untuk memfasilitasi pengadilan terhadap pelanggaran HAM, karena keduanya penting untuk proses rekonsiliasi nasional. Dalam draf yang disusun Elsam dan Komnas Perempuan, ditegaskan bahwa MPR RI berketetapan untuk mengakhiri praktik impunity dalam kehidupan bernegara selama ini dengan mengusut kembali, serta menyelesaikan kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru, khususnya yang terjadi di daerah-daerah Aceh, Irian Jaya dan Maluku. Oleh karena itu, dalam pasal 2 disebutkan, MPR menugaskan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka mengadakan pengusutan dan penyelesaian kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Lembaga peradilan Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki dan anggota Dewan Etik ICW Bambang Widjojanto saat pertemuan ICW dan Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita) dengan Fraksi Utusan Golongan MPR, Senin menyebutkan, pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini tidak banyak membuahkan hasil karena lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia tidak independen sama sekali. Oleh karena itulah, upaya apa pun memberantas korupsi akan sulit dilakukan jikalau lembaga-lembaga penegakan hukum tidak diperbaiki terlebih dahulu. Oleh karena itulah Sidang Umum MPR 1999 perlu mengeluarkan Tap MPR tentang Pembentukan Lembaga Perbaikan Peradilan, untuk membersihkan lembaga peradilan dari oknum korup dan praktik korupsi. Selain Tap MPR mengenai Pembentukan Lembaga Perbaikan Peradilan, ICW juga mengusulkan pembentukan Tap MPR tentang Peradilan Pejabat dan Mantan Pejabat Negara untuk menggantikan Tap MPR No 11/1998, serta Tap MPR tentang Perubahan Tap MPRS No XX/ MPRS/1966 mengenai hierarki Perundang-undangan. (oki)

KOMPAS - Selasa, 19 Oct 1999 Halaman: 15 Penulis: OKI Ukuran: 4719

Rekonsiliasi tak Dapat Perhatian: Pelanggaran HAM Dibiarkan Terjadi

Jakarta, Kompas Tidak diusulkannya Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR mengenai rekonsiliasi dan berbagai persoalan lainnya, merupakan gambaran ketidaksensitifan para anggota MPR terhadap persoalan-persoalan di masyarakat. Seperti halnya Presiden Habibie, para anggota MPR pun kurang peka menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, yang selama ini menjadi tuntutan banyak korban dan keluarga korban. Dengan begitu, para anggota MPR berarti membiarkan pelanggaran HAM terus berlangsung di Aceh, Irian Jaya, Ambon, dan banyak tempat lainnya di Indonesia. Pandangan bernada kekecewaan tersebut disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga anggota Kelompok Kerja Indonesia Masa Depan Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto, Senin (18/10), di Jakarta. "Kami menyesalkan tidak adanya Rantap tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Berbagai pihak jauh-jauh hari sudah menghubungi fraksi-fraksi, gabungan LSM juga, dan minta agar masalah kebenaran dan rekonsiliasi dimasukkan dalam Tap MPR. Waktu bertemu dengan F-PDIP, saya mengemukakan agar SU MPR ini memberi secercah harapan kepada korban pelanggaran HAM selama ini, dengan kepastian bahwa kebenaran di masa lampau akan diungkapkan. Dengan tidak adanya usulan Rantap itu, bagi korban dan keluarga korban hal ini sangat mengecewakan," ungkap Nababan. Menurut Kasim, hal itu menunjukkan kegagalan para wakil rakyat dalam merespons apa yang menjadi tuntutan di dalam masyarakat, perasaan keadilan di masyarakat berkaitan dengan pelanggaran HAM di masa lampau, mulai kasus Tanjungpriok hingga kasus Aceh. Wakil rakyat tidak menunjukkan kemauan politik untuk mengusut kasus-kasus itu, dan masalah pelanggaran di masa lampau menjadi prioritas kedua. Tidak peka Nababan, Kasim, dan Widjojanto sependapat, tidak diusulkannya Rantap mengenai pencarian kebenaran atas persoalan masa lalu dan rekonsiliasi merupakan petunjuk bahwa para anggota tidak peka, dan tidak melihat gambar besar dari persoalan yang ada di masyarakat. "Kalau melihat Rantap yang diajukan maka semuanya itu merupakan Rantap baku yang belum menjawab problem di masyarakat. Majelis seharusnya betul-betul menyadari bahwa beberapa isu harus menjadi prioritasnya, misalnya bagaimana mengeliminasi fungsi sosial politik TNI, selain soal rekonsiliasi. Contoh ketidakpekaan lainnya ialah tidak adanya putusan Perpu No 1/1999 tentang Peradilan HAM," ungkap Widjojanto. Menurut Kasim, memang bisa saja pada sidang paripurna MPR tahun mendatang soal rekonsiliasi ini dibuatkan Tap MPR. Kalaulah demikian, tetap saja MPR membiarkan dalam satu tahun ini ketidakpuasan di masyarakat terus berkembang. Misalnya pada kasus Aceh, MPR tidak menjawab kebutuhan masyarakat di Aceh yang menuntut keadilan, restitusi, dan diprosesnya pelaku pelanggaran HAM. Begitu juga dengan persoalan di Irian Jaya, Ambon, dan daerah-daerah lainnya. "Peradilan HAM yang akan dibentuk tidak menjawab persoalan di masa lampau, karena Perpu tidak berlaku surut. Karena itulah diperlukan satu Rantap. Kalau ini dibiarkan dalam satu tahun ini, mereka (anggota MPR-Red) membiarkan persoalan berlarut-larut. di Aceh keadaan semakin genting karena seperti tidak ada hukum di sana, juga di Irja. Wakil-wakil rakyat membiarkan rakyat di Aceh sehingga menjadi tuntutan referendum di Aceh maupun Pepera di Irja menjadi semakin absah," kata pimpinan Elsam itu. Tidak diusulkannya Rantap soal rekonsiliasi, tambah Kasim, menunjukkan bahwa tidak ada pemikiran di kalangan wakil-wakil rakyat dalam merespons bagaimana kita menghadapi persoalan masa lalu kita. Selain tidak ada komitmen politik, para wakil rakyat juga tidak melihat urgensinya. Yang kita lihat keinginan elite politik adalah rekonsiliasi saja, tanpa adanya komisi kebenaran. Rekonsiliasi pun dipahami sebagai rekonsiliasi di antara para elite politik, bukan antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban. Itu tidak menjadi kepedulian mereka," jelas Kasim. Ditegaskan, persoalan masa lalu itu tidak bisa dibiarkan dengan hanya menjadikan korbannya sebagai tumbal dalam proses perubahan ini. Persoalan masa lampau itu harus diselesaikan, dan kita membangun sistem politik yang baru dengan awal yang baru, bukan diawali permusuhan yang permanen pada satu kelompok seperti pada masa Orde Baru. (oki)

KOMPAS - Kamis, 21 Oct 1999 Halaman: 19 Penulis: BDM Ukuran: 6001

Rekonsiliasi Nasional Harus Dilaksanakan *Fokus

Abdurrahman Wahid sebagai presiden menggantikan BJ Habibie dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Gus Dur- panggilan akrab Presiden KH Abdurrahman Wahid-diharapkan mampu memulihkan kembali kepercayaan antarkelompok atau kekuatan politik yang ada di Indonesia. Ia juga dituntut untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional. "Rekonsiliasi nasional hanya bisa dilakukan jika memang ada figur yang mampu menjembatani semua kepentingan. Dan Gus Dur mampu untuk itu," ujar sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga dalam percakapan dengan Kompas. Berikut petikannya. Setelah KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia, agenda apa yang harus dilakukan? Saya kira ini tantangan bagi kepemimpinan nasional yang mempunyai kewenangan terbatas. Masalahnya sekarang, bagaimana menggunakan kewenangan yang terbatas itu untuk sebuah efek yang mendasar dan tidak terbatas. Saya pikir sosok Gus Dur tepat untuk itu karena dia punya visi dan integritas pribadi. Gus Dur sudah lama bergelut dalam persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Langkah pertama yang harus dilakukan Gus Dur sesuai dengan karakter yang dimilikinya adalah pemulihan kembali kepercayaan antarkelompok atau kekuatan politik yang ada di Indonesia. Dan ini benar-benar urgen untuk mencegah terciptanya suasana yang tidak kondusif yang bisa mengganggu pemecahan masalah-masalah lain. Gus Dur sangat mampu untuk membuat itu karena masyarakat tahu dia negarawan dan menjadi tempat dimana orang yang berbeda pandangan datang kepadanya. Gus Dur sangat proaktif menjembatani adanya perbedaan kepentingan. Kedua, kebijakannya akan berdampak pada kepercayaan luar negeri. Dan saya pikir, di mata luar negeri, Gus Dur dianggap pribadi yang tidak anti-Barat dan mempunyai daya komunikasi yang baik dengan pihak barat. Bagaimana dengan prinsip rekonsiliasi? Saya kira di tangan Gus Dur, bisa diupayakan rekonsiliasi. Ini agenda penting yang harus dilakukan Gus Dur tanpa harus mengorbankan hukum itu sendiri. Bahwa yang salah harus tetap dihukum. Kita tahu Gus Dur adalah seorang pribadi yang concern dan punya perhatian terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan peka terhadap masalah keadilan yang memang selama ini menjadi citra perjuangannya. Rekonsiliasi nasional hanya bisa dilakukan bila ada figur yang bisa menghubungkan berbagai kepentingan kelompok. Dalam GBHN ditegaskan untuk penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi pada era Daerah Operasi Militer (DOM) hingga pasca-DOM. Bagaimana itu harus diatasi? Saya kira kalau itu mandat GBHN, pasti Gus Dur akan melaksanakan itu. Gus Dur memiliki konstituen. Konstituen itu akan mendukung sehingga Gus Dur memiliki akseptasi di luar konstituennya untuk menangani masalah pelanggaran HAM di Aceh. Untuk memecahkan masalah itu ia bebas dan tak punya konflik kepentingan. Dia sendiri tak terlibat karena dia sendiri korban masa Orba. Sebagai budayawan dan seorang humanis, Gus Dur mempunyai visi kemanusiaan yang kental dan mendasar. Dia tak ragu-ragu untuk melaksanakan GBHN karena itu sesuai dengan hati nuraninya. Dan itu baik bagi sejarah. Soal penyelesaian KKN bagaimana? Saya kira, dia akan menyelesaikan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menegakkan landasan supremasi hukum. Bahwa akan mempunyai satu kekuatan, karena dia sendiri mengerti akibat KKN bagi rakyat kecil. Dia akan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi dia bukan orang yang naif dalam berpolitik dia 'kan melihat prioritas mana yang harus dilakukan yang tidak menimbulkan efek samping yang bisa mengganggu konstelasi politik secara nasional. Bagaimana menyelesaikan soal Soeharto yang dituntut masyarakat? Sejauh itu masih dimandatkan MPR pasti akan dilakukan. Dia sangat menyadari kalau tak diselesaikan dia sendiri malah bisa terjerebab dalam masalah itu. Ini perhitungan politik yang dilakukan Gus Dur. Dia nggak takut atau ragu melakukan sesuatu bila itu dianggap benar. Dengan kondisi kesehatannya, siapa selayaknya yang harus mendampingi Gus Dur? Saya kira kita harus lihat bahwa jabatan presiden dan wakil presiden cukup simbolik. Dalam artian, tidak masuk ke hal-hal teknis. Karena kondisi kesehatan yang menurun, dia harus diimbangi seseorang yang prima. Bukan orang karbitan. Seorang wakil presiden harus mempunyai konstituen di masyarakat. Saya pikir Megawati Soekarnoputri yang dikalahkannya dalam pemungutan suara calon presiden tepat untuk posisi itu. Gus Dur dan Mega secara emosional cukup dekat. Mereka datang dari mainstream yang berbeda, Islam dan nasionalis. Keduanya juga pernah menjadi korban Orde Baru. Ini menggambarkan duet yang ideal. Bagaimana dengan soal kabinet? Saya pikir ada tiga platform yang harus dikembangkan. Pertama, para menteri itu representasi kekuatan politik tanpa harus mengabaikan profesionalisme. Jadi, The right man and the right place. Kedua, track record orang yang bersangkutan harus bagus dan tidak terkait dengan Orde Baru. Tetapi, walaupun karena keahliannya dibutuhkan bisa saja, asal track record-nya harus diperiksa sehingga betul-betul meyakinkan. Ketiga, harus

diperhatikan pluralisme Indonesia dan keberagaman di Indonesia. Terpilihnya Gus Dur apakah bukan karena adanya diskoneksi antara anggota MPR dengan rakyat di jalan-jalan? Saya kira tidak karena Gus Dur tidak ditolak. Kalau memang ditolak tetapi tetap dicalonkan berarti diskoneksi. Gus Dur juga bukan kelompok status quo. Bisa saja terjadi diskoneksi jika dalam menyusun kabinetnya dia masih dibayangkan elite politik lama. Jadi, harus hati-hati. (bdm)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Jumat, 22 Oct 1999 Halaman: 4 Penulis: Ukuran: 6710

Tajuk: Pasangan Gus Dur-Mega Merupakan Modal Rekonsiliasi Antarkita

ANTARKITA MEGAWATI Soekarnoputri peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum 7 Juni dan dengan sendirinya terpilih sebagai presiden, andaikata sudah berlaku pemilihan presiden secara langsung, akhirnya berhasil menduduki jabatan Wakil Presiden. Ia memperoleh 396 suara dalam pemilihan wakil presiden oleh MPR. Dr Hamzah Haz meraih 284 suara. Dua calon lainnya, Akbar Tandjung dan Jenderal Wiranto mengundurkan diri dengan pertimbangan demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi kepentingan dan keselamatan seluruh rakyat. Kita hormati sikap kedua calon wapres yang mengundurkan diri. Penarikan diri mereka ikut memuluskan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Dengan hasil itu, meskipun tidak optimal, ketidakadilan atau sekurang-kurangnya unfairness yang menimpa dirinya, diperbaiki. Mau tidak mau, dampaknya terutama untuk rakyat banyak melegakan. Kita hargai pandangan dan sikap para anggota MPR yang berusaha melaksanakan paham demokrasi bukan sekadar dengan hitung-hitungan dan pertimbangan kepentingan kelompok, tetapi disertai nilai dan kepatutan demokrasi. APALAGI, dampak terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden diperkirakan positif. Kabarnya, Presiden Abdurrahman Wahid ikut melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga akhirnya ia sebagai Presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Jika demikian halnya, itulah langkah arif pertama yang diambil oleh Presiden baru. Langkah itu menunjukkan ketajaman dan kepekaan pemahamannya tentang persoalan-persoalan bangsa dan negara yang sedang kita hadapi. Salah satu di antaranya maraknya konflik sosial horisontal dan vertikal berikut saling curiga, tidak saling percaya. Sendi-sendi sosial serta kemauan untuk hidup bersama secara damai, terguncang. Jalan untuk mengatasi ialah jalan rekonsiliasi. Pasangan Gus Dur-Megawati bukan saja menjadi simbol rekonsiliasi, tetapi sekaligus bisa menjadi sumber dan penggerak proses rekonsiliasi itu. Jika secara simbolis kepresidenannya ia katakan sebagai Proklamasi Kedua, simbol itu akan lebih berbicara, manakala putri Proklamator itu kebetulan dapat menjadi pasangannya. Rekonsiliasi nasional diperlukan. Pemerintahan dan kepemimpinan Gus Dur-Megawati mempunyai mandat serta dukungan kuat untuk menggerakkan. Kelompok-kelompok yang dilibatkan serta kejadian serta masalah yang direkonsiliasikan, memang harus serba mencakup dan menjangkau waktu. Tetapi mulai saja dengan yang sekarang, yang dekat kemarin, asalkan seluas mungkin dan seinklusif mungkin. Prioritas rekonsiliasi, baiklah yang secara langsung menyangkut rakyat banyak, telah menyebabkan penderitaan rakyat bertahun-tahun. Rekonsiliasi menjadi modal dan semangat untuk menggalang kebersamaan. Kondisi kritis dan krisis di mana kita berada, membutuhkan kebersamaan. Presiden mengajak semua pihak menyepakati apa sesungguhnya kondisi dan format krisis itu. Apa permasalahan dan tantangan kita. Pekerjaan rumah yang segera harus dilakukan Presiden ialah menyusun pemerintahan baru dan program. Penyusunan program maupun pemerintahan tidak bisa lain, kecuali bereferensi kepada pemahaman kita bersama tentang permasalahan dan tantangan. Identifikasi masalah dan tantangan harus segera dilakukan. Bahkan perlu disepakati prioritas yang harus dipilih, mengingat, tidaklah mungkin pemerintah bersama masyarakat melakukan semuanya sekaligus. Kita kembalikan kondisi saling percaya, sehingga hubungan batin sesama bangsa normal kembali. Kita cegah terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Pemerintahan baru dengan semua perangkat dan institusinya, terutama perangkat dan institusi ketertiban serta keamanan, agar berani memberlakukan paradigma baru. Biarlah rakyat dan masyarakat melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kepercayaan dikembalikan kepada masyarakat dan rakyat. Represi dan kekerasan dijauhkan. REFORMASI mencanangkan tegaknya asas dan wibawa hukum, bahkan supremasi hukum. Ada kesenjangan dalam memahami persoalan hukum itu. Kekuasaan, institusi dan perangkatnya cenderung memperlakukannya sebagai perangkat eksekutif. Dan, cenderung menekankan prosedur serta teknikalitasnya daripada substansinya. Komitmen untuk menegakkan asas dan supremasi hukum lewat institusi penyidikan dan pengadilan, setiap kali hambar dan menimbulkan krisis kepercayaan, karena lebih memberi kesan setengah hati bahkan diskriminatif, baik karena koneksi kekuasaan maupun karena peranan materi. PENGALAMAN selama pemerintahan Indonesia Merdeka memberikan seribu macam pelajaran. Salah satu yang mencolok dan sesungguhnya merupakan gejala universal ialah hanya pemerintahan yang bersih, yang tidak korup, sanggup menegakkan asas dan supremasi hukum secara semestinya. Hanya pemerintahan yang bersih dan tidak korup dapat melaksanakan keadilan sosial, terutama keadilan sosial dalam konteks ekonomi pasar. Kurang apa efektivitas doktrin dan struktur kekuasaan Marxisme-Leninisme dari segi keadilan sosial. Mengapa ternyata gagal? Karena pemerintahan yang dihasilkannya korup, tidak bersih, berkolusi, bersalahguna. PASANGAN Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian

pemerintahannya, agar segera menyampaikan sinyal-sinyal ke mana kebijakan serta pengelolaan ekonomi akan dibawa. Kita sangat memerlukan pulihnya kepercayaan modal serta pelaku ekonomi domestik dan luar negeri. Belajar dari sikap lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia terhadap Indonesia berkaitan dengan kasus Bank Bali, sinyal yang ditunggu dan diperlukan oleh pelaku ekonomi dan penanam modal bukan hanya kebijakan, iklim dan arah, tetapi lagi-lagi sosok pemerintahan yang bersih, yang tidak korup, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk berkolusi. UNTUK menghadapi seribu macam permasalahan yang telah berakumulasi menjadi krisis, pasangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan modal kepemimpinan serta modal kepercayaan sosial yang mudah-mudahan meyakinkan. Pulihnya kepercayaan sosial bukan saja mencegah konflik, tetapi memperkuat basis kita untuk melanjutkan pembangunan demokrasi.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Sabtu, 23 Oct 1999 Halaman: 1 Penulis: LOK/RUS/KEN Ukuran: 6049

Menuju "Indonesia Baru" POLITIK REKONSILIASI HARUS SEGERA DILAKSANAKAN

Jakarta, Kompas Tugas paling pokok pemerintahan sekarang adalah melaksanakan politik rekonsiliasi secara sungguh-sungguh dan memperbanyak komunikasi dengan kelompok-kelompok yang bertikai. Pemerintah juga harus sensitif dan responsif pada aspirasi daerah. Untuk itu perlu semacam imajinasi bersama tentang apa yang ingin dituju, sehingga tercipta Indonesia baru sebagai bagian nyata dari kehidupan rakyat. Demikian rangkuman pendapat dari peneliti CSIS Kusnanto Anggoro, Ulil Abshar-Abdalla dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI), pengamat sosial budaya Nirwan Ahmad Arsuka, dan Taslim Arifin dari Universitas Hasanuddin (Unhas) yang dihubungi Kompas, Jumat (22/10). Mereka dimintai pendapat berkaitan munculnya bibit-bibit disintegrasi bangsa di tengah gagasan untuk membentuk apa yang kini populer disebut "Indonesia Baru". "Indonesia memang harus terus dibentuk, diubah, dijadikan sesuai dengan aspirasi terdalam rakyatnya. Penolakan yang hampir menyeluruh pada segala hal yang berbau Orde Baru adalah pertanda positif. Akan tetapi itu belum cukup, perlu juga semacam imajinasi bersama tentang apa yang (mau) dituju dan bukan cuma apa yang ditolak," kata Nirwan A Arsuka, yang pernah aktif di Yayasan Wakaf Paramadina pimpinan Nurcholish Madjid. Menurut dia, sudah terlalu lama aspirasi rakyat ditenggelamkan oleh gemuruh pembangunan negara, sebagaimana dibayangkan Bung Karno dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia-Red). Kini sudah saatnya semua itu ditinggalkan. Indonesia baru haruslah lebih mendengar aspirasi rakyatnya, dan itu berarti membangun negara sebagaimana yang dibayangkan Bung Hatta, yakni sebuah negara yang lebih bekerja sebagai panitia pengurus bagi daulat rakyatnya. "Negara seperti ini mungkin akan membuat waswas mereka yang hidupnya dipersembahkan kepada ide negara kesatuan. Mungkin. Yang pasti adalah bahwa negara dalam bayangan Bung Hatta adalah negara yang paling cocok untuk menyandang sebutan republik. Dan, hanya dalam sebuah republiklah sebuah negara kesatuan bisa dipertahankan," paparnya. Kepentingan elite Bagi Kusnanto Anggoro, gejala disintegrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilainya sebagai reaksi spontan dari kejadian-kejadian di Jakarta yang bukan mustahil merupakan salah satu bentuk politisasi isu daerah untuk kepentingan elite yang ada di puncak. Oleh karenanya rekonsiliasi harus segera dilakukan. Sekarang rekonsiliasi sudah berhasil cukup baik di tingkat elite pusat dan di antara sesama kekuatan-kekuatan politik. Terpilihnya Megawati sebagai Wapres merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi. Jika tidak, ada dua konsekuensi penting. Pertama, secara politik pemilih PDI Perjuangan (PDI-P) akan merasa tidak terwakili dalam sebuah sistem politik Indonesia baru. Kedua, kalau Megawati tidak menjadi Wapres maka kombinasi antara Presiden Abdurrahman Wahid dan wakil presiden yang lainnya akan menjadi kombinasi yang tidak sehat, karena akan menjadi semacam kekuatan berdasarkan kutub Islamisme. Yang perlu dilakukan kemudian, lanjutnya, rekonsiliasi harus bisa ditafsirkan dalam program-program pemerintahan yang lebih practical. Yang akan melaksanakan policy itu tentunya kabinet, tetapi semangat yang menjiwai kebijakan-kebijakan kabinet itu tentu khususnya sejauh menyangkut integrasi nasional akan kembali lagi kepada tiga isu dasar, yakni pembagian kekuasaan pusat-daerah, pengakuan kultural kepada lokal, dan mengurangi penetrasi birokrasi sipil maupun militer-pusat di daerah. Terkait dengan tiga isu dasar yang diajukan Kusnanto Anggoro, Taslim Arifin berharap pemerintahan baru ini bisa merumuskan pembangunan dari berbagai aspek tetapi dengan menempatkan wilayah memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Pola pengembangan ke depan, katanya, harus menuju kohesi regional yang dasarnya melahirkan ketergantungan ekonomi antarwilayah. "Persatuan tidak dikemas berdasarkan emosional, tetapi berbasis kebutuhan riil wilayah. Oleh karena itu harus diciptakan bahwa jika mereka berpisah tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan dirinya sendiri," ujar Taslim Arifin. Terapi psikologis Sementara itu, Ulil Abshar-Abdalla mengemukakan, selama ini apa yang terjadi di Aceh, Ambon atau tempat-tempat lain adalah suatu kejahatan/kekerasan yang menimpa masyarakat kecil tetapi tidak bisa mereka komunikasikan. "Jadi mereka itu seperti silent victims, orang-orang yang menjadi korban tetapi diam," katanya. Dalam kaitan ini Ulil melihat, Indonesia baru tidak bisa dibangun tanpa rekonsiliasi. Itu merupakan prasyarat untuk menuju Indonesia yang demokratis, karena rekonsiliasi ini seperti terapi psikologis bagi orang-orang yang mengalami masa lalu yang pahit, menyimpan memori yang tragis. "Jadi itu harus diungkap, lalu bagaimana bangsa ini merekonsiliasikan dirinya sendiri dengan masa lalu yang pahit itu. Dimulai tahun 1965 sampai 1999," kata Ulil seraya menambahkan bahwa kebijakan politik yang sifatnya teknis tidak ada gunanya kalau rekonsiliasi yang sungguh-sungguh belum dilakukan. Tentang

adanya usulan negara federasi sebagai solusi, menurut Ulil, pembicaraan mengenai federalisme harus dimatangkan dulu sebelum mengambil suatu kebijakan. "Saya belum merasa perbincangan publik mengenai federalisme itu sudah tuntas, ditimbang-timbang manfaat dan mudaratnya, untung ruginya, sehingga kalau ini diajukan sebagai alternatif untuk mengatasi disintegrasi saya rasa belum tentu itu bisa mengatasi. Boleh jadi federalisme malah menambah luka," katanya. (lok/rus/ken)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Sabtu, 23 Oct 1999 Halaman: 28 Penulis: FR Ukuran: 2073

Dwitunggal, Perwujudan Rekonsiliasi

DWITUNGGAL, PERWUJUDAN REKONSILIASI Jakarta, Kompas Terpilihnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 1999-2004 dipastikan membawa angin segar dan terwujudnya rekonsiliasi nasional serta supremasi hukum. Citra Dwi Tunggal yang pernah terjalin harmonis di era Soekarno-Hatta tampaknya bisa dilanjutkan pada era Gus Dur-Megawati. Harapan dan kepercayaan itu muncul dari pertemuan para Tokoh Kawanua yang dipimpin sesepuh Masyarakat Kawanua HN (Ventje) Sumual, Jumat (22/10) di Jakarta, menyusul tampilnya Dwi Tunggal Gus Dur- Mega. Para Tokoh Kawanua dalam pertemuan lima jam guna mencermati perkembangan terakhir mengingatkan ikrar persatuan dan sebagai koridor atau ruang perdebatan yang harus dipertahankan. Bersama dengan Dwi Tunggal Gus Dur-Megawati, warga Kawanua bertekad hendak menuntaskan pekerjaan besar, yaitu reformasi mendasar, menyeluruh, berkesinambungan guna menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil adil makmur serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di dalam penyelenggaraan negara seperti yang diamanatkan GBHN dan Ketetapan-Ketetapan MPR, ujar Sumual, Dwi Tunggal terpanggil untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan dan komponen bangsa tanpa membedakan asal-usul, agama, kepercayaan dan keyakinan politik. Semua itu, tandasnya, untuk sebesar-besarnya diarahkan bagi kemajuan bangsa yang berkedaulatan rakyat demi persatuan dan kesatuan. HN Sumual yang dikenal sebagai deklarator dan pemimpin Permesta mengatakan, tugas besar Dwi Tunggal ialah meletakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikemukakan, karena merupakan prasyarat pokok guna mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk politik dan manajemen pemerintahan dan pembangunan. "Jika hal tersebut bisa direalisasikan, maka pada gilirannya, harkat dan martabat bangsa bisa dipulihkan bahkan semakin terangkat," ujar Sumual. (fr)

KOMPAS - Minggu, 24 Oct 1999 Halaman: 11 Penulis: YUL Ukuran: 3976

Harapan pada 100 Hari Pemerintahan Baru: Rekonsiliasi, Perbaikan Ekonomi, dan Penuntasan Kasus Bank Bali

Jakarta, Kompas Pemerintahan baru di bawah pimpinan dwitunggal KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri diharapkan segera membentuk kabinet yang terdiri dari orang-orang profesional dan tidak terlibat KKN. Selain itu, Gus Dur sebaiknya menetapkan program kerja 100 hari yang hasilnya bisa dilihat masyarakat secara nyata. Dua masalah yang harus ditindaklanjuti cepat dan bisa dirasakan langsung masyarakat itu adalah perbaikan ekonomi dan penuntasan kasus Bank Bali, di samping masalah rekonsiliasi nasional. Demikian salah satu pokok pikiran yang mengemuka dalam diskusi Kabinet Baru Harapan Rakyat yang dilaksanakan Jakarta Media Centre, Jumat (22/10). Hadir sebagai pembicara adalah Prof Emil Salim, Dr Sri Mulyani, Dr Nurcholish Madjid, KH Hasyim Wahid, Dr Hamid Awaluddin, dan Todung Mulya Lubis. Acara dipandu pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dan Adolf Posumah. Emil Salim mengatakan, agenda program kerja 100 hari yang sebaiknya dilakukan pemerintahan baru adalah penataan ulang anggaran negara, penyelesaian kasus Bank Bali, upaya rekonsiliasi dalam bentuk realisasi desentralisasi yang memenuhi harapan daerah dan meredakan isu disintegrasi, serta penggulangan kembali dana Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sementara pengamat ekonomi Sri Mulyani menegaskan perlunya dibentuk kabinet yang betul-betul bekerja dengan satu visi dan dengan semangat tim kerja yang kompak. "Jangan sampai di dalam kabinet ada yang hanya bertugas mengotori, dan yang lain diberi tugas cuci piring. Semua anggota kabinet harus bertugas cuci piring, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang betul-betul bersih. Adapun hasilnya kelak, biarlah dinikmati generasi mendatang. Kabinet-kabinet yang lalu juga menempatkan orang profesional, karena tidak kompak, jadinya tidak karuan," tutur Sri Mulyani. "Yang tidak kalah pentingnya adalah sedapat mungkin dihindari adanya organisasi lain yang berperan sebagai kabinet bayangan, dan dapat mengintervensi kerja kabinet, seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya," katanya. Putus dengan Orba Seluruh pembicara yang hadir setuju bahwa dalam memilih menteri-menteri yang akan menjalankan pemerintahan, Gus Dur dan Megawati sebaiknya menarik garis tegas terhadap orang-orang yang dinilai memiliki hubungan dengan Orde Baru atau yang terlibat KKN. Nurcholish Madjid menekankan perlunya ada garis jelas dalam menentukan orang yang akan ditunjuk. "Jika ada satu-dua orang lama yang akan tetap dipakai dengan pertimbangan tertentu, harus dipertimbangkan dan diperiksa dengan detail. Syarat tidak terlibat KKN dan punya komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, jelas menjadi syarat mutlak," tuturnya. Ada juga kekhawatiran terhadap duet Gus Dur dan Megawati yang dinilai lebih condong tampil sebagai solidarity maker sehingga harus ditunjang tim kerja yang kompak. KH Hasyim Wahid mengemukakan, salah satu kecemasan yang harus segera dicari jalan keluarnya dari duet Gus Dur-Megawati, jangan sampai terjadi bencana administrasi nasional. Hasyim memaparkan, setidaknya ada empat hambatan dalam soal pembentukan kabinet. Pertama, masalah profesionalisme; Kedua, pengangkatan menteri yang harus memenuhi kepuasan relasi antarelite politik yang mengantar kemenangan mereka; Ketiga, pengangkatan menteri yang mengatasi politik aliran; Keempat, pengangkatan menteri yang mampu menjalankan kebijakan yang berkelanjutan. "Sulit untuk mengatasi semua hambatan yang ada sehingga paling realistis menerapkan minimum zone of possibility untuk memilih para menteri," katanya. (yul)

KOMPAS - Senin, 25 Oct 1999 Halaman: 3 Penulis: DMU/HRD/GUN/TAT/TOP Ukuran: 14269

Harapan terhadap Struktur Kabinet Baru: Bersemangat Rekonsiliasi, Profesional dan Bebas KKN

HAMPIR tidak ada berita minor mengenai terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Nurani mereka berdualah, yang mampu menyingkirkan satu demi satu tokoh berpangkat, berpendidikan, atau bahkan mungkin bertangan besi. Berikut ini adalah reaksi dari sejumlah kalangan, khususnya terhadap rencana pembentukan kabinet yang merupakan batu ujian pertama bagi kepemimpinan mereka. Pengusaha, Iman Taufik Diharapkan kabinet baru tidak mengikutkan orang-orang yang sudah "cacat", tercela atau terlibat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di masa lalu, termasuk skandal Bank Bali. Masih banyak orang yang bersih. Terpilihnya pemimpin nasional yang baru melalui proses demokrasi, telah berhasil me-yakinkan pasar, tercermin dari menguatnya kurs rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Kombinasi Gus Dur (Abdur-rahman Wahid) sebagai Presiden, Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR, merupakan komposisi yang sangat baik. Namun penguatan rupiah dan IHSG yang terjadi masih tipis, karena pasar masih menunggu dan bertanya-tanya mengenai profil kabinet yang akan segera dibentuk. Jika susunan kabinetnya sesuai harapan, maka kurs rupiah dan indeks itu bisa menguat lagi. Saya berharap, susunan kabinet akan terdiri dari orang-orang berpengalaman dan jujur. Kalau nggak jujur, celaka kita, sebab orang berpengalaman yang nggak jujur lebih berbahaya ketimbang orang bodoh tetapi jujur. Dari aspek pengawasan hukum, seperti infrastruktur hukum, yang ada sekarang sudah bagus. Tinggal pelaksanaannya, sebab ekonomi tak akan bisa berkuat, jika penegakan hukumnya tidak ada. Ekonomi sebenarnya gampang dan akan mengikut saja, jika politik sudah benar, dan penegakan hukum serta keamanan terjamin. Untuk bidang ekonomi, yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembenahan pendidikan dan sumber daya manusia yang terpuruk. Sekitar 40 persen penduduk sekarang ini berada di bawah garis kemiskinan. Sekitar 70 persen penduduk, hanya lulusan SD dan hanya 1,4 persen lulusan S1 (sebagai perbandingan Malaysia tiga persen). Selain itu juga harus ada upaya mengembangkan iptek, sebab ekonomi tak akan maju tanpa iptek. Jadi fungsi BPPT harus benar. Jangan hanya mengikuti ambisi seseorang seperti di masa lalu, tetapi harus betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Untuk makro-ekonomi, saya berpendapat Bappenas jangan diisi orang yang hanya kuat dalam teori, tetapi harus juga orang pragmatis, karena teori yang indah-indah belum tentu bisa berjalan dan mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat. Di bidang keuangan, Bank Indonesia (BI) dan BPPN harus benar-benar independen dari Dep-keu. Selain itu, Gubernur BI dan Menkeu harus mengerti betul keadaan makro dan mikro ekonomi dunia, dan bisa memulihkan kepercayaan luar negeri, melalui good governance, kebijakan yang rapi, konsisten dan profesional. Setelah bidang politik benar, penegakan hukum sudah, keamanan sudah, sisanya serahkan ke swasta. Swasta memiliki banyak akal dan pasti akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Untuk bisa segera menggerakkan sektor riil, ditekankan pentingnya dituntaskan segera proses restrukturisasi perbankan, agar dana kredit bisa mulai mengalir ke dunia usaha dan suku bunga bisa turun dari sekitar 23-24 persen sekarang ini ke level yang masih memungkinkan dunia usaha bergerak, yakni tertinggi 18 persen. Mantan anggota DPR, Ichsanuddin Noorsy Mengingat pertanggungjawaban mantan Presiden Habibie ditolak dalam Sidang Umum MPR 1999, sudah selayaknya para menteri pada kabinet reformasi tidak dipilih kembali. Susunan kabinet baru jangan sampai terkontaminasi atau terindikasi praktik KKN. Para menteri harus betul-betul kredibel. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kabinet baru. Kabinet mendatang sebaiknya memiliki keahlian atau profesional di bidangnya dan representasi dari daerah dan partai politik, serta mampu melakukan kerja sama. Selama 32 tahun terakhir, kelemahan birokrasi kita terasa dalam koordinasi, termasuk selama pemerintahan Habibie. Menteri baru, juga harus memiliki kehati-hatian yang tinggi. Pembentukan kabinet baru, sebaiknya jangan didasarkan pada kepentingan politik kelompok atau partai tertentu, tetapi pada keuntungan politik dan keuntungan sosial dan ekonomi. Pemerintahan yang kredibel juga harus bisa menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Jadi, power sharing jangan diartikan sebagai "politik dagang sapi" tetapi membagi kekuasaan untuk keuntungan politik dan ekonomi. Ketua Umum Kadin Indonesia, Aburizal Bakrie Kadin berharap, Gus Dur dan Megawati dapat memimpin dan menata bangsa Indonesia untuk keluar dari berbagai kesulitan yang saat ini dihadapi. Saya optimis dengan kepemimpinan mereka, akan mampu membawa Indonesia ke suatu perbaikan yang besar di berbagai bidang. Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintahan baru tentang permasalahan yang dihadapi dunia usaha. Sekaligus menginformasikan

keunggulan yang dimiliki dunia usaha nasional agar nantinya pemerintahan baru dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi dapat atau sesuai dengan apa yang diharapkan dunia usaha. Dengan demikian antara dunia usaha dengan pemerintahan baru mempunyai visi yang sama dalam membangun dan mengembangkan usaha nasional. Pemerintahan baru diharapkan bisa menyelesaikan masalah perbankan, terutama program rekapitalisasi, karena masalah perbankan adalah masalah yang krusial bagi bangkitnya dunia usaha. Tanpa lembaga perbankan yang sehat, sulit kiranya bagi dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang. Masalah lain yang mendesak, restrukturisasi utang swasta, baik terhadap lembaga keuangan nasional dan internasional. Restrukturisasi perusahaan diharapkan dapat diselesaikan secepatnya, tentunya dengan arahan dari pemerintahan baru. Proses rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi perusahaan harus dipercepat. Pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis dan mendapat legitimasi rakyat, diyakini akan memulihkan kepercayaan masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Sehingga program restrukturisasi bisa dilakukan dengan cepat. Mengenai susunan kabinet mendatang, saya yakin dapat disusun komposisi pemerintahan yang baik, sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Hariadi B Sukamdani Pemerintahan baru diharapkan secepatnya menegakkan supremasi hukum yang sudah terkoyak-koyak selama pemerintahan lalu. Itu penting untuk mengembalikan kepercayaan dalam dan luar negeri. Bersamaan itu dilakukan restrukturisasi utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya harus ada upaya keras menarik investor sebanyak-sebanyak, terutama dari luar negeri agar pemulihan ekonomi bisa makin cepat. Kalau hal-hal itu bisa diselesaikan dengan singkat, saya kira dalam 1-1,5 tahun perekonomian akan pulih. Untuk itu Hipmi mengharapkan kabinet terdiri dari orang-orang profesional yang bebas KKN, berwawasan kebangsaan serta kredibilitas dan integritasnya tidak diragukan. Hipmi setuju bila komposisi kabinet dirampingkan, agar kerjanya lebih fokus dan efisien. Jabatan Menko sebaiknya dihapus saja, sebab selama ini kerjanya tidak efektif. Hipmi mendukung penuh upaya memantapkan stabilitas politik demi terciptanya kesatuan dan persatuan. Hipmi juga mendukung upaya pemulihan ekonomi sebagaimana telah digariskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), antara lain ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Untuk itu pemerintahan baru perlu segera mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dengan memberi kesempatan usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha muda daerah. Struktur pelaku usaha sudah saatnya memperhatikan pemuda untuk mempersiapkan kader-kader baru yang akan siap bekerja pada pasca pemulihan ekonomi. Dengan menyebarkan pengusaha-pengusaha ke daerah serta didukung semangat usaha yang tinggi, akan menimbulkan sistem perekonomian rakyat sesuai arah kebijakan ekonomi dalam GBHN. Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Hasbi Keberhasilan pemerintahan baru sangat tergantung bagaimana Presiden membentuk kabinet yang solid dan bekerja sama memperbaiki keadaan bangsa. Komposisi kabinet baru, tidak boleh didominasi salah satu partai seperti PDI-P atau kelompok Poros Tengah yang mencalonkan Gus Dur menjadi presiden. Para elite politik dari tiap partai dilibatkan dalam kabinet yang terbentuk. Soal status quo, itu sangat pribadi, tergantung pada individu bersangkutan. Jika wajah lama tetapi memiliki semangat reformasi dan memiliki kemampuan di bidangnya, kita harus pertimbangkan untuk dimasukkan dalam kabinet. Mengenai proposal kabinet baru yang disusun DPP PDI-P, sangat tergantung pada Gus Dur. Walau Gus Dur menerima proposal itu, tetapi Gus Dur sendiri harus mengkoordinasikan dengan anggota DPR untuk meminta pertimbangan. Perlihatkan, pemilihan dan penempatan anggota kabinet baru, jangan berdasarkan unsur suka dan tidak suka seperti pada Orde Baru, tetapi tetap berpatok pada kemampuan di bidang itu, kejujuran, keadilan, kerja sama, kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Kemudian semua anggota kabinet itu melakukan konsolidasi ke dalam, menyamakan persepsi. Mendesak ditangani presiden dan kabinetnya, adalah membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional, memulihkan ekonomi, penegakkan hukum, dan penurunan harga sembilan bahan kebutuhan pokok. Bila perlu, dilakukan perampingan di beberapa portofolio kabinet. Tetapi dalam proses itu, semua pihak seperti anggota kabinet dan MPR/DPR jangan berbeda pendapat setiap hari mengenai satu kebijakan umum. Keputusan bertele-tele, hanya membingungkan masyarakat dan membuat persoalan masyarakat dan internasional semakin rumit. Pengamat ekonomi politik, Drs Revrison Baswir MBA Munculnya duet Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai pimpinan nasional merupakan antitesa Orde Baru dan merupakan pergeseran kekuasaan drastis yang harus disyukuri. Akan tetapi, munculnya Gus Dur-Mega lewat proses panjang, kerja keras, serta kompromi antar-banyak sekali komponen kekuatan politik sekaligus membawa bangsa ini pada ujian berat ke depan dengan paradigma sistem yang sama sekali baru. Maka pertanyaan mendasarnya yang harus segera dijawab oleh komposisi yang ada sekarang-Gus Dur sebagai Presiden, Megawati sebagai Wapres, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR-apakah mereka bisa tetap menjaga pembagian kerja yang baik untuk seterusnya? Setidaknya dalam lima tahun ini. Ini tidak selesai dengan semua sudah kebagian (semacam power sharing-

Red), tetapi justru tes yang sangat berat ke depan dan belum pernah kita alami selama 32 tahun terakhir. Perjalanan ke depan bangsa Indonesia secara politik sudah amat berbeda dengan era sebelumnya. Dulu, zaman Orde Baru, semuanya jelas karena Presidennya Golkar, Ketua MPR-nya Golkar, Wapresnya Golkar. Sekarang tidak. Bahkan kenaikan Pak Amien didukung juga oleh PPP dan PBB, sedangkan kenaikan Megawati didukung oleh PKB. Ini kerja besar. Karenanya saat menyusun kabinet nanti, hal itu akan merupakan tes berat bagi Gus Dur-Mega. Namun sekali lagi, karena proses yang kita capai sekarang ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bareng antarsemua komponen politik di masyarakat, maka penyusunan kabinet pun nantinya harus dengan duduk bersama-sama kembali. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan itu, bubar kita ini. Kalau mereka terjebak kepada bagi-bagi kursi, Indonesia akan segera tamat. Untuk menyusun kabinet ideal yang tak sekadar bagi-bagi kursi itu, dibutuhkan kesediaan para pimpinan-MPR, DPR, Presiden, dan Wapres-untuk duduk bersama dan menyusun platform pemerintahan ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah duduk bersama, merumuskan platform untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa. Salah satu spirit yang harus dipakai untuk mengisi kabinet ini ialah spirit rekonsiliasi, dan itu tidak hanya tercermin dalam komposisi kabinet. Orang yang mengisi kabinet pun orang-orang yang mempunyai semangat rekonsiliasi. Jadi selain komposisinya, juga figur-figurnya memang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan rekonsiliasi dan memikirkan kepentingan rakyat banyak. Pemerintahan mendatang juga harus bisa memulihkan citra Indonesia yang telanjur buruk selama rezim Soeharto dan Habibie dengan berbagai persoalan yang tidak selesai. Kalau mau diberi nama, maka kabinet kita ini setidaknya bernama Kabinet Rekonsiliasi Kerakyatan, yaitu kabinet yang memiliki visi rekonsiliasi tetapi juga memiliki komitmen pada rakyat, dan untuk membahagiakan rakyat. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Drs Abdulkahar Badjuri Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sangat demokratis, jujur, dan transparan. Semua orang puas atas hasil pemilihan tersebut. Gus Dur sebagai seorang tokoh politik yang sangat demokrat, bersama wakil presiden, harus mampu mengadakan rekonsiliasi di antara semua kekuatan partai politik dalam penyusunan kabinet baru nanti. Dengan itu diharapkan sikap gontok-gontokan, saling menjegal dan menghadang antarelite politik dapat segera dihentikan. Dukungan semua partai politik merupakan kunci bagi pemerintahan baru untuk memulihkan situasi chaos yang tengah dihadapi bangsa. Sikap nasionalisme, sikap patriot, dan sikap membangun Indonesia baru harus tertanam dalam hati seluruh lapisan masyarakat setelah proses pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung jujur, adil, dan demokratis. (dmu/hrd/gun/tat/top)

KOMPAS - Rabu, 03 Nov 1999 Halaman: 8 Penulis: OKI/TRA Ukuran: 3940

PEMBEBASAN TAPOL DENGAN AMNESTI UMUM

Jakarta, Kompas Pembebasan tahanan politik/ narapidana politik (tapol/napol) hendaknya dilakukan dengan mekanisme amnesti umum, sehingga tidak ada satu tapol/napol pun yang tertinggal di penjara. Dengan demikian rekonsiliasi bisa benar-benar melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang menjadi korban kebijakan politik pemerintahan lalu. Terhadap mereka, tidak cukup hanya dengan mengeluarkannya dari penjara, tetapi harus disertai rehabilitasi dan pemberian kompensasi sebagai bagian hak perdata mereka. Pemikiran tersebut disampaikan Koordinator Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol Gustaf Dupe pada pertemuan dengan Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR, Selasa (2/11), di Jakarta. Pada pertemuan dengan FKKI, Komite diterima SM Kaphat, Tjetje Hidayat Padmadinata, Hamid Mappa, dan LT Susanto. Sedangkan pada pertemuan dengan F-PP, Komite yang disertai dua mantan tapol/napol yaitu HJ Princen dan Anwar Umar, ditemui M Dja'far Siddiq, dan Sjaiful Rachman. Dupe menjelaskan, rencana pembebasan tapol/napol seperti yang diumumkan Menkeh (waktu itu) Muladi, kurang tepat dan tidak bijaksana karena masih menyisakan sejumlah tapol/napol. Padahal, dalam setiap pergantian rezim adalah biasa jika diberikan amnesti kepada para tapol/napol rezim sebelumnya, sehingga rezim baru itu nyata bukan kelanjutan dari rezim sebelumnya. "Angka 80 tapol/napol yang diberikan Pak Muladi itu belum semuanya. Saya sendiri heran, betapa kacaunya data mengenai tapol/napol di Departemen Kehakiman sendiri. Sebagai contoh, dari napol PRD sekarang tinggal enam, tetapi yang masuk daftar Pak Muladi itu hanya lima. Nama Petrus Haryanto yang justru hukumannya paling ringan dibanding kawan-kawannya malahan tidak masuk," ungkapnya. Menurut data Komite jumlah tapol/napol masih lebih dari 100 orang. Selain napol PRD, Dupe menambahkan, terhadap tapol/napol Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga tidak dimasukkan kepada yang diberi amnesti, padahal sampai saat ini ada beberapa napol OPM di LP Kalisosok, Surabaya, dan sejumlah tapol/napol OPM di penjara-penjara di Irian. Rehabilitasi Dupe meminta para tapol/napol juga direhabilitasi nama baiknya, karena banyak dari mereka yang dijadikan tapol/ napol sesungguhnya sama sekali tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan pemerintahan Orde Baru. "Kami meminta pemerintah berlaku adil. Memberikan kompensasi dan uang pensiun yang menjadi hak mereka yang sebelumnya berstatus pegawai negeri, seperti yang diberikan pemerintah kepada AM Fatwa yang juga mantan napol. Hal itu sangat diperlukan para tapol/napol untuk memulai kembali hidupnya secara tenang dan damai di hari tua," tegasnya. Sebagai bagian dari rehabilitasi total itu, lanjut Dupe, pemerintah dan DPR seharusnya juga segera menghapus berbagai peraturan yang memberlakukan diskriminasi terhadap para mantan tapol/napol, antara lain Instruksi Mendagri No 32/1981 Mengenai Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Eks Tapol/Napol G30S. Kepada Komite, baik F-KKI maupun F-PP sama-sama sependapat dengan apa yang disampaikan Komite. Untuk memulai proses rekonsiliasi seluruh komponen bangsa, memang sudah seharusnya para tapol/ napol dibebaskan, direhabilitasi dan diberi kompensasi. Untuk itu, baik F-KKI maupun F-PP sama-sama akan memperjuangkan hal itu pada Komisi II DPR yang akan membahas persoalan tapol/napol tersebut. Sementara Ketua Komisi II DPR Amin Aryoso mengemukakan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang telah menyatakan menerima tawaran amnesti dari pemerintah. "Saya sudah menerima surat dari Budiman yang menyatakan ia menerima tawaran amnesti itu. Ia pun meminta agar napol lain dibebaskan," ucapnya. (oki/tra)

KOMPAS - Senin, 15 Nov 1999 Halaman: 7 Penulis: PEP Ukuran: 3795

MENDESAK, REKONSILIASI DENGAN RAKYAT ACEH

Jakarta, Kompas Tuntutan rakyat Aceh untuk merdeka merupakan persoalan politik yang sangat besar, yang menuntut pucuk pimpinan Pemerintah Indonesia sesegera mungkin melakukan pendekatan politik berupa upaya rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok signifikan yang mewakili Aceh. Dengan adanya rekonsiliasi, diharapkan tercapai titik temu dan persoalan Aceh tidak berlarut-larut. Demikian diungkapkan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, Sabtu (13/11), di Jakarta, menanggapi tuntutan rakyat Aceh yang ingin memerdekakan diri. Hal senada diungkapkan mantan Mendagri Syarwan Hamid dan A Dahlan Ranuwihardjo yang ditemui secara terpisah. Menurut Ryaas, saat ini pemerintah (pusat) belum memiliki identifikasi tentang kelompok signifikan yang benar-benar mewakili masyarakat Aceh. Dengan demikian, harus ada inisiatif masyarakat Aceh untuk memunculkan siapa pimpinan kelompoknya. "Saya dalam hal ini setuju dengan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red) yang mengatakan bahwa dia akan ke Aceh bila sudah jelas dengan siapa dia akan bicara," kata Ryaas. Ryaas mengungkapkan, opsi yang dikemukakan rakyat Aceh saat ini hanya ada dua, yaitu merdeka penuh atau menjadi negara bagian (federal). Diakui, perannya sebagai Menteri Negara Otonomi Daerah dalam menangani Aceh sangat kecil apabila opsinya hanya merdeka atau menjadi negara bagian. Pemerintahan campuran Ryaas lantas menawarkan gagasan tentang kemungkinan membentuk suatu sistem pemerintahan yang merupakan campuran pemerintah federal dan pemerintah daerah (propinsi). Alasannya, tidak semua propinsi mau menjadi negara bagian. "Terus terang ini gagasan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tentunya harus dikaji secara cermat kemungkinan bagaimana membentuk sistem pemerintahan nasional dimana ada unsur negara bagian dan propinsi. Kalau setuju, segera sosialisasikan," papar Ryaas. Syarwan Hamid sependapat dengan gagasan Ryaas. Menurut dia, membentuk negara federal tidak harus menyeluruh dalam arti seluruh propinsi dijadikan negara bagian. "Sebagian-sebagian saja, misalnya Aceh, dan baru kemudian yang lainnya," kata Syarwan yang mengaku baru beberapa jam tiba di Jakarta dari Riau. Rekonsiliasi Dahlan Ranuwihardjo dalam orasi ilmiah di depan wisudawan Universitas Nasional mengatakan, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri harus diberi kesempatan untuk menempuh penyelesaian secara komprehensif atas masalah Aceh tanpa harus melakukan referendum. Caranya, melakukan rekonsiliasi nasional dengan masyarakat Aceh. "Masalah Aceh adalah masalah nasional. Masalah Aceh adalah masalah keutuhan negara dan bangsa. Jadi bukan masalah Aceh saja, melainkan masalah seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kalau tetap referendum yang dituntut, referendum itu haruslah tidak hanya dilakukan oleh rakyat Aceh melainkan oleh rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke," papar Dahlan. Menurut Dahlan, MPR tidak berhak memutuskan referendum. Dengan referendum bagi rakyat Aceh dan rakyat propinsi-propinsi lainnya, katanya, akan mengakibatkan seluruh propinsi lepas dari Negara RI dan akan berarti bubarnya negara kesatuan RI. "Jadi MPR saja tidak berwenang menyetujui referendum, apalagi Presiden Gus Dur yang kedudukannya di bawah MPR," katanya. "Tugas Presiden Gus Dur saat ini adalah memberi keadilan kepada rakyat Aceh dengan jalan menindak perwira-perwira TNI dan polisi yang bersalah dan bertanggung jawab atas segala macam kekejaman yang telah terjadi atas rakyat Aceh. Kemarin, Presiden Habibie tidak mempunyai nyali untuk melakukan tindakan tersebut," kata Dahlan. (pep)

KOMPAS - Rabu, 17 Nov 1999 Halaman: 4 Penulis: SAMSUDIN Ukuran: 10093

KEBENARAN! JALAN MENUJU REKONSILIASI

Oleh Samsudin

KATA "rekonsiliasi" pernah mencuat beberapa waktu lalu yang digulirkan antara lain oleh Gus Dur dan Letjen Agum Gumelar. Kata itu muncul kembali saat pemerintah baru pimpinan Bapak Abdurrahman Wahid terbentuk, yang konotasinya sebagai perekat gejala disintegrasi bangsa agar tidak cerai-berai. Mempersatukan bangsa yang hampir retak ini merupakan agenda utama pemerintah, di samping masalah-masalah pokok lainnya. Pada pertengahan tahun 1950-an, kita pernah menghadapi bahaya disintegrasi. Salah satu usaha merekatkan kembali, pada tahun 1957 diadakanlah Musyawarah Nasional. Sama dengan penyebab disintegrasi yang kita hadapi sekarang, penyebab potensi perpecahan tahun 1950-an adalah perlakuan ketidakadilan di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Potensi disintegrasi saat ini lebih kompleks dan berat sehingga kemungkinan perpecahan bangsa menjadi lebih besar dan lebih rentan, jika dibanding dengan potensi perpecahan tahun 1950-an. Mengapa? Perlakuan ketidakadilan oleh pemerintah telah menimbulkan konflik. Konflik itu bukan lagi sekadar berbeda pendapat atau oposisi, tetapi konflik itu sudah sampai ke taraf benturan sesama masyarakat. Latar belakangnya adalah hal yang selama ini sangat sensitif, sehingga kita tidak mau mengungkapkannya ke permukaan untuk dicarikan cara penyelesaiannya. Persoalan yang mengendap itu akhir-akhir ini meledak ke permukaan yang membawa bangsa ini ke arah perpecahan. Persoalan yang sensitif itu adalah masalah suku, agama dan ras yang sudah sangat kita kenal, termasuk bentuk-bentuk perlawanan di beberapa daerah tertentu. Akibat konflik dan perlawanan itu terjadilah pelanggaran HAM, baik yang bersifat primer (pelanggaran berat HAM seperti pembunuhan di luar putusan pengadilan, penghilangan orang secara paksa, penganiayaan dan lain-lain), maupun yang bersifat sekunder (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak berbudaya). Di antara kedua macam pelanggaran itu, pelanggaran yang bersifat primer sangat membekas dan menimbulkan dendam. Pelakunya dapat bersifat horizontal (antara sesama masyarakat) maupun vertikal (dari aparat kepada masyarakat ataupun sebaliknya). Demikian pula, pelanggaran HAM primer itu telah membawa aib bangsa ini di dunia internasional. Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan, abad XX adalah abad terburuk dalam pelanggaran HAM. Apakah kita termasuk di dalamnya? Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan pelanggaran HAM primer ini? Apakah cukup dengan rekonsiliasi atau musyawarah nasional saja; artinya kita berdamai dengan melupakan masa lalu yang kelam dan kejam itu dan kita mulai dari Zero Point? Kalau itu dapat dilakukan, penyelesaiannya akan menjadi sangat sederhana dan tidak akan memakan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang besar. Cara inilah yang kita harapkan! Tetapi mungkinkah? Fakta menunjukkan bahwa Aceh sangat keras menuntut agar pelaku pelanggaran HAM primer supaya diadili. Permintaan maaf saja, yang disampaikan oleh Pak Wiranto dan Pak Habibie tidak cukup. Juga Aceh tidak dapat menerima kompensasi yang disampaikan pemerintah dijadikan sebagai excuse atas pelanggaran HAM primer. Pokoknya pelaku pelanggaran HAM primer harus diadili; dengan "ultimatum" referendum atau Aceh Merdeka! Begitu kata masyarakat Aceh. Daerah-daerah lain yang masyarakatnya mengalami pelanggaran HAM primer adalah dalam kasus Tanjungpriok, Lampung, Irja, Timtim, Kalimantan Barat, Maluku, peristiwa Jalan Ketapang, Kupang, dan lain-lain. *** APA yang dituntut rakyat Aceh adalah sah menurut hukum. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Hukum Humaniter menyatakan bahwa bagi pelanggar HAM yang bersifat primer, tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa. Instrumen hukum itulah (Hukum Humaniter) yang dipakai dunia internasional untuk menjerat penjahat-penjahat perang Nazi, diktator Pinochet, kelompok Khmer Merah tertentu, dan saat ini sedang mencoba menjerat penjahat perang Kosovo. Sedikit penjelasan, bahwa Hukum Humaniter adalah hukum perang yang memuat antara lain Konvensi Geneva tahun 1949 yang berisi perlindungan terhadap korban anggota angkatan perang negara-negara yang bertikai dan perlindungan terhadap orang-orang sipil. Konvensi Geneva itu terdiri dari: Protokol I yang mengatur perlindungan korban dalam konflik senjata yang bersifat internasional, dan Protokol II mengatur perlindungan korban dalam konflik internal. Perlu diingatkan bahwa HAM telah menjadi komoditas dunia; artinya kita tidak dapat lagi mengatakan sebagai campur tangan asing jika masyarakat internasional mengkritik persoalan HAM di negeri kita. Penolakan dunia internasional terhadap suatu negara pelanggar HAM sangat kuat sekali. Konsekuensi bagi negara pelanggar HAM dapat berakibat serius bagi negara tersebut, seperti pengucilan internasional sampai kepada kemungkinan embargo. Di tingkat badan internasional seperti PBB, ada suatu badan yang memantau persoalan HAM di dunia yakni Komisi Tinggi HAM. Badan ini sangat kuat dan berpengaruh besar. Komisi ini dapat membentuk International Tribunal, Peradilan Internasional, untuk mengadili

pelaku-pelaku pelanggaran primer HAM. Kita harus tahu diri dan sadar bahwa: "Kejahatan perang dan kejahatan pelanggaran HAM yang bersifat primer adalah kejahatan yang paling gawat dalam hukum internasional." Kalau pelanggaran HAM yang bersifat primer tidak ada ketentuan tentang kedaluwarsa, berarti pelanggaran itu harus dituntut di depan pengadilan. Pertanyaannya sekarang: Dengan ratusan kasus, mungkin ribuan, apakah dengan prosedur peradilan pidana biasa kita mampu untuk menyelesaikannya? Ataukah cara rekonsiliasi, seperti Musyawarah Nasional tahun 1957 yang akan kita pakai, dengan melupakan masa lalu yang pahit dan dilanjutkan dengan saling memaafkan begitu saja? Apakah masyarakat terutama korban atau keluarga korban yang meninggal dan hilang mau menerima cara itu? Rasanya sulit untuk menerima cara seperti itu. Perlu diingat, kita sedang berpacu dengan waktu karena bangsa sedang dihadapkan kepada bahaya disintegrasi sebagai harga mahal yang harus dibayar akibat tindakan brutal dari pelaku-pelaku dan arsitek pelanggaran HAM primer yang berpikiran picik itu. Ada instrumen lain yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yaitu: Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and National Reconciliation). Cara ini telah dipakai beberapa negara seperti Afrika Selatan. Pada prinsipnya metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengungkapkan kebenaran bahwa pelanggaran HAM primer benar-benar telah terjadi; barulah kemudian dilakukan proses rekonsiliasi (perukunan kembali). Dengan menonjolkan kebenaran lebih dahulu, berarti metode itu harus didahului dengan proses hukum. Untuk menyelenggarakannya, perlu dibentuk suatu komisi yang diberi nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Komisi ini harus diberi kewenangan hukum yang luas dan dipercaya oleh masyarakat; dengan demikian komisi itu harus dibentuk dengan undang-undang dan anggota-anggotanya diambilkan dari tokoh-tokoh yang dapat diterima. Jangan sekali-kali mengambil orang-orang dari instansi yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. *** KOMISI inilah nanti yang akan mengungkapkan pelanggaran HAM primer, kekejaman-kekejaman serta perlakuan tidak wajar yang terjadi pada masa lalu, yang telah menghancurkan kehidupan individu seseorang serta keluarganya dan berpengaruh kepada masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Seperti apa yang dilakukan di Afrika Selatan, maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional itu terdiri dari tiga komisi. Pertama adalah Komisi Pelanggaran HAM. Komisi ini akan mencari atau menerima laporan dari korban atau famili korban tentang kasus mereka. Komisi ini pula yang akan menetapkan apakah seseorang itu merupakan korban dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah Komisi Amnesti. Komisi ini menyiapkan permohonan amnesti (pengampunan) bagi seseorang yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM primer setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui proses hukum. Jika seseorang telah diberikan amnesti, korban tidak dapat lagi menuntut kerugian ataupun tuntutan kriminal lainnya. Ketiga adalah Komisi Rehabilitasi dan Ganti Rugi. Komisi ini akan membuat proposal tentang kemungkinan rehabilitasi dan ganti rugi bagi korban atau keluarga korban. Kemudian proposal itu dikirim kepada Presiden dan DPR untuk diputuskan dan dimintakan persetujuannya. Sebelum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bekerja, terlebih dahulu harus diadakan kegiatan-kegiatan pendahuluan seperti lokakarya, seminar-seminar, jajak pendapat, yang kesemuanya itu berguna sebagai pengenalan kebijaksanaan yang diambil, kepada masyarakat. Memang tidak mudah untuk melupakan dan memaafkan penyiksaan-penyiksaan brutal yang dialami. Bagi seorang anak di Aceh, tidak mudah untuk melupakan kulit kepala ayahnya dirobek di depan mata si anak. Tidak mudah pula untuk melupakan keluarga transmigran yang dicincang-cincang di Aceh dan di Irian sana. Juga tidak mudah melupakan aparat keamanan yang dibunuh dan disiksa begitu saja. Apakah bangsa ini akan tercabik-cabik karena menyimpan dendam yang berkepanjangan? Kami kira ide Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional adalah suatu konsep win-win solution supaya kita dapat hidup tenang dalam negara kesatuan dan tidak terjebak kepada masa lalu yang kelam itu. Sekali hal itu kita capai, kita akan merobek lembaran hitam itu dari buku sejarah bangsa untuk selama-lamanya. Semoga! * Samsudin, mayor jenderal purnawirawan, anggota Komnas HAM.

KOMPAS - Minggu, 21 Nov 1999 Halaman: 6 Penulis: ELY/ARN Ukuran: 3337

NU Dapat Lakukan Rekonsiliasi

NU DAPAT LAKUKAN REKONSILIASI Jakarta, Kompas Nahdlatul Ulama (NU) memegang peran politik kunci. Dengan fungsi integratifnya, NU dapat berperan besar melakukan rekonsiliasi nasional untuk mencegah disintegrasi bangsa. Namun, hingga kini para ulama NU belum menjalankan peran integratifnya secara maksimal. Demikian Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Azyumardi Azra di Jakarta, Sabtu (20/11). "NU belum menggunakan fungsi rekonsiliatifnya secara nasional. Padahal dibanding organisasi massa atau organisasi keagamaan lainnya, NU berkemampuan besar mengupayakan rekonsiliasi nasional," tambahnya kepada Kompas. Dikatakan, paham dan tradisi keagamaan yang ada pada NU sama dengan tradisi dan paham keagamaan yang berkembang di Aceh, Maluku, dan Kalimantan. Yaitu, berorientasi pada tarekat dan lembaga-lembaga tradisional. "Melalui pendekatan sufistik, ulama-ulama NU dapat menjalin dialog dengan para ulama di Aceh, untuk membangun rekonsiliasi bangsa. Dan NU dengan sifatnya yang akomodatif dan inklusif akan mudah melakukan pendekatan," imbau Azyumardi. Kemampuan melakukan pendekatan semacam itu tidak dimiliki oleh Muhammadiyah maupun organisasi kaum modernis lainnya. Namun, lanjut Azyumardi, sayangnya peran itu belum difungsikan secara optimal oleh NU. Para ulama NU belum melakukan peran integratifnya secara maksimal. "Oleh karena itu, secara pribadi saya sangat berharap dalam muktamar ini dapat dibahas dengan serius masalah ini. Setidaknya Syuriah NU membentuk delegasi ulama-ulama sepuh yang akan mengirim utusan untuk berdialog dengan ulama-ulama Aceh," katanya. Azyumardi berpendapat, NU telah berhasil menjalankan fungsi integratifnya di Jawa. Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa dan NU, maka orientasi NU yang selama ini "berat" ke Jawa harus dikembangkan ke luar Jawa. "Sebenarnya potensi NU di luar Jawa sangat besar, hanya saja selama ini tidak diagendakan secara serius. Ini karena selama ini NU inward looking. Nah, kini NU harus outward looking," sarannya. Harus jadi prioritas Mengembangkan pembinaan dengan orientasi luar Jawa juga disampaikan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim, KH Hasyim Muzadi. "NU mempunyai kultur yang bisa merekatkan seluruh bangsa. Jika NU berhasil mengembangkan kulturnya ini ke luar Jawa, maka persoalan disintegrasi bangsa akan bisa diselesaikan," ujar Hasyim. Masalah disintegrasi bangsa juga menjadi masalah bagi NU, karena 90 persen bangsa Indonesia beragama Islam. "Jika satu demi satu propinsi memisahkan diri, maka eksistensi negara kesatuan Indonesia terancam. Itu berarti ancaman juga bagi NU," kata Hasyim. Pengembangan NU di luar Jawa merupakan masalah pembinaan dan struktur organisasi yang selama ini kurang seimbang. "Jadi, luar Jawa itu harus menjadi prioritas pengembangan NU. Kalau nanti semuanya sudah bergerak, lalu disatukan. Kesatuan itulah yang akan menjadi pioner untuk perekat bangsa secara keseluruhan," tegas Hasyim, yang tampil jadi salah satu kandidat Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU. (ely/arn)

KOMPAS - Rabu, 24 Nov 1999 Halaman: 4 Penulis: Ukuran: 5513

Tajuk: Program Rekonsiliasi Nasional Aljazair Ditorpedo, Tokoh FIS Dibunuh

KASUS penembakan Abdelgader Hachani, tokoh senior Front Penyelamatan Islam (FIS), awal pekan ini kembali membawa Aljazair ke dalam kemelut dan krisis politik. Program rekonsiliasi nasional Aljazair pun terasa seperti ditorpedo. Aksi kebrutalan terhadap Hachani dianggap dapat membahayakan program rekonsiliasi nasional yang sedang giat dilakukan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung hampir delapan tahun di negara itu. Tidaklah mengherankan jika Presiden Bouteflika merasa sangat terpukul dan prihatin. Mantan Ketua Parlemen Abdelaziz Belkhadem, yang dikenal dekat dengan Presiden Bouteflika, menggambarkan pembunuhan Hachani sebagai tragedi yang menyulut kembali krisis di Aljazair. Belkhadem memprihatinkan nasib negerinya, yang berkali-kali dirundung tragedi berdarah, termasuk Presiden Mohammed Boudiaf, yang tewas ditembak Juni 1992. Hachani (40 tahun) tewas akibat terjangan dua butir peluru di kepalanya. Aksi pembunuhan itu dilakukan orang bertopeng di sebuah klinik gigi di Aljir, ibu kota negara. MASIH belum diketahui otak dan pelaku aksi pembunuhan itu. Para analis hanya menyatakan, Hachani sebagai pemimpin FIS jelas tidak disukai militer yang menikmati kemapanan di Aljazair. Tidak tertutup pula kemungkinan Hachani menjadi korban pertikaian di antara berbagai faksi penentang penguasa di Aljazair. Nama Hachani mulai mencuat ke permukaan pada usia 32 tahun ketika mengambil alih kepemimpinan FIS setelah militer menangkap ketua partai Abassi Madani dan wakilnya Ali Belhadj atas tuduhan merongrong keamanan negara Juli 1991. Madani sampai sekarang berada dalam tahanan rumah, sedangkan Belhadj di penjara yang dirahasiakan. Hachani sendiri ditangkap Januari 1992 dan dihukum lima tahun tanpa proses pengadilan karena mengecam militer yang membatalkan pemilu. Ia dibebaskan tahun 1997, tetapi terus berada di bawah pengawasan militer. AKSI pembunuhan Hachani merupakan pembunuhan pertama terhadap politisi senior FIS sejak organisasi itu dibentuk tahun 1989. Meski FIS masih dinyatakan sebagai organisasi politik terlarang, tetapi peristiwa pembunuhan Hachani dirasakan sebagai tragedi yang bisa menghancurkan proses perdamaian di Aljazair. Hachani sudah menyatakan menyambut baik proses perdamaian, tetapi tidak sepenuhnya mendukung program rekonsiliasi nasional Presiden Bouteflika selama para pemimpin FIS tidak dibebaskan. Atas dasar itu pula, Hachani mengecam kesepakatan perdamaian yang dicapai Juni lalu antara Presiden Bouteflika dengan Tentara Pembebasan Islam (AIS), sayap militer FIS. Ia menganggap kesepakatan itu sebagai bentuk sikap menyerah kepada pemerintah. Sebaliknya, Hachani juga mengecam kekerasan yang dilakukan faksi-faksi radikal, dan menekankan agar FIS tetap sebagai kekuatan politik. Lebih jauh Hachani mendesak pemerintah melakukan dialog dengan tokoh-tokoh moderat FIS untuk mencari penyelesaian politik secara menyeluruh. DENGAN kematian Hachani, proses perdamaian dan program rekonsiliasi kembali mendapat hambatan. Dampak kematian Hachani masih sulit diukur terhadap proses perdamaian. Tetapi yang pasti, Hachani merupakan politisi muda yang sangat berpengaruh sampai melampaui batas lingkungan FIS. Suka atau tidak suka pula, FIS telah menjadi satu komponen penting yang ikut mewarnai sejarah pergolakan politik di negeri berpenduduk 26 juta orang itu. Bahkan pergolakan yang berlangsung hampir delapan tahun di Aljazair bersinggungan langsung dengan FIS. Sebagaimana sering disinggung, ketegangan sosial dan politik di Aljazair berawal dari tindakan Front Pembebasan Nasional (FLN) yang didominasi militer, yang membatalkan putaran kedua pemilu 16 Januari 1993. Aksi sepihak itu sungguh mengewakan FIS, yang sangat yakin akan kembali memenangkan pemilu setelah berhasil meraih kemenangan mencolok dalam putaran pertama 26 Desember 1992. Hanya beberapa hari setelah membatalkan pelaksanaan putaran kedua pemilu, militer dan FLN menangkap Ketua dan Wakil Ketua FIS. Tindakan represi itu dilanjutkan dengan menyatakan FIS sebagai partai terlarang. Rupanya FLN yang mendominasi kehidupan politik sejak kemerdekaan tahun 1962 dan sejak dinyatakan sebagai partai satu-satunya di Aljazair tahun 1965, tidak rela kehilangan kekuasaan. Tetapi sikap FLN dan militer yang berlawanan dengan demokrasi dan melanggar hak asasi, benar-benar membawa petaka bagi bangsa Aljazair. HARGA yang dibayar bangsa Aljazair sangatlah mahal akibat rekayasa kekuasaan FLN yang didominasi militer. Presiden Bouteflika menyatakan, paling tidak 100.000 orang tewas dalam aksi kekerasan hampir delapan tahun terakhir. Kekacauan yang terus meminta korban itu harus dihentikan. Maka, Pemerintahan Bouteflika menyelenggarakan referendum September lalu untuk rekonsiliasi nasional. Hasil referendum memperlihatkan dukungan kuat rakyat Aljazair terhadap proses perdamaian dan rekonsiliasi nasional. Peristiwa pembunuhan Hachani tentu saja membahayakan program rekonsiliasi nasional yang sedang berjalan. Sejak terpilih April lalu, Presiden Bouteflika menyatakan, upaya

memulihkan perdamaian merupakan prioritas utama pemerintahannya. Tetapi tantangannya, masih sangat besar.

Kliping ELSAM

KOMPAS - Kamis, 25 Nov 1999 Halaman: 8 Penulis: FER Ukuran: 2738

Disiapkan, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilias

DISIAPKAN, RUU TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Jakarta, Kompas
Pemerintah kini sedang mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Persiapan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diharapkan sebelum masa sidang DPR berakhir pertengahan Desember nanti, tim penyusun draf RUU dapat menyelesaikan tugasnya sehingga dapat diajukan ke DPR. "Saya sudah mengundang banyak kalangan untuk dalam seminggu ini selesai mempersiapkan draf RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, kepada pers, di Jakarta, Rabu (24/11). Yusril menambahkan, pihaknya juga sudah menghubungi Abdul Hakim Garuda Nusantara, Munir, Bambang Widjojanto, dan beberapa praktisi hukum dalam rangka mempersiapkan draf RUU itu. Sementara itu, Bambang Widjojanto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dihubungi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan draf RUU mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Komisi itu sudah menjadi kebutuhan. Kita akan siapkan itu dengan segala keterbatasan waktu yang ada," tuturnya. Bambang menambahkan, sebelum dibahas di DPR, sebaiknya gagasan mengenai rekonsiliasi itu disosialisasikan kepada masyarakat. "Untuk menyembuhkan luka sosial, diperlukan komitmen membuka diri. Harus mengajak para pelaku dan korban menyadari bahwa rekonsiliasi ini untuk penyembuhan sosial. Kalau pelaku tidak membuka diri, sulit terjadi rekonsiliasi," tuturnya. Dikatakan oleh Yusril, karena gagasan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu berasal dari kalangan LSM, diharapkan kalangan LSM dapat menyusun sendiri draf RUU itu. "Saya katakan, Anda (kalangan LSM) menyusun seperti maunya Anda. Saya tidak mau mendikte. Setelah didiskusikan dan menghasilkan yang terbaik, saya meneruskan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Saya bawa ke DPR," katanya. Menurut Yusril, draf RUU mengenai komisi itu diharapkan selesai sebelum masa sidang DPR berakhir tanggal 18 Desember 1999. "Kita harus mengejar sidang, masa sidang berakhir 18 Desember. Kalau bisa, sebelum masa sidang berakhir draf itu sudah kita ajukan," katanya. Yusril menjelaskan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Kasus pelanggaran HAM itu secara teknis peradilan sulit dibuktikan karena mungkin bukti sudah hilang atau musnah. Meskipun demikian, terhadap pelaku pelanggaran HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat melakukan declare dengan menyatakan pelaku yang bersalah. "Namun tidak dapat dijatuhi hukuman," tuturnya. (fer)

KOMPAS - Kamis, 02 Dec 1999 Halaman: 8 Penulis: OKI Ukuran: 2807

Rekomendasi 36 LSM BENTUK KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Jakarta, Kompas Sebanyak 36 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari seluruh Indonesia yang mengikuti Semiloka "Indonesia Baru yang Menghormati Pluralisme/Kebhinnekaan" merekomendasikan agar pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tingkat nasional, dan juga mencabut semua bentuk perundang-undangan yang diskriminatif. Mereka yang mewakili pluralisme masyarakat Indonesia itu pun sepakat membentuk Komisi Anti-Diskriminasi Indonesia (KADI), sebagai jaringan komunikasi untuk membicarakan praktik diskriminasi di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Jeirry Sumampow dari LSM Masyarakat Dialog Antar-Agama (Madia), mewakili para peserta semiloka, Rabu (1/12), di Jakarta. Sebanyak 49 orang dari 36 LSM mengikuti semiloka itu selama empat hari, dengan menghadirkan tutor luar negeri dari Afrika Selatan dan Australia. Sebagai hasil semiloka tersebut, Sumampow menguraikan, para peserta sependapat bahwa selama 32 tahun kemajemukan ini telah diseragamkan secara artifisial, sehingga mengakibatkan dehumanisasi yang bersifat massif. Hal ini dilakukan oleh negara karena kemajemukan dianggap sebagai ancaman persatuan. Padahal sesungguhnya kemajemukan ini merupakan kondisi obyektif Bangsa Indonesia yang kondusif untuk demokrasi. Oleh karenanya, jika negara masih menerapkan penyeragaman artifisial itu, maka akan terjadi tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan dalam sejarah kemanusiaan di dunia. Akar-akar konflik di berbagai daerah, bila dipetakan, ternyata lebih disebabkan oleh sifat diskriminatif negara terhadap rakyat pada hampir semua aspek kehidupan. Selain mencakup wilayah nasional, konflik secara horisontal juga terjadi pada aras kebudayaan oleh sebab kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Misalnya, pelarangan terhadap etnik tertentu untuk mengekspresikan tradisi, budaya, bahkan agama mereka. Pada akhir semiloka, mereka membuat "Komunike Puncak 36 LSM". Komunike itu berisi delapan tuntutan bersama. (oki)

"Komunike Puncak 36 LSM" 1. Cabut dwifungsi TNI 2. Hentikan kekerasan yang dilakukan oleh negara 3. Hentikan kekerasan antara kelompok masyarakat yang bertikai 4. Bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tingkat nasional 5. Bentuk penguatan lembaga adat untuk rekonsiliasi konflik di setiap daerah 6. Cabut semua bentuk perundang-undangan yang diskriminatif 7. Hapuskan semua bentuk diskriminasi di berbagai institusi pelayanan masyarakat 8. Sosialisasikan hidup yang saling menghargai dan menghormati pluralisme sebagai dasar untuk bermasyarakat.

KOMPAS - Jumat, 26 Nov 1999 Halaman: 9 Penulis: TANUREDJO, BUDIMAN Ukuran: 12575
KEBINGUNGAN Mencari Sebuah Solusi

ELITE politik Indonesia sedang bingung untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di berbagai daerah. Solusi dan usulan telah bermunculan. Ada yang mengusulkan pelaku pelanggaran HAM diselesaikan di Peradilan Umum. Ada pula yang mengusulkan di Peradilan Militer. Ada juga yang mengusulkan di Peradilan HAM. Yang belakangan menguat adalah usulan agar masalah itu diselesaikan di Peradilan Koneksitas. Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota Komnas HAM pun mengusulkan mekanisme penyelesaian melalui "Komisi Kebenaran dan Keadilan". Kebingungan dan kegamangan serta serba ragu-ragu. Itulah yang terbaca dari perilaku elite politik menghadapi tuntutan masyarakat Aceh dan masyarakat lainnya terhadap berbagai pelanggaran HAM. Berbagai komisi pencari fakta telah dibentuk dan bekerja. Entah itu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pencari Fakta Daerah, Komisi Independen Tindak Kekerasan di Aceh, Komisi Pencari Fakta DPR, dan sekarang Pansus DPR telah dibentuk. Namun, selain Pansus DPR yang masih bekerja, arah penyelesaiannya tak pernah jelas. Satu alternatif yang ditawarkan di-counter oleh alternatif lain. Alternatif lain dikritik karena dianggap tak akan mampu menyelesaikan masalah. Alternatif lainnya yang ditawarkan dianggap belum memiliki landasan hukum. Akhirnya, elite politik pun bergulat dalam kebingungan pilihan. Sementara pada sisi lain, masyarakat sudah menuntut dan terus mendesak. ***

FENOMENA itulah yang bisa ditangkap masyarakat sebagai kebingungan elite dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Menurut pengamatan sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga, kebingungan pilihan itu tak bisa lepas dari konflik kepentingan politik dan konflik hukum dari para pihak yang terlibat. Semua pilihan mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Perdebatan-perdebatan dalam wacana dan retorika, terus saja terjadi. Namun, sejauh ini, belum tampak niat serius untuk mencoba menyelesaikan permasalahan Aceh secara komprehensif. Kebingungan pilihan juga bisa disebabkan karena tidak jelasnya mekanisme penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM. "Konsep dan arahnya nggak jelas," ucap aktivis LSM, Abdul Hakim Garuda Nusantara yang mengusulkan penggunaan mekanisme Komisi Kebenaran dan Keadilan guna menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus Aceh tampak diwarnai keragu-raguan. Ada keraguan apakah kasus Aceh harus dibawa ke pengadilan atau tidak? Apakah pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM ketika prajurit sedang mengemban politik negara? Ada juga yang memikirkan dampak politik dari mekanisme yang diambil, karena khawatir jang-jangan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri? Namun terlepas dari kebingungan dan keraguan itu, masalah Aceh harus diselesaikan secara bersama oleh elite politik dan komponen bangsa dengan sikap dewasa. Elite politik dan masyarakat perlu menyadari bahwa tuntutan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia tak bisa dibendung lagi. Apalagi hanya dengan mengandalkan semangat melindungi korps. Melihat fenomena itu, Sinaga melihat belum adanya kesiapan mentalitas masyarakat. "Bangsa ini belum bisa jujur pada sejarah dan masa lalu. Bangsa ini belum mau melihat perspektif ke depan. Penyelesaian kasus Aceh hanya dianggap sebagai penyelesaian secara hukum dan kemudian berhenti pada saat vonis dijatuhkan," ucapnya. Seharusnya, elite politik dan aparat penegak hukum yang diberi tugas serius melihat penyelesaian

kasus Aceh dengan perspektif ke depan. Bahwa, dengan tuntasnya kasus Aceh, akan mengurangi beban politik pemerintahan mendatang. "Itu merupakan investasi ke depan bagi tegaknya supremasi dan tegaknya keadilan," ujar Sinaga. ***

DARI lima usulan mekanisme yang terungkap ke permukaan, setidaknya terungkap pula kekurangan dan kelebihan mekanisme itu, termasuk kendala yang melingkupinya. Kendala itu bisa kendala yuridis maupun kendala psikologis-politis. Namun yang pasti, kendala-kendala itu muncul karena perilaku institusi hukum kita selama ini tak pernah diberdayakan. Institusi hukum selama Orde Baru hanyalah alat dari kekuasaan. Akibatnya: terjadi krisis kepercayaan yang amat parah terhadap lembaga peradilan. Faktor inilah yang sebenarnya ikut mempengaruhi terjadinya kebingungan. Usulan pertama: penyelesaian melalui Peradilan Umum (sipil). Usulan ini tak lazim atau belum pernah digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri. Sebuah tindak pidana yang dilakukan anggota TNI/Polri, sesuai dengan UU No 31/1997 menjadi kewenangan Peradilan Militer. Itu tercantum dalam Pasal 5 UU No 31/1997 yang berbunyi: Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan negara. Namun bukan tidak mungkin Peradilan Sipil digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Seperti pendapat ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo, kepentingan sipil lebih besar karena korban yang jatuh lebih banyak sipil. Ia juga menduga pelanggaran HAM di Aceh tak semuanya dilakukan militer tetapi juga bisa melibatkan sipil. Misalnya, pejabat sipil yang ikut menentukan kebijakan keamanan di Aceh. Pejabat sipil itu bisa dikategorikan sebagai pelaku penyerta. Sesuai dengan UU No 35/1999: pelanggaran HAM di Aceh bisa diselesaikan di Peradilan Sipil, kecuali jika Ketua MA menyatakan kasus itu diselesaikan di Peradilan Militer. Usulan kedua: mekanisme Peradilan Militer. Secara yuridis usulan ini yang paling tidak menimbulkan konflik hukum. Sesuai dengan UU No 31/1997, tindak pidana yang dilakukan anggota TNI/Polri masuk wilayah Peradilan Militer. Namun, usulan itu menghadap kendala psikologis-politis yang amat berat. Kinerja mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Peradilan Militer tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Berbagai kasus seperti sidang terhadap pelaku penembakan mahasiswa Trisakti, persidangan terhadap pelaku penculikan aktivis politik, proses hukum terhadap kasus Semanggi I dan Semanggi II, serta penyerbuan RS Jakarta, semuanya tak pernah memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Hadirnya lembaga "Perwira Penyerah Perkara" (Papera) ternyata malah memberikan peluang terjadinya praktik impunity (kejahatan tanpa hukuman). Usulan ketiga: Peradilan Koneksitas sebagaimana diusulkan Pansus DPR dan Jaksa Agung yang juga Ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman. Peradilan Koneksitas mengandung prasyarat bahwa pelaku pelanggaran HAM (tindak pidana) harus dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum (warga sipil) dan lingkup peradilan militer (TNI/Polri). Sesuai dengan UU No 35/1999, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama diadili di peradilan umum, kecuali jika menurut Ketua MA perkara itu harus diadili di Peradilan Militer. Dalam kasus ini, tim penyidik pun dibuat gabungan Polri dan Polisi Militer, begitu juga dengan hakimnya yang merupakan gabungan hakim militer dan hakim sipil. Jadi, Peradilan Koneksitas bisa terjadi jika fakta memang menunjukkan pelaku tindak pidana adalah sipil dan militer. Proses peradilan

akan sangat tergantung pada Ketua Mahkamah Agung yang sekarang dijabat Marschal Madya (Purn) Sarwata. Usulan keempat: Peradilan HAM. Penyelesaian melalui Peradilan HAM sebenarnya paling masuk akal dan diharapkan bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Masalahnya: Perpu No 1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan Presiden BJ Habibie, tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus Aceh. Kendala yuridis itu tercatat dalam Pasal 24 Perpu No 1/1999 yang menyebutkan: pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Perpu ini diberlakukan, berlaku ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan klausul itu, maka pelanggaran HAM di Aceh tak bisa diselesaikan oleh mekanisme Peradilan HAM, tetapi Peradilan Militer. Kendala lainnya, sumber daya manusia hakim untuk kasus HAM belum disiapkan serta belum adanya pengalaman. Belakangan, Perpu No 1/1999 yang didesain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Timtim, akan dicabut dan dibuat RUU atau Perpu baru. Usulan kelima: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Usulan ini banyak disuarakan oleh aktivis lembaga swadaya masyarakat. Mereka terinspirasi pola penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Afrika Selatan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini didesain memiliki tiga Subkomisi yakni Subkomisi Investigasi yang bertugas mengungkap fakta dan kebenaran atas sebuah peristiwa pelanggaran HAM. Subkomisi Amnesti bertugas untuk meneliti pengakuan bersalah dan aktor pelanggaran HAM serta permintaan maaf mereka. Subkomisi Rehabilitasi bertugas memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap para pelaku pelanggaran HAM. Kelemahan dari mekanisme ini adalah belum adanya UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. RUU tentang itu sedang disiapkan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan akan segera dibahas DPR. Pengalaman dalam mengimplementasikan pola ini juga belum ada. Kendala lainnya adalah kepercayaan dan kecurigaan masyarakat pada lembaga yang akan dibentuk tersebut. Kelebihan dari pola ini, berdasarkan pengalaman di negara lain, kebenaran dan fakta akan terungkap. Selain menyelesaikan kasus pelanggaran HAM termasuk memberikan kompensasi, komisi juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi ke depan. Dari sisi pendidikan masyarakat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan bisa memberikan nilai lebih. *** CARA penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh telah terungkap dengan segala masalah yang melingkupinya. Penyelesaian kasus Aceh sebenarnya bukan hanya persoalan kebingungan menentukan pilihan melainkan tergantung pada kemauan politik pemerintah. Semua cara sebenarnya bisa ditempuh jika memang ada kemauan politik. Kemauan politik untuk menempatkan masalah Aceh sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama pula. Penyelesaian kasus Aceh bukan hanya untuk menjawab tuntutan masyarakat akan tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Namun juga sebagai investasi ke depan untuk mewujudkan sebuah Indonesia baru yang terbebas dari semangat balas dendam politik, tegaknya supremasi hukum dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat. (budiman tanuredjo) Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Aceh

1. Peradilan Umum (Sipil) Kelebihan: - Lebih terbuka dibanding peradilan militer - Lebih mudah dikontrol daripada peradilan militer - Prasarana jaksa, hakim, telah tersedia Kelemahan: - Tidak lazim diberlakukan untuk TNI/Polri - Masih membutuhkan tafsir hukum soal kompetensi peradilan - Tak ada jaminan fakta dan kebenaran terungkap tuntas - Proses penyelesaian lama

2. Peradilan Militer Kelebihan: - Perangkat hukum dan prasarana sudah tersedia Kelemahan: - Tak dipercaya masyarakat karena tak bisa memberikan keadilan - Peranan Perwira Penyerah Perkara yang begitu besar untuk

menentukan dakwaan - Terbuka kemungkinan terjadi distorsi hukum - Proses peradilan lama 3. Peradilan Koneksitas Kelebihan: - Perangkat hukum dan prasarana telah tersedia - Lebih transparan daripada peradilan militer Kelemahan: - Prasyarat tindak pidana dilakukan bersama-sama sipil dan TNI - Tergantung Ketua MA 4. Peradilan HAM Kelebihan: - Bisa lebih menjamin rasa keadilan masyarakat Kelemahan: - Perangkat hukum belum tersedia - Prasarana, SDM belum tersedia - Belum punya pengalaman 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kelebihan: - Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sekaligus memberikan kompensasi kepada korban - Fakta dan kebenaran bisa lebih terungkap - Risiko politik relatif terjaga Kekurangan: - Belum ada hukum yang mengatur - Prasarana dan SDM belum tersedia - Belum punya pengalaman Sumber: wawancara berbagai sumber (bdm)

Kliping ELSAM

KOMPAS - Senin, 06 Dec 1999 Halaman: 7 Penulis: OKI/TRA Ukuran: 4284

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perlu Segera Direalisasikan

Jakarta, Kompas Untuk menyelesaikan soal-soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu yang tidak terungkap dan tak terselesaikan, maka rekomendasi Lokakarya Nasional IV 1998 tentang perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kiranya dapat segera direalisasikan oleh pemerintah dan DPR. Pembentukan komisi tersebut merupakan kompromi atau jalan tengah yang paling memungkinkan, sehingga perlu diperjuangkan semua kalangan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Lokakarya Nasional V HAM Emil Salim, Sabtu (4/12) di Jakarta, se usai penutupan Lokakarya Nasional yang berlangsung sejak Kamis lalu tersebut. "Yang penting ialah bagaimana kebenaran diletakkan di atas meja. Apa yang terjadi? Siapa pelaku? Siapa korban? Baik korban maupun pelaku sama-sama menjelaskan sehingga kebenaran itu diletakkan di atas meja. Dari kebenaran itu bisa diukur apakah perbuatan itu bersifat kriminal, sekadar terbawa situasi, bersifat politik. Dari situ kemudian bisa dipilah-pilah mana yang akan diteruskan secara hukum, dan mana yang akan diberikan amnesti, serta bagaimana pemberian amnesti. Itu semua dengan tujuan, mari kita semua menyembuhkan luka-luka lama itu," tegasnya. Emil Salim menjelaskan, lokakarya kelima ini bertujuan menghimpun masukan dalam rangka menyusun rencana kerja yang komprehensif bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, penyelenggaraan korporasi yang baik, dan juga terkembangkannya masyarakat warga dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebelum lokakarya nasional diadakan, telah dilakukan tiga pralokakarya, yaitu tentang Masyarakat Warga/Civil Society, Penyelenggaraan Negara yang Baik/Good Governance, dan Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Korporasi/Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. UU Peradilan HAM Sementara itu, dalam seminar hukum di Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof Dr Loebby Loqman mengemukakan, Undang-undang (UU) mengenai Peradilan HAM yang akan dibuat pemerintah bersama DPR dikhawatirkan tidak mampu menjangkau pelanggar HAM, terutama di Aceh, Irian Jaya, dan Maluku, seperti yang dituntut masyarakat. Sebab, sebuah UU dalam hukum pidana tidak lazim berlaku surut (retroaktif). Namun sejalan dengan tuntutan masyarakat dan untuk memenuhi rasa keadilan, lebih baik UU Peradilan HAM berlaku surut. Seminar yang diprakarsai Program Magister Ilmu Hukum Unkris itu menampilkan pula Prof Dr CFG Sunaryati Hartono dan Prof Dr Tb Ronny R Nitibaskara. Loebby mengakui, pelanggar HAM di Aceh atau daerah lain memang dapat diadili melalui peradilan koneksitas, seperti yang diusulkan sebagian masyarakat. Peradilan koneksitas dimunculkan karena memang peradilan HAM-jika tetap mengacu pada larangan tidak bisa berlaku surut-tidak akan bisa menjangkau pelaku pelanggaran HAM. Kalau pelaku pelanggaran HAM tersebut diadili di peradilan militer, karena mereka merupakan anggota militer, masyarakat tak mempercayainya lagi. "Peradilan koneksitas untuk memperoleh keadilan yang berimbang bagi pelaku pelanggaran HAM yang berasal dari sistem hukum berbeda (sipil dan militer-Red). Dengan diajukan ke peradilan koneksitas, diharapkan akan terjadi persamaan persepsi, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang relatif sama bagi pelaku yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda tersebut," katanya. Jika pelaku diadili di peradilan militer, lanjut Loebby, dalam sistem peradilan koneksitas majelis hakim akan dipimpin seorang hakim militer dan anggotanya hakim sipil. Namun, jika pelaku diadili di peradilan sipil, maka ketua majelis hakim berasal dari peradilan umum dengan anggota hakim militer. Akan tetapi, ujar Dekan Fakultas Hukum Unkris itu, pelaksanaan peradilan koneksitas bukan tanpa kendala. Pelanggaran HAM di wilayah operasi militer seperti Aceh, tidak selalu memunculkan terdakwa yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda. (oki/tra)

**KOMPAS - Rabu, 08 Dec 1999 Halaman: 6 Penulis: ELY Ukuran: 3230
DIPERLUKAN TAP MPR TENTANG REKONSILIASI NASIONAL**

Jakarta, Kompas Ancaman terjadinya disintegrasi bangsa dan negara terus membayang. Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus tanggap memecahkan persoalan itu, yaitu dengan membuat Ketetapan (Tap) MPR yang menegaskan terwujudnya rekonsiliasi nasional. Demikian pandangan yang mengemuka dalam Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja (BP) MPR, Selasa (7/12), di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta. Hari kedua Rapat PAH II BP MPR diisi pengantar musyawarah oleh tiga fraksi, yaitu Fraksi TNI/Polri, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB). Melalui juru bicaranya A Taufiqurrahman, F-KB mengingatkan agar masalah rekonsiliasi nasional tidak hanya sekedar menjadi materi pidato, tetapi harus diwujudkan secara nyata. "Sebab, rekonsiliasi merupakan bagian dari proses konsolidasi demokrasi bangsa yang harus dilalui secara gradual, damai, tanpa darah yang mengalir setetes pun," ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua PAH II BP MPR Rambe Kamarulzaman, yang didampingi Wakil Ketua PAH II BP MPR Sabam Sirait. F-TNI/Polri melalui juru bicaranya Budi Harsono menegaskan perlunya Tap MPR tentang rekonsiliasi nasional untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa yang kini dihadapi. "Tap itu dapat dijadikan pedoman dalam mengatasi ancaman tersebut," katanya. Sedangkan dalam pandangan F-KKI, untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa tidak harus dengan menjadikan Indonesia negara federal. Dikatakan, sistem negara federal hanya dianut negara-negara kontinental, bukan kepulauan seperti Indonesia. Bentuk negara kesatuan adalah yang tepat untuk negara kepulauan. Ini pula yang dianut oleh Jepang. Tap antinarkoba Selain masalah rekonsiliasi nasional, ketiga fraksi juga menilai perlunya Tap MPR untuk menanggulangi masalah narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). F-TNI/Polri bahkan berpendapat Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR yang harus diprioritaskan hingga Sidang Tahunan MPR tahun 2000 adalah Rantap tentang rekonsiliasi nasional dan Rantap tentang narkoba. "Bila dipandang perlu BP MPR dapat membuat surat rekomendasi ke pimpinan MPR untuk diteruskan kepada pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjutinya," tegas Budi Harsono. Hal yang sama disampaikan F-KB. Menurut Taufiqurrahman, kasus narkoba sudah sangat kronis, keberadaannya sudah membanjir di seluruh negeri. "Kita sudah mengetahui dari mana barang itu didatangkan, siapa pembawanya, di mana transaksinya, akan tetapi para penegak hukum hanya membisu seribu basa, ada apa ini? Jargon memberantas dan perang terhadap narkoba hanya sebatas lipstik. Untuk itu, F-KB sepakat masalah narkoba dimasukkan dalam Tap tersendiri," ungkapnya. Peran TNI Sementara, soal peran TNI ketiga fraksi setuju agar dilakukan reposisi dan redefinisi. F-KB berpendapat, TNI dituntut profesionalismenya dalam menjalankan tugas, selain lebih jeli dalam menangkap aspirasi rakyat. "Kalau memang TNI harus melepaskan dwifungsi ABRI-nya, maka TNI harus mengikuti kehendak rakyat tersebut," kata Taufiqurrahman. (ely)

KOMPAS - Kamis, 09 Dec 1999 Halaman: 7 Penulis: SIR Ukuran: 3174

Upaya Rekonsiliasi di Ambon Disosialisasikan, "Deklarasi Hentikan Pertikaian

Upaya Rekonsiliasi di Ambon DISOSIALISASIKAN, "DEKLARASI HENTIKAN PERTIKAIAN" Ambon, Kompas Gubernur Maluku M Saleh Latuconsina menyatakan, hari Rabu (8/12) merupakan hari libur resmi untuk Kotamadya Ambon dan sekitarnya. Hari libur tersebut digunakan untuk menyebarkan selebaran ke seluruh pelosok Ambon, yang berisi "Deklarasi Menahan Diri, Menghentikan Pertikaian". Selain deklarasi, juga disebarkan pernyataan sikap tiga tokoh agama yang pada intinya menyerukan penghentian pertikaian dan saling memaafkan. Deklarasi yang diprakarsai oleh Latuconsina, Panglima Kodam (Pangdam) XVI Pattimura Brigjen Max Tamaela, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Brigjen (Pol) I Ketut Dewa Astika, dan sejumlah tokoh agama, pemuda dan masyarakat, dibuat hari Selasa, dan keesokan harinya disebarkan dengan menggunakan helikopter Puma ke berbagai pelosok di Ambon. Disebutkan, pertikaian antarkelompok warga yang terjadi di Maluku, khususnya di Kotamadya Ambon dan sekitarnya yang sudah berlangsung 11 bulan, sudah harus segera dihentikan, demi kepentingan seluruh masyarakat. Korban jiwa dan harta benda yang sangat menyedihkan adalah catatan sejarah terpahit yang menimpa di Maluku pada akhir milenium kedua. "Dalam pertemuan dengan berbagai kelompok yang bertikai, mereka telah menyepakati untuk bersama-sama menahan diri menghentikan pertikaian demi adanya rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai acara ritual keagamaan, di bulan Desember 1999 sampai Januari 2000. Yakni memasuki Puasa, Hari Raya Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H," tegas Latuconsina. Perlu didukung Menurut Latuconsina, upaya demi upaya telah dilakukan untuk menghentikan pertikaian, namun belum membuahkan hasil karena tidak didukung maksimal oleh berbagai pihak. Itu membuktikan, permasalahan di Maluku semakin kompleks dan rumit, sehingga perlu dicarikan solusi penyelesaian yang tepat dan efektif. Dikatakan, pihak yang bertikai agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan pertikaian terhitung sejak Selasa (7/12). Semua elemen formal dan nonformal serta seluruh lapisan masyarakat diserukan agar dapat memanfaatkan kondisi ini dengan tulus dan ikhlas, dan proaktif merundingkan bersama menuju terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Ketua MUI Maluku RR Hassanusi menyatakan, deklarasi ini harus didukung serta ditindaklanjuti sebab bertepatan dengan dimulainya ibadah Puasa. "Perang melawan nafsu sendiri merupakan perjuangan lebih berat dari perang fisik, momentum bulan Ramadhan diabaikan untuk latihan dan jihad melawan nafsu itu," kata Hassanusi. Ketua Badan Pekerja Harian (BPH), GPM, pendeta Semmy Titaley, Sth menyatakan, deklarasi itu agar diterima sebagai jawaban Tuhan atas seluruh doa. Selain itu, membenahi diri dan membasuh peluang hati menyambut Natal. Ketua Keuskupan Ambonia Mgr PC Mendagi Msc, juga mengungkapkan minggu-minggu Advent yang bersamaan jatuhnya dengan Bulan Ramadhan. "Semoga dengan deklarasi ini ada rasa aman dan damai di Maluku, khususnya Ambon," Kata Mandagi. (sir

KOMPAS - Kamis, 16 Dec 1999 Halaman: 6 Penulis: ELY Ukuran: 4084

PAH II BP MPR Sepakat Susun Rantap Rekonsiliasi Nasional

PAH II BP MPR SEPAKAT SUSUN RANTAP REKONSILIASI NASIONAL Jakarta, Kompas Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja (BP) MPR sepakat untuk membuat Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR tentang Rekonsiliasi Nasional, meski ada dua fraksi yang menyatakan keberadaan Rantap tersebut tidak terlalu penting. Karena suara mayoritas menghendaki penyusunannya, Rapat PAH II di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Rabu (15/12), memutuskan, menyusun Rantap tersebut. Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) di PAH II MPR Taufiqurrahman berpendapat, Tap MPR tentang Rekonsiliasi Nasional akan menjadi "payung" dari segenap upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional. "Jadi ini gerakan struktural untuk menciptakan rekonsiliasi," ujarnya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua PAH II BP MPR Aisyah Aminy. Fraksi Reformasi dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) berpendapat lain. Kedua fraksi ini tidak melihat urgensi dari sebuah rekonsiliasi nasional yang dilahirkan dalam bentuk Tap MPR. "Apa artinya sebuah Tap MPR yang berbau formalisme seremonialisme dan sekadar ikrar, tetapi tidak punya konsekuensi dan kekuatan hukum akan pemberlakuannya," kata juru bicara F-PBB Muchtar Naim. Menurut Muchtar, rekonsiliasi harus dibangun melalui pendekatan struktural dan fungsional, dalam arti penyelamatan dan pemberdayaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus melalui pemberdayaan dan pengaktualisasian kehidupan berdemokrasi. Mirip obat sakit kepala Hal senada disampaikan anggota Fraksi Reformasi Mutamimul Ula. Dikatakan, keberadaan Tap MPR tentang Rekonsiliasi Nasional tidak diperlukan, jika gerakan politik efektif dalam membangun moralitas elite dan melakukan reformasi terhadap pranata atau sistem. "Jika kita hanya punya Tap MPR, tetapi tidak ada reformasi moralitas elite dan reformasi pranata, maka Tap itu tidak akan ada artinya. Sekarang ini sebetulnya reformasi baru sekitar 10 persen," ungkapnya. Muchtar berpendapat, keberadaan Tap MPR tentang Rekonsiliasi Nasional hanyalah seperti obat sakit kepala penenang nyeri sementara, tanpa menyentuh dan mengobati penyebab rasa sakit itu. "Tampak, seolah-olah dengan membuat Tap maka permasalahan rekonsiliasi selesai. Ini resep politik yang terbiasa berpikir secara mistikal metafisikal, yang isinya mirip jampi-jampi dan mantra-mantra politik. Menonjolkan aspek formalisme seremonialisme, daripada upaya menggali faktor-faktor penyebab sesungguhnya," tutur Muchtar Naim. Ditegaskan, jika hendak membangun rekonsiliasi, maka yang harus dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi dengan demokrasi. Yaitu menanggalkan baju-baju, laras-laras, dan segala macam atribut yang selama ini jelas bertentangan dengan demokrasi. Ini butuh keberanian moral, dan keberanian politik. MPR adalah dapur penggodogan demokrasi, dan tempat belajar berdemokrasi. Menjaga keutuhan bangsa Sementara Fraksi TNI/Polri melalui anggotanya Budi Harsono berpandangan, untuk situasi normal keberadaan Tap MPR tentang Rekonsiliasi Nasional memang tidak diperlukan. Namun, saat ini negara sedang menghadapi krisis yang mengancam persatuan bangsa dan kesatuan negara. "Oleh karena itu, harus ada keputusan politik dari MPR untuk mempertahankan keutuhan negara ini," katanya. Ibrahim Ambong dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) berpendapat sama. Dikatakan, persatuan dan kesatuan hanya bisa dicapai bila demokrasi terjamin, dan keberagaman yang ada di masyarakat diakomodasi. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan politik yang menjamin hal tersebut. "Keberadaan Tap itu menjadi semakin penting untuk menjamin hal tersebut," ungkapnya dalam rapat yang dihadiri 27 dari 45 anggota PAH II BP MPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) melalui juru bicaranya Abdullah Sarwani mengingatkan agar keberadaan Tap MPR tentang Renkosiliasi Nasional tidak tumpang-tindih dengan Tap MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang di dalamnya juga menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa. (ely

KOMPAS - Selasa, 21 Dec 1999 Halaman: 8 Penulis: FER Ukuran: 2544

PEMERINTAH PERLU AJUKAN RUU KOMISI KEBENARAN

Jakarta, Kompas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang seharusnya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) karena Perpu tersebut tidak memadai untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM. Sebaliknya, selain mengajukan RUU Pengadilan HAM yang baru, Pemerintah juga perlu mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena kedua instrumen hukum itu dapat saling melengkapi dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dikatakan Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihubungi Kompas, di Jakarta, Sabtu (18/12). Ia mengatakan, secara konstitusional DPR memang hanya bisa menolak atau menerima Perpu yang diajukan pemerintah. Seperti diberitakan, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra berharap DPR menolak Perpu No 1/1999 tentang Pengadilan HAM karena Perpu tersebut dianggap banyak kekurangannya (Kompas, 18/12). Salah satu kekurangan Perpu No 1/1999 yang banyak disorot berbagai kalangan masyarakat adalah pasal 24. Dalam pasal 24 itu, disebutkan, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan itu, kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diberlakukan Perpu itu, yaitu 8 Oktober 1999, tidak dapat diadili dengan ketentuan Perpu tersebut. Abdul Hakim mengingatkan, jika Pengadilan HAM diatur dengan undang-undang akan bisa menimbulkan masalah yuridis. "Kalau ada UU Pengadilan HAM dan undang-undang tidak berlaku surut, kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU diberlakukan tidak dapat diadili. 'Kan, UU tidak berlaku surut," katanya. Untuk itu, dalam RUU tentang Pengadilan HAM, ada pasal peralihan yang menyatakan kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan akan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oleh karena itu, menurut Abdul Hakim, selain mengajukan RUU tentang Pengadilan HAM, pemerintah sebaiknya juga mengajukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Kalau tidak dapat diselesaikan dengan Komisi itu, pelaku pelanggaran HAM dapat tetap diadili dengan ketentuan UU Pengadilan HAM," katanya. (fer)

KOMPAS - Jumat, 24 Dec 1999 Halaman: 4 Penulis: BANAWIRATMA, JB Ukuran: 10877

Natal Terakhir Abad Ke-20: Truth & Reconciliation

NATAL tak mungkin lagi di Ambon, katanya. Begitulah kalau Natal dimengerti sebagai pesta-pesta kolektif meriah. Namun, kalau perayaan Natal dihayati sebagai anamnesis, sebagai pengenangan penuh pesan yang mengundang arah dan langkah bertindak, maka dalam keadaan mana pun mereka yang percaya akan berusaha mewujudkannya. Justru di tengah-tengah banyak kekerasan yang tidak jarang berwajah agama akhir-akhir ini, semakin mendesaklah pertanyaan mengenai makna perayaan-perayaan agamani dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Saat ini kita akan meninggalkan abad ke-20 yang menyandang banyak keganasan dan akan memasuki abad baru sekaligus milenium baru. Baiklah kita sadari bahwa kita masih mempunyai modal untuk membangun kehidupan bersama. Rekonsiliasi, pendamaian, perukunan kembali bukanlah utopia mengada-ada, karena betapa pun umat beragama menanggung cacat dan kekurangan, betapa pun tidak bebas dari ikut serta dalam kekerasan, namun juga masih memiliki "modal untuk berusaha bersama". Umat beragama perlu mencari upaya-upaya yang dapat membangun rekonsiliasi dan mengerahkan segenap tenaga untuk itu. Rekonsiliasi individual dan sosial Tahun lalu R Schreiter menulis sebuah buku berjudul *The Ministry of Reconciliation, Spirituality and Strategy*. Di situ dia mengemukakan pertimbangan-pertimbangan mengenai rekonsiliasi, yang penting kita renungkan di tengah situasi kita sekarang ini. Dibedakan rekonsiliasi individual dan rekonsiliasi sosial. Rekonsiliasi individual terjadi apabila kemanusiaan korban (victim) yang telah dirusak oleh kejadian-kejadian traumatis dipulihkan. Pemulihan semacam itu mungkin dipersiapkan oleh komunitas yang mendampingi. Rekonsiliasi mengantarkan korban untuk memasuki tempat yang baru, bukan kembali ke keadaan sebelumnya. Kejadian traumatis tidak dilupakan, namun kehidupan yang baru mengatasi kejadian itu beserta akibatnya. Rekonsiliasi individual menyangkut pengalaman personal, menyentuh kemanusiaan korban dan kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan orang-orang lain. Korban mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, dan dari situ diantar untuk mohon pengampunan Tuhan bagi penjahat, dan korban sendiri juga mengampuni dengan harapan penjahat itu bertobat. Pengampunan bukanlah melupakan masa lalu, melainkan mengingat masa lalu dengan cara yang baru. Ingatan tetap ada, namun sudah ditransformasikan. Ingatan tidak lagi menguasai masa kini dan pembalasan tidak ada lagi, meskipun tuntutan keadilan tetap ada. Rekonsiliasi individual dan sosial mempunyai ciri-ciri yang serupa. Keduanya ingin keluar dari kungkungan masa lampau demi masa depan yang lebih baik, di mana perusakan dan pemerkosaan kemanusiaan individu dan kelompok tidak terjadi lagi. Keduanya ingin mengubah hubungan-hubungan melalui pemulihan kemanusiaan korban dan pertobatan pada pihak masyarakat. Rekonsiliasi individual penting dan akan memperkuat rekonsiliasi sosial, namun keduanya tidak sama saja, sebab masyarakat memang bukanlah hanya hasil penjumlahan individu-individu saja. Rekonsiliasi sosial menyangkut tindakan-tindakan moral yang perlu dijalankan dan perbuatan-perbuatan yang perlu diperbaiki. Jose Zalaquett, ketua komisi Truth and Reconciliation dari Chile menjelaskan, rekonsiliasi sosial sebagai pengampunan dan pendamaian yang harus dimengerti sebagai suatu proses membangun kembali tata moral masyarakat yang adalah lebih sehat dari pada penghukuman. Rekonsiliasi menempuh jalan penyembuhan. Rekonsiliasi merupakan tindakan moral dan perjalanan spiritual, bukan sekadar tugas yang dimulai dan diakhiri pada saat tertentu. Tinggal di masa lampau tidak membawa penyembuhan dan berjalan menuju masa depan membutuhkan perubahan-perubahan ke arah tata sosial yang menjauhkan pemerintah maupun pihak lain dari pemerkosaan keluhuran martabat dan hak-hak asasi manusia (HAM). Komisi nasional HAM menjadi tanda pembelaan keluhuran martabat dan hak-hak asasi manusia. Semacam komisi Truth and Reconciliation, komisi kebenaran dan pendamaian, perukunan kembali, juga bisa menjadi simbol kesungguhan sosial untuk menempuh proses rekonsiliasi secara serius dan akan menumbuhkan kepercayaan serta solidaritas satu sama lain. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang sudah bergerak di Indonesia dapat dilihat sebagai semacam komisi Truth and Reconciliation itu. Tugas dan pekerjaan komisi-komisi semacam itu dapat digambarkan dengan menunjuk empat hal yang dikemukakan oleh Daan Bronkhorst sebagai berikut; (1) Mereka harus berusaha menemukan kebenaran mengenai yang sesungguhnya terjadi pada waktu kekerasan. Kebenaran itu menyangkut jumlah mereka yang mati maupun motif-motif kejahatan yang ada di situ. Tanpa pengungkapan kebenaran ini, masyarakat akan tetap hidup dalam memori kolektif yang terpecah. (2) Proses yang ditempuh harus memperkuat hukum. Perlu diusahakan hormat terhadap hukum, apalagi kalau hukum telah dipakai untuk melegitimasikan kekerasan. Selanjutnya diperlukan juga hukum yang melindungi individu dan kelompok dari pemerkosaan. (3) Proses harus berjalan secara demokratis dan terbuka untuk

diperiksa. Dalam proses ini sebanyak mungkin orang ikut serta, terutama para korban. (4) Harus diusahakan jalan untuk memperbaiki nasib korban begitu rupa, sehingga mereka dapat menuntut kembali sekurang-kurangnya sebagian dari kehilangan mereka. Dalam keempat tindakan itu tampaklah bahwa rekonsiliasi tidak terpisahkan dengan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijangkau. Rekonsiliasi merupakan proses perjalanan dari kejadian dan memori masa lalu melalui cerita yang benar, menuju masa depan penuh pengharapan. Pengampunan Pengampunan dalam rekonsiliasi individual merupakan keputusan korban untuk tidak lagi dikuasai oleh akibat-akibat kejadian masa lalu dan merupakan pilihan bebas untuk masa depan. Sehubungan dengan rekonsiliasi sosial terdapat dua macam pengampunan, yang dapat dipandang sebagai sejajar dengan pengampunan individual. Pertama adalah amnesti, yang berasal dari kata Yunani *amnestia*, artinya kelalaian atau kelupaan. Memberi amnesti berarti secara legal melupakan perbuatan yang telah dilakukan. Apa pun yang telah diperbuat tidak akan diperiksa, pelaku kesalahan tidak perlu menjawab tuntutan atau dipersalahkan atau dihukum sesuai dengan perbuatannya. Amnesti ini pada umumnya digunakan oleh pihak pemenang untuk menciptakan iklim kehendak baik dan kerja sama bersama dengan lawannya yang kalah. Perlawanan masa lalu dilupakan, yang penting membangun kerja sama ke arah masa depan. Amnesti sering digunakan untuk mencegah munculnya kekerasan lagi. Misalnya, amnesti diberikan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat setelah diktator militer. Para pemimpin militer mungkin meminta amnesti untuk diri mereka dan pasukannya. Sebagai gantinya, mereka tidak akan mencoba menggulingkan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Pada permusuhan dan perang saudara mungkin dibutuhkan amnesti oleh kedua belah pihak, agar mereka dapat bersama-sama lagi membangun bangsa. Demikian misalnya terjadi di El Salvador. Kedua, pengampunan dalam rekonsiliasi sosial bisa juga berarti tidak dihukum. Kesalahan tidak dilupakan, hanya tidak dihukum. Jadi terbuka kemungkinan untuk pemeriksaan, pengadilan dan keputusan bersalah. Proses ini lebih berat. Mengakui kesalahan tidaklah mudah dan tidak ringan. Namun, dalam pengampunan semacam ini sekurang-kurangnya kesalahan diakui dan diterima. Dengan demikian kebenaran diceritakan dan memori kolektif tidak terpecah-pecah. Perjuangan demi kebenaran dan pendamaian, demi perukunan kembali, bukanlah hanya tugas dan pekerjaan dari komisi-komisi semacam komisi Truth and Reconciliation, melainkan undangan yang ditujukan kepada semua. Dengan cara yang berbeda-beda semua telah tersentuh oleh kekerasan, dan semua diundang untuk ikut serta memasuki proses rekonsiliasi, dalam semua dataran kehidupan. Melangkah masuk ke abad baru dan milenium baru merupakan kesempatan baik untuk mengusahakan hidup sebagai ciptaan baru, dengan berusaha menuju ke tempat baru yang ditandai dengan kebenaran dan pendamaian. Dari situ apa yang sudah terjadi di masa lalu dapat dipandang secara baru, dan dari situ pula ditimba dorongan untuk mengusahakan masa depan yang diharapkan. Menuju kebenaran dan pendamaian Apa hubungan semua itu dengan perayaan Natal, yang mengenang kelahiran Yesus. Mengenang kelahiran Yesus tidaklah terlepas dari kepedulian dan perjuangan dalam seluruh kehidupannya. Kepedulian itu akan tampak jelas kalau dihadapkan dengan apa yang melawan Yesus dan apa yang dilawan oleh Yesus. Dalam konflik-konflik yang dialaminya, Yesus melawan pembunuhan dan kebohongan. Lawan-lawan menuduh Yesus sebagai yang datang dari Iblis. Namun, Yesus membuka kenyataan hidup mereka, menelanjangi apa yang menjadi pola hidup lawan-lawan itu, yakni pembunuhan dan kebohongan (lihat Yoh 8:44). Berhadapan dengan murder and lie, pembunuhan dan kebohongan, Yesus memperjuangkan truth and reconciliation, kebenaran dan pendamaian kembali. Yesus memperjuangkan kehidupan. Perayaan-perayaan kolektif hidup beragama selayaknya semakin mengantar umat beragama untuk membangun komunitas rekonsiliasi. Komunitas rekonsiliasi akan memperkembangkan hospitalitas menjadi komunitas yang terbuka dan ramah, akan ikut menciptakan ruang yang aman dan menjadi teman bagi korban. Komunitas semacam ini sekaligus menjadi komunitas naratif, yang mampu membuka memori-memori dan membangun hubungan-hubungan baru dalam cerita-cerita para korban. Dengan demikian pengharapan baru dibangun dan rekonsiliasi dimungkinkan. Pengenangan naratif semacam ini semakin mendesak, sebab masyarakat sudah terlalu lama menanggung trauma kekerasan dan cerita-cerita bohong. Merayakan kelahiran Yesus dengan pesta-pesta kolektif meriah saja, terlepas dari apa yang dipedulikan, dari apa yang diperjuangkan serta apa yang dilawan oleh Yesus selama hidupnya, bukanlah perayaan Natal sejati, melainkan janaan-janaan malah menyembunyikan apa yang sebenarnya harus dilawan dan dihindari oleh Natal, yakni pembunuhan dan kebohongan. Selamat Natal bagi semua yang merayakan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua yang menjalani, menuju Idul Fitri sejati. Kepada semua; Selamat Tahun Baru, Selamat memasuki Abad Baru dan Milenium Baru. * JB Banawiratma, dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Suara Pembaruan, 27 Juni 1999

Perlu Dibentuk, Dewan Rekonsiliasi Nasional

Pembaruan/Yuniawan W Nugroho

Jakarta, *Pembaruan*

Pertemuan para tokoh partai, yang lebih banyak membahas figur presiden mendatang, dinilai wajar dan perlu direspon secara positif. Bila dimungkinkan, mereka dan para tokoh masyarakat segera saling bertemu, untuk kemudian dibentuk Dewan Rekonsiliasi Nasional.

Pendapat tersebut dikemukakan Mensesneg/Menkeh Prof Dr Muladi SH, Ketua DPP Golkar Marzuki Darusman, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Syamsudin Haris dan Dr Mochtar Pabottingi, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit. Mereka dihubungi *Pembaruan* secara terpisah di Jakarta, sehubungan adanya pertemuan sejumlah tokoh politik yang berusaha menelurkan pemikiran untuk mencari jalan tengah dalam menemukan figur pemimpin nasional mendatang. Menurut Muladi, untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional memang diperlukan pertemuan tokoh-tokoh partai dan masyarakat. Sedang waktu yang tepat untuk segera dilakukan pertemuan itu, tuturnya, pada tanggal 8 Juli mendatang.

Dia berharap, pertemuan rekonsiliasi itu akan menjadi cikal-bakal pembentukan Dewan Rekonsiliasi Nasional, yang memang diperlukan. "Dari dulu kan masalah rekonsiliasi sudah banyak dibicarakan," katanya, Jumat petang (25/6).

Sedang Marzuki Darusman yang dihubungi Minggu (27/6) pagi, mengatakan pertemuan terpisah keempat tokoh politik tersebut merupakan suatu perkembangan yang menarik. Karena kita seolah-olah tidak ada alternatif pencalonan presiden. Sekarang ada jalan bahwa proses politik tidak boleh mengalami kemacetan. Kalau ada alternatif lain, pilihannya tentu di luar yang diajukan oleh partai yang unggul dalam pemilu. Sebab sistem kita memungkinkan bahwa calon presiden dari luar calon yang diajukan partai yang ada. "Tentunya kita tidak bisa menghilangkan proses demokrasi yang sudah tercapai. Saya masih menganggap PDI mempunyai hak moral politik untuk memimpin. Soal figur itu soal lainnya. Jangan sampai gerakan keempat partai terkesan membalikkan proses demokrasi dan sangat berbahaya bagi kelanjutan reformasi," ujarnya.

Dikemukakan, Golkar tidak ingin proses pembalikan demokrasi tersebut. Kita mengikuti dengan cermat pencarian alternatif bisa lebih dari satu. Masyarakat, menurut dugaannya, terbuka untuk memasukkan alternatif dari yang diajukan dari partai-partai yang ada. Itu tidak berarti demokrasi dipilih oleh MPR. "Pemimpin bangsa dan kelembagaan terbuka untuk dibicarakan bersama-sama. Kita tidak membicarakan orang tetapi hasil dari sistem pemilu. Menerima hasil pemilu harus menerima kenyataan PDI Perjuangan muncul sebagai yang unggul," kata Marzuki.

Pengkutuban Polarisasi

Pada Sabtu (26/6) siang, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, di kantor PP Muhammadiyah, dan menerima Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, di kantor PBNU, Jakarta.

Kepada wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup, Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, dan Amien menyatakan, saat ini memang tengah dicari jalan keluar terbaik. Apalagi untuk menghadapi adanya kecenderungan, yang menurut istilah

Amien Rais, adalah "pengkutuban polarisasi" yang menajam akhir-akhir ini.

"Jangan sampai alternatif masa depan seolah-olah hanya ada dua saja, itu bisa mencelakakan," kata Amien Rais. Yang dimaksud Amien adalah adanya dua kubu, yakni kubu Habibie di satu sisi dan kubu Megawati di sisi lain. Antara satu kubu dan kubu lainnya saling menyatakan, jika bukan jagonya yang menang akan terjadi kekacauan. Hal itu yang menurut Amien dan dibenarkan Gus Dur jangan sampai terjadi.

Pertemuan yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu berlangsung dalam suasana santai dan banyak diwarnai canda tawa dan *joke-joke* ringan khas Gus Dur.

Gus Dur, yang mengaku akan tetap konsisten mendukung pencalonan Megawati sebagai presiden di SU MPR, mengemukakan satu realitas yang harus dihadapi adalah pemahaman dalam hukum Islam yang menyatakan, negara tidak boleh dipimpin seorang wanita. Oleh karena itu menurut Gus Dur diperlukan rekonsiliasi nasional untuk menghadapi kenyataan ini.

"Kita hanya ingin semua persoalan bangsa ini bisa lancar," kata Gus Dur soal pertemuan tersebut. Dikatakannya, apa yang dilakukannya dengan Amien Rais, Hamzah Haz, Akbar Tandjung dan Habibie pasca pemilu ini adalah dalam rangka peninjauan agar tercapai jalan keluar terbaik. Ketika ditanya, apa jalan keluar terbaik itu, Gus Dur menyatakan, "Ya itu yang sedang kita cari, kok ini malah ditanyakan." Yang jelas Gus Dur mengaku, dirinya dan Amien Rais tidak memiliki *interest* (kepentingan) melakukan ini semua, kecuali untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Meskipun juga PBNU dalam muktamarnya juga telah menyatakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi perempuan. Usai bertemu Ketua Umum DPP PPP, Hamzah Haz, Gus Dur juga menyatakan hal yang sama.

Wajar

Sementara Syamsuddin Haris, yang dihubungi Minggu (27/6) pagi, menilai pertemuan tersebut merupakan hal wajar. Tapi, lanjutnya, dari materi yang dibahas dalam pertemuan itu, di satu sisi menunjukkan belum cukup dewasanya elit politik untuk menyikapi kekalahan.

Haris berpendapat, cukup wajar jika Megawati nantinya menjadi presiden meskipun masih harus melalui mekanisme Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR). "Memang baru itu yang kita miliki untuk memilih presiden," kata Haris yang mempertanyakan, apakah benar rakyat Indonesia memang tidak ingin dipimpin presiden perempuan.

Mestinya, menurut dia, Megawati Soekarnoputri juga berinisiatif mengadakan atau mengikuti pertemuan semacam itu. Karena, kemenangan PDI Perjuangan yang tidak bisa mencapai mayoritas mutlak masih membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk bisa menjadi presiden.

Hal senada dikemukakan Mochtar Pabottingi. Dia menyayangkan apabila dalam pertemuan itu hanya membicarakan soal gender berkaitan dengan presiden mendatang. Karena, menurut dia, adalah wajar jika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden menyusul kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu yang lalu. "Kalau pun nanti tidak mampu atau gagal menjalankan tugas-tugasnya, biar Megawati sendiri yang mempertanggungjawabkan pada rakyat," kata Mochtar.

Soal presiden laki-laki atau perempuan, Mochtar melihat hal itu sekarang bukan persoalan karena banyak juga perempuan yang memiliki kemampuan lebih dibanding laki-laki. Hanya saja Mochtar menyayangkan Megawati, bukan karena keperempuannya, tetapi karena tidak bersedia menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin.

Sedang Arbi Sanit, yang dihubungi Minggu (27/6), menilai pada dasarnya pertemuan para tokoh partai itu membahas aspirasi yang berkembang di kalangan para Ulama maupun Kiai yang selama ini menjadi sumber kekuatan politik para tokoh tersebut, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Namun sampai akhir pertemuan itu sendiri ternyata belum mengambil suatu keputusan atau sikap yang jelas tentang boleh tidaknya wanita atau Megawati Soekarnoputri menjadi presiden di negeri ini," kata Arbi. Dia justru menyarankan sebaiknya para pemuka agama Islam mengadakan pertemuan untuk membahas kepemimpinan nasional ada ditangan perempuan, dalam hal ini Megawati. (128/135/140/W-8)

Last modified: 6/27/99

Suara Pembaruan, 20 September 1999

Perlu Rekonsiliasi Demi Akhiri Konflik

Jakarta, Pembaruan

Negara sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya terbuka untuk memperoleh maaf dari masyarakat terutama para korban, dengan satu kondisi bahwa negara diyakinkan tidak akan berkesempatan lagi mengulang perbuatan-perbuatannya di masa lalu, kata anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, Yasmin Louise Sooka.

"Rekonsiliasi perlu dibangun dalam sebuah negara demi mengakhiri konflik berkepanjangan yang dapat membuat suatu negara berakhir pada kondisi chaos," ujarnya dalam acara dialog terbuka Indonesia Masa Depan, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bekerjasama sejumlah LSM di antaranya Infid, Elsam, ICEL, Walhi, Kalyanamitra dan Kontras, di Jakarta, Senin (20/9) pagi.

Yasmin yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Pelanggaran HAM dari Komisi Kebenaran tersebut hadir untuk berbagi pengalaman masalah penyelesaian non militer terhadap yang terjadi di Afrika Selatan selama masa pemerintahan transisi dan menjadi contoh bagi negara-negara lain termasuk Indonesia.

Wanita keturunan India dan berkewarganegaraan Afrika Selatan ini menjelaskan, pengampunan terhadap para pelaku pelanggaran HAM memang sangat menyakitkan, terutama bagi para korban. Namun itu harus terjadi guna membangun masa depan suatu negara yang demokratis dan damai.

Ia memberikan banyak masukan bagaimana Afrika Selatan berhasil melakukan rekonsiliasi terhadap pemerintahan yang otoriter dan militeristik. Ia menjelaskan, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Afrika Selatan merupakan hasil proses dari dialog-dialog yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, LSM dan parlementer serta kekuatan-kekuatan partai politik. Negosiasi, kompromi dilakukan untuk melahirkan komisi tersebut.

Dijelaskan, bahwa rekonsiliasi bukan sekedar memaafkan atau melupakan berbagai tindak kejahatan yang dilakukan institusi negara di masa lalu.

"Namun, rekonsiliasi sebagai upaya pengakuan bahwa pelaku-pelaku kejahatan pelanggaran HAM mengaku bertanggungjawab atas segala tindakannya di masa lalu dan bertanggungjawab untuk menata kembali kehidupan," paparnya.

Pemerintahan Militer

Yasmin yang hadir mengenakan pakaian sari India mengatakan, pada awalnya pengampunan (amnesti) terhadap pemerintahan militer di Afrika Selatan sekitar tahun 1990-an memang sangat sulit diterima oleh masyarakat, khususnya para korban kekerasan. Banyak yang menuntut agar pelaku pelanggaran HAM tersebut diseret ke pengadilan internasional. Namun yang menjadi masalah sangat sulit menyeret pelaku ke pengadilan internasional tersebut. Sekalipun kita tahu siapa pelaku itu atau aktor intelektualnya. Akhirnya para korban melakukan kompromi dan menerima situasi ini dengan penekanan demi membangun negara di masa depan yang tanpa konflik.

Proses kompromi ini membutuhkan waktu panjang karena tidaklah mudah untuk memaafkan.

Lewat berbagai proses dengar pendapat di antara para korban, hearing dengan angkatan bersenjata atau unit intelijen, pelaku pelanggaran HAM (negara) dan gerakan pembebasan, maka kompromi dan negosiasi melahirkan pengampunan terhadap pemerintahan Afrika Selatan.

Ia juga menjelaskan bagaimana komisi ini terbentuk yakni melalui keputusan parlemen dan keanggotaannya sendiri dipilih oleh parlemen.

Ia juga menyinggung peran kaum perempuan, pemuda dan anak-anak korban kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan. Mereka diberi kesempatan untuk hearing atas penderitaan yang mereka alami termasuk kemudian melakukan treatment untuk mengembalikan mereka kepada kehidupan masyarakat yang normal.

(M-14)